



EKONOMI & BISNIS INDONESIA

Valentine Siagian ▪ Muhammad Fitri Rahmadana ▪ Edwin Basmar
Pratiwi Bernadetta Purba ▪ Lora Ekana Nainggolan ▪ Nur Arif Nugraha
Robert Tua Siregar ▪ Endang Lifchatullaillah ▪ Elisabeth Lenny Marit
Hengki MP Simarmata ▪ Agustian Budi Prasetya ▪ Bonaraja Purba



EKONOMI & BISNIS INDONESIA

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Penulis:

Valentine Siagian, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar
Pratiwi Bernadetta Purba, Lora Ekana Nainggolan, Nur Arif Nugraha
Robert Tua Siregar, Endang Lifchatullaillah, Elisabeth Lenny Marit
Hengki MP Simarmata, Agustian Budi Prasetya, Bonaraja Purba

Penerbit Yayasan Kita Menulis

Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2020

Penulis:

Valentine Siagian, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar
Pratiwi Bernadetta Purba, Lora Ekana Nainggolan
Nur Arif Nugraha, Robert Tua Siregar, Endang Lifchatullaillah
Elisabeth Lenny Marit, Hengki Mangiring Parulian Simarmata
Agustian Budi Prasetya, Bonaraja Purba

Editor: Alex Rikki & Janner Simarmata

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Valentine Siagian, dkk.

Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Yayasan Kita Menulis, 2020

xvi; 212 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6761-57-1

Cetakan 1, November 2020

- I. Ekonomi dan Bisnis Indonesia
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sehingga buku Ekonomi dan Bisnis Indonesia dapat disusun dan diselesaikan dengan baik oleh kolaborasi beberapa penulis.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terefleksi dengan sistem perekonomian yang dianut yang mendukung para pengusaha dan pemerintah sehingga bisnis dapat berkembang dengan baik. Tahun 2020 merupakan tantangan besar bagi masing-masing negara. Pertumbuhan ekonomi yang minus dan stagnan membutuhkan perhatian untuk diperbaiki. Masing-masing negara memilih sistem ekonomi yang dirasa sesuai untuk diterapkan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberi faedah materi keilmuan bagi para pembacanya mengenai Ekonomi dan Bisnis Indonesia.

Buku ini membahas bagian-bagian menarik dan penting seperti:

Bab 1 Sistem Ekonomi Indonesia

Bab 2 Sejarah Ekonomi Indonesia

Bab 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi

Bab 4 Krisis Ekonomi

Bab 5 Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Bab 6 Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Utang Luar Negeri

Bab 7 Perusahaan Non Koperasi BUMS, BUMN dan BUMD

Bab 8 Ekonomi Koperasi

Bab 9 Ekonomi Kreatif

Bab 10 Ekonomi Desa

Bab 11 Corporate Social Responsibility (CSR)

Bab 12 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Para penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi para pembaca yang mengikuti dan mengawal ekonomi dan bisnis di Indonesia. Kami dengan senang hati menerima masukan maupun kritik yang membangun demi penyempurnaan buku ini di edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para mahasiswa, dosen maupun pembaca umum.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam penyusunan maupun penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

November 2020

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel.....	xv

Bab 1 Sistem Ekonomi Indonesia

1.1 Sistem Ekonomi.....	1
1.2 Fungsi Sistem Ekonomi	2
1.3 Jenis-Jenis Sistem Ekonomi	2
1.3.1 Sistem Ekonomi Tradisional.....	2
1.3.2 Sistem Ekonomi Terpusat	4
1.3.3 Sistem Ekonomi Liberal.....	5
1.3.4 Sistem Ekonomi Campuran	6
1.4 Sistem Ekonomi di Indonesia	7

Bab 2 Sejarah Ekonomi Indonesia

2.1 Pendahuluan.....	11
2.2 Perekonomian Indonesia pada Masa Sebelum Kemerdekaan	12
2.2.1 Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)	12
2.2.2 Pendudukan Inggris (1811-1816).....	13
2.2.3 Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal).....	14
2.3 Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama	15
2.3.1 Pasca Kemerdekaan (1945-1950)	15
2.3.2 Masa Liberal (1950-1957)	20
2.3.3 Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967).....	20
2.4 Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru.....	22
2.5 Perekonomian Indonesia Pada Masa Reformasi.....	28
2.5.1 Presiden B.J.Habibie	28
2.5.2 Presiden Abdurrahman wahid.....	30
2.5.3 Presiden Megawati Soekarnoputri	30
2.5.4 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	31

Bab 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi

3.1	Pendahuluan.....	33
3.2	Pertumbuhan Ekonomi	36
3.2.1	Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	36
3.2.2	Pengukuran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	37
3.2.3	Pertumbuhan Ekonomi Klasik	39
3.2.4	Pertumbuhan Ekonomi Modern	40
3.3	Perubahan Struktur Ekonomi	44
3.3.1	Pengertian Struktur Perekonomian	45
3.3.2	Pemikir-Pemikir Pada Struktur Ekonomi	46
3.3.3	Implikasi Pergeseran Struktur di Indonesia	49

Bab 4 Krisis Ekonomi

4.1	Pengertian Krisis Ekonomi.....	55
4.2	Tipe Krisis Ekonomi dan Jalur Transmisi Utama	56
4.3	Pengalaman Krisis Ekonomi Asia	58
4.3.1	Faktor Penyebab.....	58
4.3.2	Dampak dan Proses	59
4.3.3	Respon Kebijakan.....	59
4.3.4	Hasil Kebijakan.....	60
4.3.5	Pelajaran yang dapat dipetik	60
4.4	Pengalaman Krisis Ekonomi Indonesia	61
4.4.1	Krisis Ekonomi 1965-1967.....	61
4.4.2	Krisis 1997 -1998.....	62
4.4.3	Krisis Subprime (2007-2009)	64

Bab 5 Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

5.1	Pendahuluan.....	65
5.2	Konsep Kemiskinan	66
5.2.1	Pengertian Kemiskinan	66
5.2.2	Ciri-Ciri Kemiskinan.....	68
5.3	Penyebab dan Dampak Kemiskinan	69
5.3.1	Penyebab Kemiskinan.....	69
5.3.2	Jenis-Jenis Kemiskinan	71
5.3.3	Perangkap dan Lingkaran Kemiskinan.....	72
5.4	Mengukur Kemiskinan	73
5.4.1	Ukuran Kemiskinan Menurut Bank Dunia.....	73
5.4.2	Ukuran Kemiskinan Menurut BPS	74
5.5	Kemiskinan di Indonesia dan Beberapa Negara Berkembang.....	75

5.5.1 Sejarah Perjuangan Mengatasi Kemiskinan	75
5.5.2 Kondisi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020	77
5.6 Kesenjangan Pendapatan	79
5.6.1 Pengertian Kesenjangan Pendapatan	79
5.6.2 Penyebab Kesenjangan Pendapatan	80
5.6.3 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan	81

Bab 6 Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Utang Luar Negeri

6.1 Pendahuluan	85
6.2 Kebijakan Fiskal	86
6.2.1 Kebijakan Fiskal Ekspansif	87
6.2.2 Kebijakan Fiskal Kontraktif.....	88
6.2.3 Mekanisme Kebijakan Fiskal	89
6.2.4 Krisis Ekonomi Global.....	90
6.3 Kebijakan Moneter	91
6.3.1 Kebijakan Moneter Ekspansif	92
6.3.2 Kebijakan Moneter Kontraktif.....	92
6.3.3 Instrumen Kebijakan Moneter	92
6.3.4 Peran Bank Sentral	94
6.4 Utang Luar Negeri.....	96
6.4.1 Definisi	96
6.4.2 Penggunaan Utang Luar Negeri	97
6.4.3 Penerbitan Utang Luar Negeri.....	98
6.4.4 Gagal Bayar dan Penyebabnya.....	99

Bab 7 Perusahaan Non Koperasi BUMS, BUMN dan BUMD

7.1 Pendahuluan	101
7.2 Eksistensi Perusahaan Non Koperasi/BUMS	103
7.3 Perkembangan BUMN dan BUMD	107
7.4 Peran BUMN dan BUMD Dalam Perekonomian	110
7.5 Tantangan dan Peluang BUMN dan BUMD	114

Bab 8 Ekonomi Koperasi

8.1 Pendahuluan.....	117
8.2 Pengertian	118
8.3 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi.....	120
8.3.1 Landasan.....	120
8.3.2 Asas Koperasi.....	120
8.3.3 Tujuan Koperasi.....	120

8.4 Prinsip-prinsip Koperasi.....	121
8.4.1 Prinsip Koperasi Rochdale.....	121
8.4.2 Prinsip Koperasi menurut ICA.....	122
8.4.3 Prinsip Koperasi Indonesia.....	123
8.5 Fungsi dan Peran Koperasi.....	124
8.5.1 Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial.....	125
8.5.2 Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial.....	126
8.6 Pengelompokan Sesuai Bidang Usaha Koperasi.....	126
8.7 Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi.....	127
8.7.1 Rapat Anggota.....	127
8.7.2 Pengurus Koperasi.....	127
8.7.3 Pengawas Koperasi.....	128
8.8 Arti Lambang Koperasi.....	128

Bab 9 Ekonomi Kreatif

9.1 Pendahuluan.....	131
9.2 Pengertian Ekonomi Kreatif.....	132
9.3 Kilas Ekonomi Kreatif.....	133
9.4 Ekonomi Kreatif Di Indonesia.....	134
9.5 Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Peningkatan Perekonomian Indonesia.....	136
9.5.1 Ekonomi Kreatif dan PDB.....	137
9.5.2 Ekonomi Kreatif dan Ketahanan Ekspor.....	140
9.5.3 Ekonomi Kreatif dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	141

Bab 10 Ekonomi Desa

10.1 Pendahuluan.....	143
10.2 Ruang Lingkup Desa.....	144
10.3 Pembangunan Desa.....	146
10.4 Pengalokasian Dana Desa.....	147
10.4.1 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa.....	148
10.4.2 Pengelolaan Dana Desa.....	148
10.4.3 Laporan Pertanggungjawaban.....	150
10.5 Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	150
10.6 Faktor penghambat Pembangunan Desa.....	153
10.7 Badan Usaha Milik Desa.....	154

Bab 11 Corporate Social Responsibility (CSR)

11.1 Pengertian CSR.....	157
11.2 CSR untuk Bisnis dan Masyarakat.....	161

11.3 CSR dan Doktrin Hubungan Bisnis	162
11.4 Model CSR di Indonesia.....	168
Bab 12 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	
12.1 Pendahuluan.....	171
12.2 Kronologis Pembentukan MEA.....	175
12.3 Harapan Indonesia Terhadap MEA	180
12.4 Hambatan dan Tantangan Menyikapi MEA	183
12.5 Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi MEA.....	185
Daftar Pustaka	189
Biodata Penulis	207

Daftar Gambar

Gambar 3.1: Aktivitas Gross Domestic Product di Indonesia	34
Gambar 3.2: Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	42
Gambar 3.3: Perubahan Struktur di Indonesia.....	49
Gambar 5.1: Lingkaran Perangkap Kemiskinan	72
Gambar 5.2: Persebaran kemiskinan di Indonesia, 2020	78
Gambar 5.3: Perkiraan Bank Dunia terkait Kemiskinan di Indonesia	78
Gambar 5.4: Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja	79
Gambar 5.5: Kurva Lorenz	83
Gambar 5.6: Kesenjangan Indonesia Relatif Rendah Berdasarkan Standard World Bank.....	83
Gambar.7.1: Perusahaan Swasta Nasional	106
Gambar.7.2: Nasionalisasi Perkebunan Tembakau Deli	107
Gambar.7.3: Kementerian BUMN Pada Tahun 1998	109
Gambar 7.4: BUMN Dalam Pembangunan Infrastruktur	111
Gambar 7.5: Pertumbuhan Keuntungan BUMN.....	112
Gambar 7.6: Diagnosis Organisasi	116
Gambar 8.1: Logo Koperasi Indonesia	129
Gambar 9.1: Gelombang Pergeseran Orientasi Ekonomi.....	134
Gambar 9.2: PDB atas dasar harga berlaku, PDB atas dasar harga konstan, dan Laju pertumbuhan PDB Indonesia 2014-2016	138
Gambar 9.3: PDB Ekonomi Kreatif dan Non-Ekonomi Kreatif atas dasar harga konstan tahun 2014-2016	138
Gambar 9.4: PDB Ekonomi Kreatif dan Non-Ekonomi Kreatif atas dasar harga konstan menurut sektor tahun 2016	139
Gambar 9.5: Struktur Perekonomian Indonesia tahun 2014-2016	140
Gambar 9.6: Perkembangan Nilai Ekspor Ekraf dan Ekspor Total	140
Gambar 9.7: Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif ..	141
Gambar 10.1: Model Pemberdayaan Masyarakat	151
Gambar 11.1: Piramida Tanggung Jawab Sosial	159
Gambar 11.2: Peprspektif CSR	165

Daftar Tabel

Tabel 4.1: Tipe-tipe krisis ekonomi beserta jalur-jalur transmisinya dan indikator-indikator utamanya	56
Tabel 4.2: Bantuan IMF terhadap Beberapa Negara Asia (US\$ miliar)	59
Tabel 5.1: Penyebab Kemiskinan	70
Tabel 5.2: Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin, 1970-2010	76
Tabel 5.3: Patokan Nilai Indeks Gini (Gini Ratio).....	82
Tabel 8.1: Arti Logo Koperasi Indonesia.....	129

Bab 1

Sistem Ekonomi Indonesia

1.1 Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Gilarso (1992), menyampaikan bahwa sistem ekonomi adalah seluruh tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi maupun investasi yang membentuk suatu kesatuan utuh yang teratur dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sedangkan menurut McEachern (2001) sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi.

1.2 Fungsi Sistem Ekonomi

Sebuah sistem tentunya memiliki fungsi untuk mengatur. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah:

1. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi.
2. Mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian.
3. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan.

Konsumen, produsen, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah beberapa contoh dari perangkat ekonomi. Sistem ekonomi pada dasarnya memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

1. Mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian.
2. Menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan sesuai harapan.
4. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan baik.

1.3 Jenis-Jenis Sistem Ekonomi

Masing-masing negara memiliki landasan yang berbeda-beda dalam menentukan sistem ekonomi. Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi:

1.3.1 Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sistem ekonomi tradisional kegiatan ekonomi masih menggunakan tradisi turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat dan telah menjadi nilai budaya setempat. Kegiatan produksi dalam sistem perekonomian tradisional dilakukan secara bergotong-royong dan bersifat kekeluargaan.

Sardiman (2006) menyatakan ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan produksi umumnya mengolah tanah dan mengumpulkan benda yang disediakan alam
2. Alat produksi masih sederhana
3. Sangat tergantung pada alam
4. Hasil produksi untuk kebutuhan minimal dan bersifat homogen
5. Hasil industri berupa hasil kerajinan tangan
6. Belum mengenal tukar menukar secara kredit

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan :

1. Kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup bukan untuk mencari keuntungan.
2. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong.
3. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata.
4. Tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya.
5. Pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah.

Kekurangan :

1. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam.
2. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang.
3. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat.
4. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah.

5. Sebuah erubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang.

1.3.2 Sistem Ekonomi Terpusat

Sistem ekonomi terpusat adalah suatu sistem yang mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).

Sardiman (2006) menyatakan ciri-ciri sistem ekonomi terpusat sebagai berikut:

1. Seluruh sumber daya dikuasai oleh Negara
2. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
3. Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat
4. Hak milik individu tidak diakui

Sistem ekonomi terpusat memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan:

1. Dapat mengurangi pengangguran karen apemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi
2. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara dapat terjaga dan stabil
3. Adanya jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan
5. Inflasi mudah dikendalikan
6. Kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar.

Kekurangan:

1. Mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat.
2. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi.
3. Poin satu dan dua akan menghambat inovasi dari masyarakat.

1.3.3 Sistem Ekonomi Liberal

Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)

Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Sardiman (2006) menyatakan ciri-ciri sistem ekonomi liberal sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan terhadap hak individu
2. Setiap manusia adalah homo economicus
3. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
4. Menerapkan sistem persaingan bebas
5. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
6. Peranan modal sangat penting
7. Peranan pemerintah dibatasi

Kelebihan :

1. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
2. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
3. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
4. Kualitas barang lebih terjamin

Kekurangan :

1. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
2. Rentan terhadap krisis ekonomi

3. Menimbulkan monopoli
4. Adanya eksploitasi

1.3.4 Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.

Ciri-ciri :

1. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
2. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
3. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
4. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah

Kelebihan :

1. Kestabilan ekonomi terjamin
2. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil
3. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu

Kekurangan :

1. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta
2. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta

1.4 Sistem Ekonomi di Indonesia

Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia.

Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang :

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

3. Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian pancasila. Maka, secara normatif pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bab 2

Sejarah Ekonomi Indonesia

2.1 Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan jumlah lautan 7,9 jt km² dan daratan 1,9 jt km² tentunya memiliki implikasi terhadap ekonomi seperti pentingnya laut sebagai penghubung antar pulau dan sumberdaya alam dan variasi ekonomi antar daerah yang besar. Belum lagi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun harus diakui Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan seperti: Kekurangan Capital (invite Foreign Investor & foreign debt), struktur ekonominya masih primary sector based, industrialisasi yang lamban, menganut sistem ekonomi campuran, adanya dualisme ekonomi (pre-capitalist and capitalist/socialist) dan perekonomian dikuasai unit-unit usaha besar (managed by conglomerates). Masalah kependudukan juga belum teratasi secara optimal seperti: Jumlah penduduk yg besar, laju pertumbuhan penduduk tinggi, penyebaran penduduk yg tidak merata, pengangguran dan kemiskinan, kualitas dan produktivitas yg rendah. Semua itu menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi agar optimalisasi ekonomi dapat tercapai dengan memanfaatkan yang menjadi kelebihan dan meminimalisasi dan meningkatkan berbagai kelemahan yang ada.

2.2 Perekonomian Indonesia pada Masa Sebelum Kemerdekaan

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki wilayah nusantara yang sekarang disebut Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak terlalu lama menjajah Indonesia karena harus terusir oleh Belanda, tetapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun telah menerapkan berbagai sistem ekonomi yang masih terasa sampai saat ini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka lakukan di Indonesia (Hindia Belanda saat itu).

2.2.1 Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Belanda yang pada saat itu menganut sistem Merkantilis dan menancapkan kukunya di Hindia Belanda. VOC menjadi perpanjangan tangan Belanda dan dilimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda, sebuah perusahaan yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menghindari persaingan antara sesama pedagang dari negeri Belanda, sekaligus bertujuan menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).

Untuk memudahkan aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

1. Hak mencetak uang
2. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. Hak menyatakan perang dan damai
4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Hak Octrooi ini seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Indonesia telah dikuasai VOC. Faktanya, sejak tahun 1620 VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor tertentu saja sesuai permintaan pasar di Eropa diantaranya rempah-rempah. Kota-kota perdagangan dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasai VOC adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi

tersebut. VOC juga belum membangun sistem rantai pasok kebutuhan hidup penduduk Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan VOC seperti *verplichte leverentie* (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC) dan *contingenten* (pajak hasil bumi) dibuat untuk mendukung monopoli. Selain itu VOC juga menjaga agar stabilitas harga rempah-rempah tetap tinggi, dengan cara pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi serta hak *extirpatie* (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua kebijakan itu pada umumnya hanya diberlakukan di Maluku yang sudah diisolasi oleh VOC dari sistem pelayaran niaga samudera Hindia.

2.2.2 Pendudukan Inggris (1811-1816)

Kedatangan Inggris merubah sistem pajak hasil bumi yang telah diterapkan oleh Belanda hamper dua abad, dengan menerapkan *Landrent* (pajak tanah). Sistem pajak hasil bumi ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles memprediksi sistem ini juga akan berhasil di Hindia Belanda. Dengan adanya *landrent*, penduduk pribumi akan memiliki anggaran untuk membeli produk Inggris atau yang diimpor dari luar nusantara seperti India. Inilah yang disebut *imperialisme modern* yang tidak hanya menjadikan tanah jajahan sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi sekaligus menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa mengemukakan hal-hal terkait *imperialism modern* tersebut, antara lain :

1. Adam Smith berpendapat bahwa pekerja produktif adalah pekerja yang menghasilkan barang dan dapat dinilai pasar, sedang pekerja tidak produktif pekerja yang menghasilkan jasa yang tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Inggris menginginkan wilayah jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar mampu membeli produk yang diproduksi di Inggris dan India yang pada saat itu mengalami surplus (melebihi permintaan).
2. Adam Smith berpendapat bahwa ekspor berperan memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh Inggris dan penduduk berperan dalam menyerap hasil produksi.

3. The quantity theory of money yang menyatakan bahwa naik turunnya harga dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, namun perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian sulit dilakukan, bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang hanya seumur jagung di Hindia Belanda.

Penyebabnya antara lain :

- a. Penduduk Hindia Belanda secara umum buta huruf dan tidak mengenal mata uang, apalagi untuk menghitung pajak dan luas tanah yang terkena pajak.
- b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris yang dipekerjakan di Hindia Belanda jumlahnya terlalu sedikit.
- c. Kebijakan ini tidak sepenuhnya didukung oleh raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tidak mengakui adanya jabatan secara turun-temurun.

2.2.3 Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)

Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh.

Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

1. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
2. Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

2.3 Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama

Pemerintahan Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno. Berkuasa dari tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada saat orde lama, pemerintahan Indonesia khususnya bidang ekonomi dapat dibagi menjadi 3, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil pun berbeda-beda.

2.3.1 Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan mulai dari inflasi yang tidak terkendali ditambah kas negara yang kosong karena tidak adanya pajak dan bea masuk menjadi salah satu penyebabnya.

Semua itu dilatarbelakangi oleh :

1. Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
2. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
3. peninggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
4. Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
5. Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.

6. Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut:

1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi. Inflasi tersebut dapat terjadi disebabkan karena :
 - (a) Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar)
 - (b) Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
 - (c) Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:
 - Mata uang De Javasche Bank.
 - Mata uang pemerintah Hindia Belanda.
 - Mata uang pendudukan Jepang
2. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda.
 - (a) Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945.
 - (b) Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:
 - Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

- Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
 - Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
 - Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.
- (c) Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah :
- Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
 - Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya
 - Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

3. Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Kebijakan Pemerintah sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden. Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.

Adapun kebijakan tersebut, antara lain:

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946. Salah satunya ke provinsi terkaya saat itu yaitu aceh.
2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan

- sejumlah obat-obatan kepada Indonesia), mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
 4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
 5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
 6. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
 7. Masa Liberal

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha
2. Pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP).

3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman).
4. Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi, sangat berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur colonial menjadi nasional).
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut (Kabinet Burhanuddin).
6. Gunting Syarifuddin. Kebijakan gunting syarifuddin adalah pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 keatas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan keuangan ini dilakukan pada masa pemerintahan RIS oleh menteri keuangan pada waktu itu Syarifuddin Prawiranegara.
7. Rencana Pembangunan Lima tahun (RPLT). Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Pada bulan Mei 1956, Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana Undang-Undang tentang rencana Pembangunan

ini disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan mencapai Rp. 12,5 miliar.

2.3.2 Masa Liberal (1950-1957)

Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

2.3.3 Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barangan naik 400%.
3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali

4. lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
5. Keberhasilan dan Kegagalan Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik dan keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan.

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial-politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model *guidance development* dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar *Growth with Distribution of Wealth* di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana).

Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.

Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :

1. Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (Masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang berakibat jatuh-bangunnya kabinet - tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

3. Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh. Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakat. Dalam usaha memasifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti
 - a. Berdikari di bidang ekonomi.
 - b. Berdaulat di bidang politik dan
 - c. Berkepribadian dalam budaya.
 - d. Penukaran Nilai Mata Uang Pada Masa Orde Lama.

Sistem kurs valuta asing ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran pasar serta berbagai cara pengaturan campuran pemerintah di bidang ini. Pola perilaku kurs tergantung pada system moneter yang berlaku. Pada masa orde lama berlaku system pengendalian ketat devisa dimana pemerintah menetapkan kurs jauh dibawah tingkat kurs menurut pasar bebas yang menimbulkan pasar bebas devisa. Pemerintahan Presiden RI-1 Soekarno memiliki kisaran nilai tukar Rp 1 per dolar.

2.4 Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

Sejak dikeluarkannya ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan, kabinet AMPERA menyusun kebijakan yang mengacu pada Tap MPRS tersebut sebagai berikut:

1. Mendobrak kemacetan ekonomi dengan cara memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
 - Penerimaan Negara yang rendah
 - Pengeluaran Negara yang tinggi dan tidak efisien
 - Ekspansi kredit bank yang terlalu banyak dan tidak produktif

- Banyaknya tunggakan hutang luar negeri dan penggunaan devisa impor yang kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyelamatan tersebut adalah:
- Mengadakan operasi pajak: Teknik pemungutan pajak bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Menurut Emil Salim, Soeharto menerapkan tatacara militer dalam rangka menangani permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia dengan cara mencanangkan sasaran yang tegas.
 - Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, Soeharto berhasil memperoleh bantuan pinjaman dari negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.
 - Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian yang dibuka lebar. Namun inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi terbuka ini, Soeharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Pemerintahan orde baru pada awalnya harus berhadapan pada kehancuran ekonomi secara besar-besaran, hal ini ditunjukkan dengan inflasi tahun 1966 mencapai 650% serta defisit APBN lebih besar dari jumlah penerimaan. Neraca pembayaran luar negeri juga mengalami defisit yang sangat besar, nilai tukar rupiah terhadap dollar tidak stabil. Awal pemerintahan orde baru ini juga dapat dikatakan sebagai titik balik ekonomi Indonesia. Pemerintah saat itu harus berusaha keras untuk membangkitkan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk (Resosudarmo and Kuncoro, 2006). Oleh sebab itu maka pada tahun 1966-1968 dijadikan memontum sebagai tahun rehabilitasi ekonomi. Segala jenis upaya dilakukan mulai dari menurunkan tingkat inflasi sampai stabilisasi harga. Keberhasilan menstabilkan inflasi berdampak positif terhadap stabilitas politik saat itu. Kondisi ini berimplikasi terhadap bantuan luar negeri yang mulai masuk ke Indonesia dengan adanya IGGI (Resosudarmo and

Kuncoro, 2006). Sehingga sejak tahun 1969, Indonesia memulai menata perekonomian secara lebih terarah dan berfokus pada prioritas pembangunan. Sehingga dirancanglah Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dikenal saat itu sebagai REPELITA.

Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA:

Repelita I (1 April 1969 hingga 31 Maret 1974)

- Titik Berat Repelita I: Karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian maka pembangunan pada bidang pertanian menjadi focus pengembangan dengan tujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui bidang pertanian.
- Sasaran Repelita I: Pangan, sandang, perbaikan sarana dan prasarana, perumahan rakyat, perluasan kesempatan kerja, dan kesejahteraan rohani.
- Tujuan Repelita I: Meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus sebagai dasar tahapan pembangunan berikutnya.
- Terjadinya peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) pada tanggal 15-16 Januari 1947 dalam rangka protes kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Protes ini terkait kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut agar Jepang tidak mendominasi ekonomi di Indonesia melalui produk barang Jepang yang terlalu banyak beredar di Indonesia.

Repelita II (1 April 1974 hingga 31 Maret 1979)

- Titik Berat Repelita II: Masih fokus pada sektor pertanian namun dalam rangka meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan tetap meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan selanjutnya.
- Sasaran Repelita II: pangan, sandang, perumahan rakyat, sarana dan prasarana, kesejahteraan rakyat dan peningkatan kesempatan kerja.
- Tujuan Repelita II: Meningkatkan pembangunan diluar pulau Jawa, Bali dan Madura, salah satunya melalui program transmigrasi.

Pelaksanaan Pelita II dinilai berhasil yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada saat awal pemerintahan Orde Baru tingkat inflasi mencapai 60% namun pada akhir Pelita I tingkat inflasi turun menjadi 47%. Pada tahun keempat Pelita II tingkat inflasi bahkan turun menjadi 9,5%.

Repelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984)

- Titik Berat Repelita III: Masih fokus sektor pertanian dengan tujuan swasembada pangan serta meningkatkan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.
- Sasaran Repelita III: Penekanan pada bidang industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor. Pertumbuhan perekonomian pada repelita ke II terhambat oleh resesi dunia yang terjadi. Terjadinya penurunan harga minyak dunia juga berdampak pada perekonomian Indonesia pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Menghadapi resesi ekonomi dunia, pemerintah mengarahkan usahanya dalam rangka peningkatan penerimaan pemerintah, baik dari peningkatan ekspor maupun sumber-sumber pajak dalam negeri.

Repelita IV (1 April 1984 hingga 31 Maret 1989)

- Titik Berat Repelita IV: Masih berfokus dan berlanjut pada sektor pertanian khususnya melanjutkan upaya menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang mampu menghasilkan mesin-mesin industri sendiri seperti industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
- Tujuan Repelita IV: Menciptakan lapangan kerja dan industry baru.
- Terjadi resesi dunia pada awal tahun 1980 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal yang bertujuan menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi.

Repelita V (1 April 1989 hingga 31 Maret 1994)

- Titik Berat Repelita V: Lebih Menekankan pada bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan. Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap berorientasi pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ketercapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling terkait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat.
- Tujuan dari Repelita V: sesuai dengan Garis-garis besar haluan Negara (GBHN) tahun 1988: Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang semakin merata dan adil; kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Repelita VI (1 April 1994 hingga 31 Maret 1999.)

- Titik berat Repelita VI: masih berfokus pada pembangunan pada sektor ekonomi yang terkait dengan industri dan pertanian serta pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai daya dukungnya.
- Tujuan dari Repelita VI: Perekonomian dipandang sebagai pendorong utama pembangunan. Pembangunan nasional Indonesia dari pelita ke pelita akan terus mengalami peningkatan dan keberhasilan pembangunan.
- Pada periode ini kembali terjadi krisis moneter yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Akibat dari krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri berdampak pada terganggunya perekonomian yang menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, slogan “Politik sebagai Panglima” berubah menjadi “Ekonomi sebagai Panglima”. Pada masa

orde baru, pembangunan ekonomi menjadi prioritas, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan Soeharto yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Kepemimpinan pada era Soeharto juga berbanding terbalik dengan kepemimpinan pada era Soekarno. Jika Soekarno cenderung memiliki kebijakan menutup diri dari negara-negara barat, Soeharto malah sebaliknya, berusaha menarik modal dari negara-negara barat. Perekonomian Indonesia pada masa Soeharto ditandai dengan terjadinya perbaikan di berbagai bidang dan pengiriman utusan pemerintah untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman dari negara-negara barat dan juga IMF (Resosudarmo and Kuncoro, 2006). Bantuan pinjaman asing ini sangat berarti dalam rangka stabilitas harga melalui injeksi barang impor ke pasar. Orde Baru berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan dukungan dari Negara-negara kapitalis asing maupun dari masyarakat bisnis internasional, yakni para banker dan perusahaan-perusahaan multinasional. Zaman Orde Baru cenderung berorientasi membuka investor luar dalam membangun ekonomi. Langkah Soeharto dalam rangka penyehatan ekonomi dibagi menjadi tiga tahap: Pertama, tahap penyelamatan ekonomi yang tujuannya mencegah kemerosotan ekonomi tidak menjadi lebih buruk lagi; Kedua, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, dengan cara pengendalian inflasi dan perbaikan infrastruktur ekonomi; Ketiga, pembangunan ekonomi. Indonesia berusaha mempererat hubungan dengan Negara lain melalui berbagai kerjasama, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional, khususnya PBB, dan penyelesaian konflik dengan Malaysia. Pada awalnya bantuan asing tidak mudah didapat karena merasa kecewa dengan pemerintahan Soekarno, namun dengan berbagai usaha dan pendekatan yang dilakukan, akhirnya dana asing tersebut dapat diterima Indonesia. Ekonomi Indonesia mulai bangkit dan akhirnya menjadi begitu kuat, namun kekuatan ekonomi itu diperoleh dari bantuan asing yang harus dikembalikan (Indrawati, 2002). Berbagai bantuan dari Amerika Serikat maupun Jepang sangat berpengaruh dalam perbaikan ekonomi di Indonesia, begitu juga dengan bantuan IMF yang dinilai sangat bermanfaat dalam memperjuangkan Indonesia di hadapan para kreditor asing (Indrawati, 2002).

Namun, bantuan tersebut tidak secara langsung membuat Indonesia tumbuh dengan prestasi ekonomi yang baik, Indonesia ternyata semakin terjerat keterpurukan perekonomian dalam negeri sebagai dampak dari syarat-syarat dan bunga yang telah direncanakan negara penyuntik bantuan. Gagalnya industri dalam negeri di pasar global dan menurunnya nilai rupiah menjadi warisan terpuruknya ekonomi pada masa Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Inilah yang menjadi tantangan pemerintahan

reformasi untuk menuntaskan permasalahan ekonomi dalam negeri (Resosudarmo and Kuncoro, 2006).

2.5 Perekonomian Indonesia Pada Masa Reformasi

2.5.1 Presiden B.J.Habibie

Krisis ekonomi yang dikenal dengan krisis moneter pada tahun 1998 menjadi titik awal berakhirnya masa orde baru dan dimulailah masa reformasi (Resosudarmo and Kuncoro, 2006). Krisis di Thailand menjadi pemicu krisis di dunia khususnya di asia tenggara. Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami kemerosotan hebat sebagai dampak dari para investor asing mengambil keputusan jual. Aksi jual ini karena para investor asing tidak lagi percaya terhadap prospek perekonomian negara tersebut, setidaknya untuk jangka pendek. Pemerintahan Thailand kemudian meminta bantuan IMF untuk pemulihan ekonomi. Pengumuman itu mendepresiasi nilai tukar baht sekitar 15% - 20% dan mencapai nilai terendah, yaitu sekitar 28,20 baht per dolar AS. Apa yang terjadi di Thailand kemudian merambat masuk ke Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya. Nilai tukar Rupiah di Indonesia mulai melemah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp2.500,- menjadi Rp2.950,- per dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai menurun terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah, yakni Rp2.682,- per dolar AS dan akhirnya ditutup Rp2.655,- per dolar AS. Sekitar bulan Januari-Februari1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar sempat menembus Rp11.000,- per dolar AS dan akhirnya pada bulan Maret nilai rupiah mencapai Rp10.550 untuk satu dolar AS (Resosudarmo and Kuncoro, 2006). Seluruh kejadian ekonomi tersebut berujung pada lengsernya pemerintahan Soeharto dan berakhirilah masa orde baru, berganti dengan kepemimpinan era reformasi yang dimulai dengan kepemimpinan presiden habibie.

Hal-hal yang dilakukan oleh presiden Habibie dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Merekapitulasi seluruh perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus pada urusan perekonomian. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :
 - Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
 - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - Mengatur dan mengawasi Bank
2. Melikuidasi bank-bank bermasalah.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Banyaknya utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank yang bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu masih rapuh (Dee, 2009).

3. Meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika selama lima bulan pertama tahun 1998 dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata menembus angka Rp9.200,- dan selanjutnya turun menjadi sekitar Rp8.000,- pada bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah melonjak di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sejak bulan Mei 1998 berhubungan dengan kondisi sosial politik yang terjadi. Nilai tukar rupiah menguat hingga Rp6.500,- per dollar AS di akhir masa pemerintahan presiden Habibie (Dee, 2009).
4. Mengimplementasikan reformasi pada bidang ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF (Hakim, 2012).

2.5.2 Presiden Abdurahman wahid

Dibandingkan dengan tahun kepemimpinan presiden sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada kondisi yang lebih baik, di antaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi yang stabil dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi sector moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Hubungan antara pemerintahan di bawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik yang disebabkan masalah seperti Amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang masih terus tertunda (Hakim, 2012).

Kondisi perpolitikan dan sosial yang tidak stabil dan semakin parah berdampak enggan nya investor asing menanamkan modal di Indonesia. Semakin rumit nya masalah ekonomi diindikasikan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan menurun hingga 300 poin, disebabkan lebih banyaknya kegiatan penjualan dibandingkan kegiatan pembelian dalam perdagangan saham BEJ di dalam negeri. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, belum ada tindakan yang cukup signifikan untuk menyelamatkan ekonomi negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai masalah ekonomi yang diwariskan orde baru harus diselesaikan, diantaranya masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan kondisi ekonomi, peningkatan kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan menjaga kurs rupiah. Pada saat itu presiden Gusdur diindikasikan terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat (Hakim, 2012).

2.5.3 Presiden Megawati Soekarnoputri

Pada masa kebijakan presiden Megawati, Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi diantaranya:

1. Menegosiasikan penundaan pembayaran utang Negara sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 serta mengalokasikan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar Rp116,3 triliun.
2. Melakukan Kebijakan privatisasi BUMN yang terkesan kontroversial. Privatisasi adalah cara yang ditempuh dengan menjual perusahaan-perusahaan negara pada periode krisis dengan tujuan

melindungi perusahaan negara tersebut dari intervensi kekuatan-kekuatan politik sekaligus mengurangi beban negara. Hasil penjualan perusahaan negara tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 4,1%. Tetapi kebijakan privatisasi tersebut memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dibeli oleh perusahaan asing.

3. Pada masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), namun belum ada gebrakan konkrit yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal banyaknya korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali ketika ingin menanamkan modal di Indonesia, dan berdampak pada terganggunya jalannya pembangunan nasional (Resosudarmo and Kuncoro, 2006).

2.5.4 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan yang dilakukan adalah dengan mengurangi subsidi Bahan Bahan Minyak (BBM) sehingga terjadi kenaikan harga BBM, subsidi ini kemudian disubsitisi dengan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) pada penduduk miskin namun bantuan tersebut dihentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, Selain itu pengurangan subsidi BBM juga disubsitisi pada kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan sarana pendidikan yang ada di Indonesia (Dee, 2009). Namun pada pemerintahan SBY khususnya dalam perekonomian Indonesia masih ada masalah yang besar terkait kasus bank century yang sampai saat ini masih belum selesai bahkan sampai harus menggelontorkan anggaran biaya mencapai Rp 93 miliar dalam penyelesaian kasus bank century tersebut. Kondisi ekonomi pada masa pemerintahan presiden SBY sesungguhnya mengalami perkembangan yang sangat baik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat di tahun 2010 sejalan dengan pulihnya ekonomi dunia pasca krisis global yang telah terjadi disepanjang tahun 2008 hingga 2009. Bank Indonesia (BI) memprediksi terjadinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai level 5,5%-6% pada 2010 dan terus meningkat mencapai 6%-6,5% pada 2011. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut, prospek ekonomi Indonesia akan

lebih baik dari prediksi semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan berbagai sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor sector non-migas Indonesia khususnya pada triwulan IV – 2009 mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi yakni mencapai sekitar 17% dan masih terus berlanjut pada Januari 2010 (Resosudarmo and Kuncoro, 2006). Salah satu pendorong utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang efektif dan berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan disiplin pengurangan dalam konteks utang negara. Masalah-masalah besar lain dalam ekonomi tentunya pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat tidak diiringi dengan pemerataan sehingga masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun Jakarta sebagai ibukota identik dengan vitalitas ekonomi yang tinggi ditambah kota-kota besar lain di Indonesia yang juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, namun masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan (Resosudarmo and Kuncoro, 2006).

Bab 3

Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi

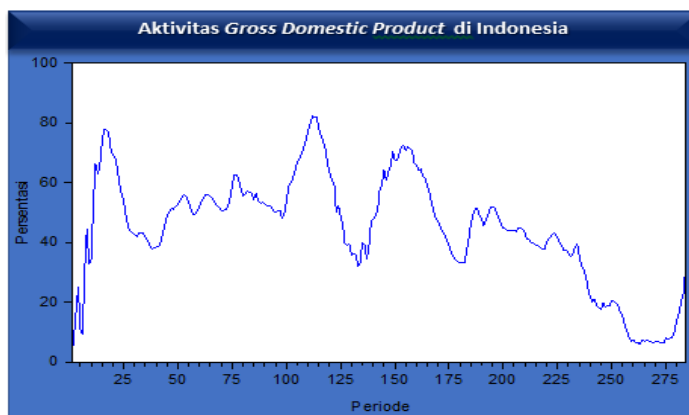
3.1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran akhir bagi setiap negara, ukuran tersebut dapat diketahui melalui aktivitas kinerja perekonomian negara tersebut, pertumbuhan ekonomi terjadi manakala terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui nilai tambah dari pendapatan terus meningkat pada periode tertentu. Pengukuran pertumbuhan ekonomi terus mengalami pengembangan metode yang dilakukan oleh para ahli, di mana pemikiran mereka berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pada negara berkembang.

Proses pengembangannya bermula pada pemikiran kaum Mahzab Klasik, di mana kelemahan pada teori Mahzab Klasik menjadi ide pemikiran Mahzab Neo Klasik dan Modern untuk disempurnakan menjadi pemikiran yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan zaman maka teori perkembangan ini masih terus dapat dikembangkan karena dasar dari teori pertumbuhan ini tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh teori-teori dibidang sosial lainnya yang juga terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi ini memiliki dimensi yang lebih kompleks melalui perubahan struktur ekonomi negara secara keseluruhan. Perubahan struktur ekonomi merupakan hakikat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan proses transformasi yang berjalan dari waktu ke waktu. Titik tolak proses transformasi tersebut dapat terjadi melalui landasan kegiatan ekonomi serta tata laksana ekonomi masyarakat suatu negara. Hal ini bertujuan untuk merubah perilaku dan cara berfikir masyarakat yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat output perkapita suatu negara. Unsur pengukuran ini diperoleh dengan perbandingan antara besaran total output (GDP/Gross Domestic Product) / Product Domestic Bruto (PDB) dengan banyaknya jumlah penduduk. Fungsi ini akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi melalui hubungan kedua alat ukur tersebut.

Pengukuran kualitas pertumbuhan Indonesia sangat berfluktuatif, terdapat tertentu terjadi peningkatan pertumbuhan, namun dikondisi lainnya terjadi penurunan pertumbuhan, di mana ketika pertumbuhan mengalami peningkatan maka hanya dapat menyerap 250 ribu tenaga kerja baru. Perubahan mendasar bagi Indonesia terhadap perkembangan perekonomiannya terjadi sejak tahun 1967, di mana Indonesia merubah sistim perekonomiannya menjadi perekonomian terbuka yang sebelum adalah perekonomian tertutup, namun hal ini masih belum menampakkan keberhasilan pertumbuhan yang maksimal, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Gambar 3.1: Aktivitas Gross Domestic Product di Indonesia (Bank Indonesia)

Aktivitas GDP pada awalnya merupakan strategi pengukuran pertumbuhan perekonomian dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara, di mana nantinya diharapkan akan memberikan efek pada semua lapisan dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan dan berbagai tujuan perekonomian lainnya. (Budiharsono, 1996, 5). Di masa sekarang, pemerintah menganggap bahwa pertumbuhan telah memberikan pengaruh positif ditandai dengan penyebaran pertumbuhan disetiap daerah yang semakin meningkat, sama seperti negara maju. Oleh karena itu pemerintah harus terus mengembangkan strategi yang baik dan maksimal agar setiap tujuan pertumbuhan ekonomi dapat terus tercapai secara berkesinambungan, karena setiap negara baik negara miskin, berkembang dan maju memiliki perbedaan dalam menyikapi pertumbuhan ekonominya, termasuk Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang yang terus berproses menjadi negara maju. (Todaro, 1998).

Beberapa Strategi di negara berkembang menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat, namun karena proses perkembangan terus berjalan sehingga masih ditemukan berbagai persoalan di masyarakat yang belum terselesaikan dengan baik, seperti pengangguran yang tidak terserap pada lapangan pekerjaan, adanya kesenjangan pada pembagian pendapatan negara, tingkat kesempatan pendidikan yang masih rendah dan tingkat kesehatan yang masih minim, sehingga akan menimbulkan kesenjangan antara yang miskin dan kaya, hal ini ditandai dengan pola semakin kayanya masyarakat yang kaya dan semakin miskinnya masyarakat yang miskin, sehingga strategi tersebut masih perlu untuk dikaji ulang agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Oleh karena itu peranan pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas perekonomian yang berkesinambungan, baik stabilitas dalam aspek makroekonomi maupun stabilitas dalam aspek mikroekonomi, karena dengan bekerjanya kedua aspek tersebut akan memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Sehingga pemerintah harus mengerti dan paham tentang penyebab terjadinya instabilitas pada aspek makro dan mikroekonomi, hubungan kedua aspek ini bermuara pada stabilitas keuangan, di mana aspek keuangan ini dalam keterkaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan, meski di negara berkembang seperti Indonesia kondisi belum kondusif, sehingga kondisi ini menjadi halangan

terbesar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, sekiranya tidak menjadi prioritas pemerintah dalam sektor ekonomi (Schumpeter, 1912).

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu kondisi transisi dari suatu periode yang kurang stabil ke kondisi perekonomian yang lebih baik, dikatakan terjadi pertumbuhan ketika kondisi tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, dengan tetap mengacu pada 3 aspek yaitu proses, output dan jangka waktu. Untuk dapat memahami hal tersebut berikut diutarakan beberapa pengertian tentang pertumbuhan, pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Klasik dan Pertumbuhan Ekonomi Modern.

3.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan GDP didasari oleh beberapa faktor ekonomi di mana dijelaskan oleh kaum Neo Klasik, bahwa pertumbuhan akan terjadi dengan mengukur secara kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal dan penyempurnaan teknologi (Todaro dan Smith, 2008). Teori pertumbuhan yang didefinisikan oleh Mankiw, Romer dan Weil dilakukan dengan menambahkan jumlah modal, yang mana sumber tersebut berasal dari perkembangan modal, dan tenaga kerja agar hasil pertumbuhan akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya (Mankiw, Romer dan Weil, 2006).

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi terjadinya peningkatan output perkapita dalam jangka panjang, yang elemen pengukuran pertumbuhan ini terdiri dari adanya proses perubahan, perubahan output, dan jangka waktu. Pertumbuhan ekonomi ini berjalan untuk waktu yang tidak singkat, sehingga untuk melihat hasil akhir pertumbuhan ini dapat diketahui melalui aktivitas yang dinamis dari pertumbuhan yang berubah di setiap waktu (Budiono, 1992). Pertumbuhan ekonomi adalah proses pencapaian keberhasilan suatu negara dalam menuju kondisi ekonomi lebih baik dan secara berkelanjutan dalam satu waktu ukuran tertentu. Pertumbuhan ekonomi mengandung arti bahwa telah terjadi peningkatan kapasitas produksi melalui kenaikan pendapatan nasional (Sisilia Kosuma, 2016).

Pertumbuhan Ekonomi adalah usaha suatu negara yang mengakibatkan perekonomian mengalami peningkatan melalui hasil produksi barang dan jasa,

sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan secara terus menerus (Untoro 2010). Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan kapasitas produksi suatu negara yang terus berlanjut dalam periode yang lama, sehingga segala kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi (Sukirno 2006).

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas perekonomian negara yang terjadi dalam periode yang panjang, yang bekerja dalam mencapai tujuannya agar semua kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Permintaan akan kebutuhan ekonomi tersebut berguna untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan menggunakan perangkat teknologi dalam berbagai kondisi yang terjadi, sehingga pertumbuhan perekonomian dapat terus terjadi (Todaro, 2000).

3.2.2 Pengukuran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya harus diukur dengan metode dan alat ukur yang sesuai, dalam hal ini dapat digunakan GDP di mana fungsi tersebut akan menghitung jumlah barang dan jasa pada harga pasar untuk periode yang panjang dari suatu negara dan biasanya dihitung dalam jangka waktu satu tahun (Mankiw 2006). GDP merupakan alat untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dilakukan dengan menilai barang dan jasa dari dalam negeri sebagai hasil akhir suatu produksi, baik yang menggunakan faktor produksi dalam negeri maupun luar negeri. Di mana hasil tersebut akan menjadi pembanding dengan jumlah penduduk untuk mengetahui terjadinya pertumbuhan suatu negara, atau yang sering disebut dengan pendapatan perkapita (Chenery, 1979).

GDP adalah alat untuk mendeteksi hasil barang dan jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan sumberdaya di negara tersebut, di mana pengukurannya dapat dilakukan setiap tahunnya. GDP dapat pula berfungsi sebagai alat deteksi perekonomian setiap periode, dan pembanding dengan perekonomian lainnya pada saat tertentu (Rudrigger, 2006). GDP merupakan perhitungan output barang dan jasa yang merupakan bagian dari pendapatan total dan pengeluaran total secara nasional dalam waktu tertentu. Ukuran ini menjadi bagian yang menandakan adanya peningkatan kinerja perekonomian, dengan standar kinerja diukur melalui peningkatan GDP tersebut (Arsyad, 2004).

GDP menjadi standar pengukuran pertumbuhan perekonomian secara makro melalui perubahan setiap aktivitas GDP dalam suatu negara, perubahan aktivitas tersebut akan menandakan laju pertumbuhan ekonominya di mana setiap laju pertumbuhannya didasarkan dengan teknik pengukuran dari dasar harga konstan pada perekonomian (Todaro dan Smith 2008)

GDP dijadikan sebagai suatu alat ukur pertumbuhan suatu negara karena GDP ini memiliki beberapa faktor penting pertumbuhan ekonomi antara lain pertama perhitungan dari barang dan jasa berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian suatu negara, sehingga peningkatan GDP ini merupakan balas jasa antara faktor produksi dan proses produksi dalam penciptaan barang dan jasa tersebut, kedua GDP dihitung berdasarkan aliran siklus perekonomian hal ini tercermin melalui periode yang digunakan, sehingga akan memudahkan untuk melakukan perhitungan GDP dengan membandingkan antara GDP tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, ketiga skala perhitungan GDP menggunakan aktivitas suatu negara, sehingga GDP ini akan mencerminkan secara mendalam dan lebih luas untuk mengukur efektivitas kebijakan yang dijalankan agar dapat meningkatkan aktivitas perekonomian suatu negara. (Arifin dan Gina, 2009 : 11).

GDP dalam pengukuran pertumbuhan perekonomian menggunakan beberapa metode, pengukuran ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kekurangan suatu negara, metode yang dimaksud antara lain pertama Metode Sederhana, metode ini merupakan teknik perhitungan pertumbuhan ekonomi yang paling simpel, karena menghitung dalam periode setahun, sehingga kelemahan metode ini karena tidak dapat menghitung pertumbuhan ekonomi untuk jangka waktu yang cukup panjang, adapun untuk mengukur periode yang panjang dilakukan dengan cara merata-ratakan tingkat pertumbuhan tersebut, kedua Metode *End To End*, yang merupakan teknik pengukuran untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi untuk periode jangka panjang, di mana pengukuran dilakukan dengan membandingkan periode sekarang terhadap periode sebelumnya kemudian dijadikan persen, ketiga Metode Regresi, metode ini menggambarkan besaran efisiensi yang dihasilkan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi selama jangka waktu perhitungan yang diinginkan, sehingga pengukuran dengan menggunakan analisis regresi dengan model semi-log akan memberikan hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Sukirno 2006).

3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik dicetuskan oleh pemikir-pemikir ekonomi di abad ke 18 sampai memasuki abad ke 20, di mana teori ini menyerahkan sepenuhnya pada efektivitas mekanisme pasar bebas, Pertumbuhan ekonomi digambarkan oleh kaum klasik diakibatkan oleh adanya faktor meningkatnya *output* total dan terjadinya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi yang maksimal terjadi ketika semua faktor-faktor produksi digunakan dengan sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen dengan sebaik mungkin pemikiran ini disponsori oleh Adam Smith, David Ricardo, W.A. Lewis, Maltus, dan John Stuart Mill (Sukirno, 2006).

Teori pertumbuhan yang diungkapkan oleh Adam Smith, menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui proses kerja secara berturut dimulai masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan masa perindustrian. Tahapan-tahapan ini akan dilalui setiap negara, dan proses perubahannya merupakan bagian dari struktur masyarakat yang beralih dari sektor tradisional menjadi masyarakat modern yang kapitalis. Adam Smith menegaskan tentang pertumbuhan sektor ekonomi, kondisi ini memfokuskan pada tenaga kerja yang menanggap bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi, sehingga Adam Smith menganjurkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja yang dibekali keterampilan dan teknologi agar dapat meningkatkan produksi, disamping itu modal merupakan pemicu penggerak perekonomian, di mana modal tersebut merupakan investasi yang diperoleh dari tabungan masyarakat untuk menopang sektor riil.

Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi secara simultan dan berkelanjutan. Kinerja yang efisien dan efektif pada sektor perekonomian mempercepat peningkatan investasi dan teknologi yang dapat memengaruhi penyebaran di pasar perekonomian. Terdapat sistematika perbedaan tujuan pertumbuhan ekonomi menghadapi berbagai permasalahan salah satunya adalah keterbatasan sumber daya alam, dan ketika permasalahan ini terjadi maka perlambatan pertumbuhan ekonomi akan menjadi penghalang karena aktivitas ekonomi berjalan dengan cepat, sementara ketersediaan bahan alam mengalami keterbatasan. Sehingga laju pertumbuhan melambat, dan hal ini perlu untuk diantisipasi oleh setiap negara.

Disisi lain pertumbuhan ekonomi menurut kaum Neo Klasik merupakan bagian dari pengembangan pemikiran kaum Klasik, di mana kaum Neo Klasik mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan

dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi, karena perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal dipergunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu, pemikiran ini disponsori oleh Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade.

Pertumbuhan ekonomi bagi kaum Klasik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah penduduk yang akan menunjukkan adanya penambahan jumlah tenaga kerja untuk beberapa periode mendatang, jumlah barang modal merupakan bentuk investasi yang digunakan pada tanah, peralatan fisik, modal dan sumber daya manusia, luas tanah yang merupakan fasilitas untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, kekayaan alam terkait dengan segala manfaat alam yang dapat dipergunakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang menggambarkan penyerapan teknologi pada perkembangan suatu negara (Todaro, 1991).

Tekanan yang diberikan oleh kaum ini cenderung dititik beratkan pada penambahan penduduk dalam kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk dikaitkan dengan besaran GDP atau pendapatan perkapita akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Teori Penduduk Optimal). Pendekatan yang dilakukan dalam pengukuran ini adalah cenderung melihat bahwa ketika penduduk berjumlah, sedikit maka tingkat pendapatan perkapita akan meningkat, dan ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan tentunya pendapatan perkapita akan menurun karena hasil pendapatan akan mengalami kondisi serupa sehingga akan memberikan pengaruh pada jumlah produksi marginal yang menurun, dan pendapatan perkapita akan menyesuaikan dengan perubahan produksi secara marginal. Elemen lainnya yang berupa luas tanah, kekayaan alam dan teknologi tidak memberikan dampak yang signifikan, dan cenderung statis, sehingga bagi kaum Klasik hal ini tidak memberikan pengaruh pada perubahan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

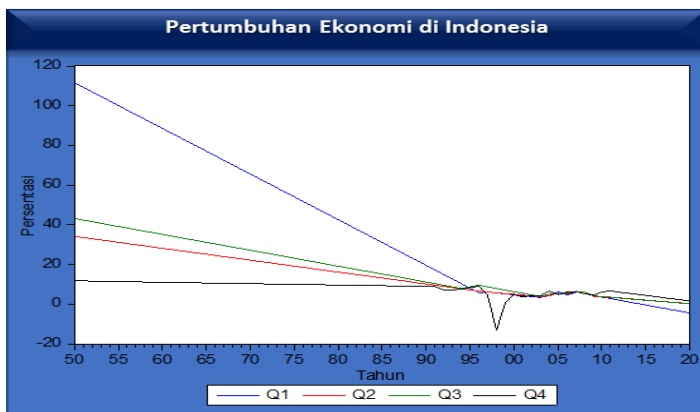
3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan ekonomi modern memiliki identitas umum yang memandang bahwa proses aktivitas perekonomian memerlukan kebijakan pemerintah dalam mengatur bekerjanya pasar bebas. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran kaum Klasik terhadap pertumbuhan ekonomi. Harrod Domar merupakan kelompok pemikir pertumbuhan ekonomi modern, ide dasar dari teori pertumbuhan modern Harrod Domar berasal dari

pengembangan teori makro Keynes jangka pendek, kemudian Harrod Domar memodifikasi teori tersebut dengan mengukur pertumbuhan secara jangka panjang, kesamaan pemikiran mereka terletak pada variabel pengukuran investasi, yang menganggap bahwa investasi dapat memberikan pengaruh pada permintaan dan penawaran agregat melalui kapasitas produksi, sehingga akan menambah stok kapital masyarakat dan tentunya akan meningkatkan kemampuan dalam menciptakan output (Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, 2008).

Harrod Domar menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi perubahan pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka pengembangan investasi dalam berbentuk tabungan dari pendapatan nasional dapat menjadi cadangan dalam mengantisipasi terhadap barang-barang modal yang harus diganti, investasi baru merupakan tambahan netto atas cadangan modal sebagai upaya untuk meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi negara.

Implikasi perkembangan teori modern di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan dalam pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti gejolak perubahan kurs rupiah yang mengakibatkan terjadinya krisis keuangan di tahun 1998, ini terjadi karena landasan keuangan dan ekonomi yang cukup rendah, ditambah lagi dengan kondisi politik, sosial dan keamanan yang tidak kunjung membaik, bahkan hingga saat ini, kondisi ini menuntut agar fundamental ekonomi harus lebih kuat untuk dapat menopang pertumbuhan nasional, meski perubahan tersebut berjalan berangsur-angsur namun terlihat perbaikan belum signifikan, semua ini terlihat dari beberapa indikator antara lain laju tingkat inflasi mengalami perbaikan, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan mengarah ke arah positif, meski kondisi tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai cadangan devisa negara semakin meningkat dikarenakan ekspor dan pinjaman luar negeri meningkat, kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat impor yang cenderung masih tinggi, disertai dengan kondisi sektor perbankan dan sektor riil, industri manufaktur yang masih mengalami guncangan, kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2: Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Bank Indonesia)

Lambatnya perubahan ekonomi terjadi karena tidak didukung oleh kestabilan politik, keamanan, sosial dan hukum yang terus terjadi dan tidak terselesaikan dengan tuntas, karena faktor tersebut mengakibatkan risiko yang dialami negara menjadi pertimbangan bagi pebisnis nasional dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia.

Predikat Risk Country bagi Indonesia pada saat itu terjadi karena tidak dapat diprediksinya konflik politik dan sosial dikalangan elit politik bahkan sampai pada semua lapisan kepentingan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di Indonesia, hal ini menjadi penting untuk berinvestasi di Indonesia, sementara untuk meningkatkan pertumbuhan suatu negara harus ditunjang dengan meningkatnya investasi khususnya investasi modal asing yang masuk di Indonesia. Besarnya investasi penanaman modal asing akan menjadikan tingkat pertumbuhan perekonomian meningkat pesat, apalagi disektor-sektor potensial seperti industri manufaktur, pertanian dan pariwisata yang nantinya akan menjadi devisa negara, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tidak langsung.

Dasar Risk Country ini menjadikan Indonesia mengalami penurunan tingkat investasi asing yang terjadi di awal krisis keuangan, nilainya yang positif kemudian berangsur menjadi negatif. Pengaruh lainnya adalah terjadinya capital flow akibat krisis ekonomi disertai dengan krisis politik di Indonesia, sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga semakin sulit. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangat tergantung dengan potensi perdagangan dan perekonomian dunia, karena dalam sektor tersebut terdapat

nilai ekspor maupun investasi yang menunjang pertumbuhan perekonomian. Hubungan ini menjadi tali-temali antara satu negara dengan negara lainnya, di mana ketika terjadi suatu gejolak perekonomian di suatu negara maka akan berimbas kepada negara rekanannya atau mitra perdagangannya. Sebagai negara terbuka Indonesia memiliki mitra perdangan seperti Amerika, Jepang, Australia, Eropa dan beberapa negara lainnya, hubungan tersebut berupa perdagangan, investasi, pinjaman dan bantuan luar negeri, sehingga dampak yang akan diterima oleh Indonesia ketika salah satu negara mitranya mengalami permasalahan ekonomi, maka Indonesia memerlukan waktu yang panjang untuk memperbaiki perekonomiannya.

Proses perbaikan ekonomi negara yang dilanda krisis pada tahun 1997 itu memerlukan perjuangan yang berat, karena hal tersebut memerlukan waktu yang lama sehingga fluktuasi perekonomian mengalami pasang surut, hal ini dirasakan oleh beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Korea Selatan, Thailand, dan Filipina, karena terjadi pemuliharaan sektor perbankan dan meningkatnya utang pemerintah negara tersebut, serta menurunnya tingkat ekspor di Amerika membuat negara-negara tersebut menjadi sulit untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya, imbas dari semua risiko yang dihadapi negara-negara tersebut membuat Indonesia menjadi sulit untuk mengirimkan ekspor maupun impor ke negara yang mengalami kesulitan perekonomian, sehingga Indonesia sulit untuk dapat menambah pendapatannya dari segi ekspor maupun impor.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu ditandai dengan fluktuasi keuangan di beberapa periode yang menandakan penyerapan output kepada masyarakat tergolong rendah, hal ini dikarenakan terdapat aspek-aspek perekonomian yang belum bekerja dengan baik seperti tenaga kerja, penduduk, pendidikan, inflasi dan ekspor netto (Sodik, 2007). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun secara eksternal, di mana keduanya memberikan dampak signifikan atas perubahan yang terjadi di Indonesia, faktor internal terdiri dari pengaruh ekonomi dan pengaruh nonekonomi (sosial, politik), dan faktor eksternal melalui faktor ekonomi seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia.

Pengaruh tersebut, dalam teori konserpatif menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk periode yang lama sangat ditunjang oleh aspek-aspek produksi antara lain sumber daya manusia, modal, teknologi, bahan baku, entrepreneurship dan energi (Tambunan, 2000).

3.3 Perubahan Struktur Ekonomi

Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang pesat mengakibatkan perubahan struktur perekonomian (transformasi ekonomi) pada suatu negara, kondisi ini menunjukkan pola pergantian dari sektor pertanian menjadi sektor industri, sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural ekonomi tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu setiap negara harus membenahi sektor-sektor ekonomi dengan baik agar tingkat kesejahteraan dapat tercapai (Syrquin, 1985).

Struktur perekonomian merupakan elemen-elemen penting yang berfungsi sebagai pengendali dalam mengatur jalannya perekonomian dalam suatu negara, di mana setiap komponennya memiliki aktivitas tersendiri terhadap proses perekonomian, komponen struktur ekonomi tersebut dapat berupa sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input (faktor produksi) dan pasar output (barang dan jasa). Pengaruh dari elemen-elemen tersebut menggambarkan keterikatan antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterikatan ini menunjukkan adanya hubungan, perilaku, saluran wewenang dan tanggungjawab pada perekonomian negara.

Transformasi ekonomi terjadi karena efek peningkatan GDP suatu negara perubahan ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern yang dinamis dengan tujuan agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, hal ini didasari oleh peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dengan cepat akan memberikan pengaruh positif pada peningkatan pendapatan penduduk per kapita, sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang berkecukupan atas tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi semakin banyak (Weiss, 1998).

Pentingnya perubahan struktur ekonomi menjadi jawaban terhadap keterbatasan pada sumber daya alam, sehingga sektor industri merupakan salah satu cara bagi negara untuk dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi dari faktor-faktor produksi tersebut, demikian pula dengan pemikiran para ekonom lainnya yang mengatakan bahwa dengan mengefisienkan penggunaan sumber daya, berarti pertumbuhan output untuk periode yang lama akan tetap bertahan (Kuncoro, 2010).

3.3.1 Pengertian Struktur Perekonomian

Pertumbuhan struktur ekonomi yang baik terdapat pada negara berkembang, hal ini karena kondisi negara tersebut dalam proses transformasi dari perekonomian tradisional menjadi perekonomian modern, yang pada prinsipnya teori ini banyak diulas langsung oleh 2 pakar pertumbuhan perekonomian yaitu pertama Arthur Lewis, yang cenderung memfokuskan pada pembangunan tradisional dan modern, dalam pola pemikirannya, perekonomian tradisional melambangkan aktivitas dalam sektor pertanian, sementara perekonomian modern melambangkan aktivitas dalam sektor industri, kedua sektor ini menjadi unsur utama dalam mendefinisikan tentang pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2000).

Arthur Lewis menggambarkan bahwa perekonomian tradisional memiliki pola pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga menciptakan over supply tenaga kerja, sehingga marjinal nilai produk dan tingkat upah menjadi rendah. Sementara perekonomian modern pola pertumbuhan penduduknya yang rendah dengan tingkat produktivitas yang tinggi sehingga perekonomian modern menjadi tempat yang tepat untuk menampung tenaga kerja dari pedesaan. Hollis Chenery dan Syrquin (1975) dikenal sebagai pendukung teori pendekatan struktural dalam teorinya tentang "pola-pola pembangunan" menjadi unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori pertumbuhan menurut mereka yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memiliki periode jangka panjang, akan memberikan pengaruh pada penciptaan output yang menjadikan proses pengurangan tenaga kerja menjadi lebih baik, demikian sebaliknya di mana akan terjadi peningkatan kontribusi pada perekonomian modern (Todaro dan Smith, 2001).

Pengembangan temuan yang dilakukan oleh Hollis Chenery dan Syrquin, didukung oleh temuan William H. Branson, Isabel Guerrero, Bernhard G. Gunter (1998) menggunakan sampel 98 negara yang menguji pergeseran struktur perekonomian suatu negara, mereka menemukan bahwa unsur paling utama yang memegang peranan penting dalam pergeseran struktur ekonomi ini adalah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk pada suatu negara. Kuznets dalam pemikirannya tentang perubahan struktur ekonomi menjelaskan bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dalam periode yang panjang, maka pola tersebut akan diikuti oleh perubahan struktur perekonomian, pandangan Kuznet terlihat bahwa perubahan struktur perekonomian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terhadap pertumbuhan ekonomi (Jhinghan, 2003).

Transformasi struktural merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi dan saling kait-mengait antara satu dengan yang lainnya melalui perubahan makroekonomi yang meliputi permintaan agregat (perdagangan luar negeri, ekspor dan import), dan penawaran agregat (produksi, dan tenaga kerja dan modal) yang akan menggambarkan terjadinya pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi secara terus menerus di suatu negara (Chenery, 1979). Perubahan struktural ekonomi dialami oleh negara-negara berkembang yang berfokus pada perubahan mekanisme transformasi, yang semula bergerak pada sektor tradisional beralih pada sektor perkonominian modern berupa sektor-sektor non primer (Tambunan, 2001).

Struktur ekonomi melambangkan ukuran dari masing-masing peranan sektor perkonominian (lapangan usaha, pembagian sektor) seperti sektor primer, sekunder dan tersier, dijelaskan lebih lanjut bahwa struktur ekonomi secara sektoral memiliki 3 dimensi pendekatan yaitu, pertama pendekatan menurut sumber pendapatan, kedua pendekatan menurut penggunaan pendapatan, dan ketiga pendekatan berdasarkan dual income system (Hirschman, 1958).

3.3.2 Pemikir-Pemikir Pada Struktur Ekonomi

Perubahan struktural difokuskan pada bentuk transformasi perekonomian yang terjadi di beberapa negara berkembang, di mana sektor tradisional merupakan titik utama pertumbuhan ekonomi kemudian bertransformasi menjadi sektor modern yang ditandai dengan berkembangnya sektor industri dan jasa. Transformasi ini melihat pemikiran yang dilakukan oleh beberapa penganut paham struktural perkonominian antara lain Arthur Lewis, Simon Kuznets dan Hollis Chenery.

Arthur Lewis

Teori yang dikemukakan oleh Arthur Lewis, dikenal dengan istilah Teori Migrasi (teori perekonomian model dua sektor) yang melihat bahwa terdapat surplus tenaga kerja pada dua sektor di suatu negara, lebih dalam Arthur menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara perekonomian tradisional dengan perekonomian modern, hal ini dikarenakan sektor modern memiliki konsep pembayaran dan investasi yang berbeda dengan tradisional sehingga mengakibatkan terjadinya tingkat urbanisasi yang besar. Konsep pemikiran Arthur ini berfokus ada pergeseran struktural yang bersifat subsistem.

Arthur ini mengasumsikan bahwa pertama terjadi kesinambungan antara mutasi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja di sektor modern, sehingga

akumulasi modal bergerak dengan cepat, hal ini didukung dengan peningkatan pertumbuhan akan mempercepat penciptaan lapangan pekerjaan, kedua sektor modern akan terjadi surplus tenaga kerja karena adanya urbanisasi, ketiga pertumbuhan di sektor modern akan memengaruhi tingkat pendapatan secara riil sehingga surplus tenaga kerja di sektor tradisional akan terserap oleh sektor perindustrian modern. Proses urbanisasi dijelaskan oleh Arthur terjadi secara bertahap sehingga pertumbuhan di sektor modern akan meningkatkan output di sektor modern sehingga memberikan dampak pada peningkatan laju pertumbuhan sektor industri (Todaro, 2001).

Simon Kuznets

Pemikiran yang diutarakan oleh Simon Kuznets ini melihat bahwa sektor tradisional merupakan sektor andalan yang menjadi penguatan ekonomi bagi negara-negara industri, di mana kontribusi sektor tradisional ini cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor industri dan jasa dalam pembangunan ekonomi. Perubahan zaman memberikan pengaruh pada perubahan perekonomian, di mana sektor penopang perekonomian yang dulunya hanya pada sektor tradisional mengalami perubahan karena telah beralih pada sektor industri dan jasa.

Kuznets meneliti besarnya investasi dari berbagai sektor terhadap produksi nasional dalam mencapai proses pembangunan ekonomi negara. Kuznets mengidentifikasi 13 negara maju antara lain Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang dan Rusia, dan menemukan bahwa pertama terjadi perlambatan pada sektor tradisional terhadap perkembangan produksi nasional, kedua tingkat pertambahan produksi sektor industri lebih cepat dari tingkat pertambahan produksi nasional dan ketiga terjadi kesamaan antara tingkat perkembangan produksi nasional dengan peranan sektor jasa yang tidak mengalami perubahan, selain itu penelitian juga terkait dengan persentasi penduduk yang bekerja disemua sektor perekonomian.

Kuznets menemukan bahwa terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rostow dan Karl Marx. Kuznets menjelaskan bahwa pertama keduanya memfokuskan pada sektor ekonomi terkait evolusi sosial, kedua menggali permasalahan dan konsekuensi dari pembagunan sosial, dan ketiga perubahan politik, sosial dan kebudayaan merupakan bentuk perubahan sistem ekonomi disuatu negara (Kuncoro, 1997).

Perbedaan pandangan antara Rostow dan Karl Marx ditemukan oleh Kuznet, antara lain pertama Marx melihat bahwa manusia membutuhkan berbagai kebutuhan ekonomi, sementara Rostow menganggap bahwa perubahan ekonomi merupakan motif ekonomi dan non ekonomi. Kedua Marx berpedoman pada sistem konflik antar golongan masyarakat kapitalis, sementara Rostow memandang simpel melalui interaksi antara masyarakat sosial, ketiga Marx memandang bahwa perubahan ekonomi merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh perubahan motif dan inspirasi dari penguasa sumber daya, sementara Rostow menganggap bahwa perubahan ekonomi merupakan konsistensi dari perubahan motif dan inspirasi non ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat (Kuncoro, 1997).

Kuznet menyatakan bahwa terjadinya transformasi struktural di negara maju memiliki kondisi yang hampir sama dengan negara lainnya, di mana GDP yang menurun pada sektor tradisional, fluktuasi di sektor industri, dan peningkatan di sektor jasa merupakan pertumbuhan GDP untuk negara maju yang memiliki periode yang panjang. Kuznet merincikan bahwa terdapat 6 karakteristik proses pertumbuhan ekonomi di negara maju antar lain pertama tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kedua tingkat kenaikan produktivitas faktor total tinggi, ketiga tingkat transformasi ekonomi yang tinggi, keempat tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, kelima kecenderungan negara mulai menambahkan bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku dan terakhir keenam terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi.

Hollis Chenery

Teori Hollis Chenery dikenal dengan sebutan transformasi struktural, yang melihat bahwa operasi penggerak pertumbuhan perekonomian terletak pada perubahan sektor tradisional menjadi sektor industri untuk negara berkembang. Tumbuhnya sektor industri beriringan dengan dengan peningkatan pendapatan perkapita terkait dengan akumulasi modal dan peningkatan sumber daya manusia. Chenery berfokus pada pertumbuhan industri dalam hubungan dengan produksi nasional (Sukirno, 2006).

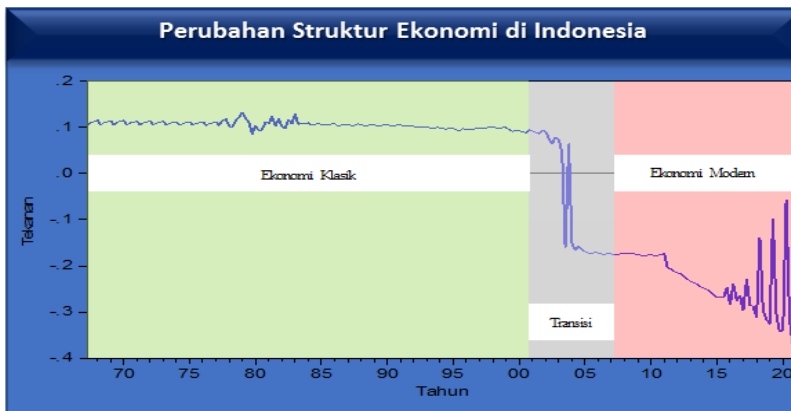
Chenery dan Syrquin (1975) mengemukakan bentuk-bentuk perubahan pada negara berkembang terdiri dari 3 kelompok antara lain pertama perubahan struktur ekonomi merupakan pembentuk modal, investasi, pengumpulan pendapatan, dan pendidikan masyarakat, kedua aloksi sumberdaya terkait perubahan permintaan domestik, struktur produksi dan struktur perdagangan

luar negeri, ketiga perubahan dalam proses demografi meliputi alokasi tenaga kerja, urbanisasi dan distribusi pendapatan.

Chenery menemukan terjadi perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, terkait dengan peranan tiap-tiap industri dalam subsektor pengolahan, perbedaan itu antara lain luasnya pasar, bentuk distribusi pendapatan, kekayaan alam dan perbedaan keadaan setiap negara. Analisis Chenery dan Syrquin terkait pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur di Indonesia menyatakan bahwa terdapat perubahan faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berdampak pada perubahan tingkat pendapatan perkapita di Indonesia.

3.3.3 Implikasi Pergeseran Struktur di Indonesia

Pergeseran struktur perekonomian setiap negara banyak dipengaruhi pada kultur transformasi perekonomian global, sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan domestik seperti yang terdapat pada Gambar 3.3. Pertumbuhan perekonomian setiap tahun selalu berubah-ubah, demikian pula terhadap perekonomian ditahun 2020, di mana ditahun ini Indonesia banyak mengalami guncangan salah satunya terjadinya Pandemi Covid-19 yang menjadikan perekonomian mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi penurunan ini terjadi karena rapuhnya kekuatan perekonomian meski mendapat pengaruh kuat melalui permintaan domestik yang tinggi dan stabilitas keuangan yang maksimal.



Gambar 3.3: Perubahan Struktur di Indonesia (Bank Indonesia)

Kondisi ini merupakan bentuk sinergitas lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang menghasilkan kebijakan yang efektif dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara. Proses transformasi terus bergulir dari waktu ke waktu dengan pengharapan bahwa perekonomian untuk jangka panjang akan memberikan titik terang, sehingga makna dari pergeseran struktur ekonomi di Indonesia semakin kuat, dengan semakin kuatnya struktur ekonomi, maka dengan sendirinya pendapatan perkapita akan terus meningkat, menciptakan stabilitas perekonomian dan sektor keuangan akan menjadi stabil.

Bentuk dari perubahan struktur ini, sering ditemukan tingkat prediksi pertumbuhan perekonomian yang terkadang meleset dari perkiraan, untuk kondisi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan, namun kendala tersebut menjadi sulit, karena hampir semua negara telah mengalami Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, mengakibatkan rusaknya semua sendi-sendi perekonomian di Indonesia. Meski dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 ini memberikan pengaruh pada kinerja keuangan dan pemerintah secara kuat dan berkesinambungan dengan tujuan agar transformasi struktur ekonomi melalui semua faktor-faktor produksi dapat menjadi bagian untuk menciptakan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi Indonesia yang kuat.

Proses transformasi struktur ekonomi ini menggunakan perangkat yang strategis berupa sinergi, transformasi dan inovasi agar tercipta proses pertumbuhan ekonomi yang menyatu dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Peranan ini bertanggungjawab untuk menentukan langkah-langkah terbaik dalam mengantisipasi gejala perubahan ekonomi global yang dapat merusak stabilitas dan ketahanan perekonomian di Indonesia. Proses pergeseran struktur ekonomi di Indonesia terjadi di tahun 2000, di mana semua sektor perekonomian mengadakan perencanaan strategi keuangannya dalam menghadapi perubahan perekonomian global, yang tentunya memberikan pengaruh bagi Indonesia sebagai negara berkembang sebagai negara terbuka yang memiliki hubungan terhadap beberapa negara di dunia sebagai rekanan bisnis internasional (Edwin Basmar, 2018).

Kesatuan kebijakan merupakan unsur utama dalam proses transformasi struktur ekonomi di Indonesia dengan kunci kesuksesan melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat, dengan tidak terlepas pada pengembangan inovasi di segala bidang ekonomi khususnya adalah keuangan yang menjadi komponen utama dalam menciptakan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Pergeseran perekonomian yang terjadi di Indonesia diakibatkan

oleh beberapa negara-negara secara global telah berfokus pada pertumbuhan domestik negaranya tersendiri, termasuk dengan hubungan ekonomi sesama negara dalam kaitannya tentang perdagangan.

Pergeseran terus berlanjut melalui pengaruh arus modal dunia yang kuat dan bergerak sangat cepat, mengakibatkan beberapa negara sulit untuk memprediksi volatilitas keuangan sehingga para investor merasa sulit untuk mengambil keputusan yang tepat akibat pergeseran tersebut. Pergeseran struktur ekonomi di era modern cenderung menggunakan teknologi/digitalisasi yang dapat merubah perilaku perekonomian dunia. Dari bentuk pergeseran ini menimbulkan berbagai persoalan baru yang kompleks, sehingga memberikan dampak pada aktivitas makroekonomi yang juga berubah dengan cepat, dan untuk pengantisipasi perubahan tersebut maka kebijakan terkait makroekonomi akan menjadi dampak pergeseran struktur ekonomi dunia dan di Indonesia, sehingga integritas kebijakan beberapa institusi menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mengantisipasi pergeseran struktur perekonomian Indonesia.

Semenjak tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 2.9 %, dan diprediksi bergerak terus ke bawah, karena adanya Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut diperparah dengan transaksi perdagangan serta nilai komoditas dunia yang menurun, tingkat ketidakpastian pasar keuangan dunia sulit diprediksi mengakibatkan terhambatnya perputaran keuangan sebagai modal investasi negara berkembang ikut terhambat. Mengantisipasi kondisi tersebut berbagai kebijakan dijelaskan salah satunya adalah stimulus fiskal dan moneter sebagai antisipasi pergerakan makroekonomi negara agar efek risiko perekonomian tidak membesar apalagi memberikan pengaruh pada elemen perekonomian lainnya.

Kebijakan yang dijalankan di negara maju dipengaruhi oleh Bank Sentral Amerika yang menurunkan tingkat suku bunga sebagai antisipasi terjadinya kerusakan global, hal ini membuat banyak kebijakan yang dilakukan oleh setiap negara untuk mempertahankan pertumbuhannya misalnya dengan mengambil langkah kebijakan struktural dan kebijakan silikal yang belum dapat diprediksi ketepatannya, karena siklus dunia yang juga terus mengalami perubahan. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami pasang surut melalui beberapa kejadian ekonomi yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, fluktuasi perlambatan, yang terjadi ditahun 2012 dipengaruhi oleh keterlambatan pergerakan ekonomi secara global, namun

kembali membaik di tahun 2015 yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan domestik.

Disektor riil peningkatan pertumbuhan investasi dikerenakan meningkatnya belanja pemerintah, dan investasi di sektor ekonomi lainnya yang juga mendorong pertumbuhan (otomotif dan konstruksi), tingginya penyerapan anggaran mengakibatkan konsumsi pemerintah menjadi maksimal, disektor rumah tangga faktor keyakinan konsumen juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga, gambaran ini menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi domestik masih memiliki ketahanan terhadap perlemahan perekonomian global. Sektor keuangan, menunjukkan kekuatan yang dapat mengantisipasi perubahan perekonomian global, sektor perbankan menunjukkan tingkat Non Performing Loan dan likuiditas masih dalam batas normal, tingkat profitabilitas keuangan masih cukup menjanjikan serta Capital Adequasi Ratio memadai.

Dalam menjalankan fungsi perbankan, penyaluran kredit mengalami penurunan karena tumbuhnya cuman 10,4 %, ini terjadi kontraksi permintaan dan penawaran kredit. Oleh karena itu peranan Bank Sentral melakukan relaksasi makroprudensial agar terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan kredit. Kondisi menandakan bahwa sektor perbankan memiliki ketahanan keuangan dalam menghadapi gejolak perubahan perekonomian global yang dapat berimbas pada perekonomian di Indonesia.

Kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan menemukan berbagai persoalan-persoalan yang cukup signifikan terhadap perubahan perekonomian, kompleksnya persoalan yang terjadi secara global di mana pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dalam kondisi lemah, sementara untuk kondisi perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh perekonomian Tiongkok yang juga melemah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlemahan yang terjadi baik perekonomian global maupun perekonomian nasional berpengaruh pada kinerja keuangan dipasar keuangan global, sehingga memengaruhi neraca transaksi modal dan finansial, kinerja keuangan Tiongkok menjadikan tekanan pada fluktuasi nilai tukar yang tentunya berpengaruh pada stabilitas kebijakan makroekonomi dan proses transformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kompleksitas persoalan yang terjadi secara global, regional dan struktural domestik tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat, struktur perekonomian Indonesia yang

bersandar pada perdagangan komoditas, serta tingginya nilai impor dibandingkan dengan ekspor Indonesia harus dapat diantisipasi guna mengatasi pertumbuhan ekonomi melambat, risiko lainnya dari sektor perbankan karena tingkat likuiditasnya akan menjadi bagian terpenting untuk diperhatikan karena sektor kredit akan terus mengalami peningkatan secara maksimal setelah terjadi penurunan permohonan kredit selama kondisi ekonomi belum stabil.

Berbagai persoalan tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga stabilitas makroekonomi dan sistim keuangan menjadi fokus utama yang perlu dipertahankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan transformasi perekonomian bertujuan agar tercipta pertumbuhan perekonomian layaknya negara maju di dunia.

Strategi Kebijakan transformasi yang ditempuh pemerintah Indonesia yaitu strategi dibidang pembangunan sumber daya manusia, berupa peningkatan skill dan pengalaman pengetahuan teknologi, pembangunan infastruktur, penyederhanaan penerbitan Undang-Undang Citra Kerja dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan, Penyederhanaan Birokrasi, kebijakan perubahan ketergantungan pada sumber daya alam menuju industri jasa dan manufaktur yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi, ini dilakukan oleh lembaga keuangan bertujuan agar dapat menciptakan trasformasi struktural yang berkelanjutan.

Perubahan struktur ekonomi negara dapat terjadi secara natural dengan melawati teknik perencanaan yang matang, peran serta kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan akan menjadikan tujuan dan sasaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi Indonesia akan menjadi jauh lebih baik.

Bab 4

Krisis Ekonomi

4.1 Pengertian Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan negaranya secara khusus dalam masalah keuangan. Masyarakat enggan menyimpan uang di bank sehingga bank kesulitan uang tunai. Bank sentral akan berusaha membantu semua bank dengan mencairkan aset. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan harga barang karena banyaknya uang tunai di masyarakat.

Krisis ekonomi global ialah suatu keadaan di mana semua lingkungan usaha ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan dapat berpengaruh terhadap lingkungan usaha lainnya diseluruh dunia. Krisis ekonomi di Amerika Serikat berdampak besar pada beberapa negara berkembang di Asia (Putri, 2016). Karena krisis ekonomi global Indonesia mengalami kesulitan dalam membayar hutang kepada negara lain karena setiap tahun bunga hutang semakin meningkat sedangkan pendapatan Indonesia tetap.

4.2 Tipe Krisis Ekonomi dan Jalur Transmisi Utama

Jika ditinjau berdasarkan proses terjadinya, krisis ekonomi memiliki dua sifat yang berbeda yaitu:

1. Krisis ekonomi yang secara tiba-tiba terjadi tanpa ada gejala sebelumnya yang biasa dikenal sebagai guncangan ekonomi tak terduga. Contohnya: pada tahun 1974 terjadi peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional yang sangat signifikan.
2. Krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak karena krisis melalui proses akumulasi yang cukup panjang contohnya krisis ekonomi global yang terjadi tahun 2008-2009.

Penyebab krisis ekonomi pada suatu negara dapat berasal dari dalam atau luar negeri tersebut. Penyebab krisis ekonomi dari dalam negara sebagai contoh gagal panen pada lingkungan usaha pertanian dikarenakan perubahan cuaca ekstrim yang tidak terduga. Penyebab dari luar negara contohnya krisis ekonomi global 2008-2009. Bagi negara pengekspor minyak ialah krisis minyak pertama pada tahun 1974 atau kedua pada tahun 1979. (Tambunan, 2015). Krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda juga mempunyai proses-proses atau jalur-jalur transmisi dari sumber-sumber yang berbeda juga (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1: Tipe-tipe krisis ekonomi beserta jalur-jalur transmisinya dan indikator-indikator utamanya (Tambunan, 2015)

Tipe Krisis Ekonomi	Jalur-Jalur Transmisi Utama	Indikator-Indikator Utama Untuk Memonitor Dampak
Krisis Produksi	Kesempatan Kerja Pendapatan Inflasi	Output menurut lingkungan usaha dan wilayah Kesempatan kerja menurut lingkungan usaha dan wilayah Pendapatan menurut lingkungan usaha dan wilayah

		Inflasi menurut wilayah Kemiskinan menurut wilayah
Krisis Perbankan	Kredit Suku bunga pinjaman Output Kesempatan kerja Pendapatan	Output menurut lingkungan usaha dan wilayah Kesempatan kerja menurut lingkungan usaha dan wilayah Pendapatan menurut lingkungan usaha dan wilayah Kemiskinan menurut wilayah
Krisis nilai tukar	Export Import Output Kesempatan kerja Pendapatan Inflasi	Ekspor menurut lingkungan usaha dan wilayah Impor menurut lingkungan usaha dan wilayah Output menurut lingkungan usaha dan wilayah Inflasi menurut wilayah Kesempatan kerja menurut lingkungan usaha dan wilayah Pendapatan menurut lingkungan usaha dan wilayah Kemiskinan menurut wilayah
Krisis ekspor	Output Kesempatan kerja Pendapatan	Ekspor menurut lingkungan usaha dan wilayah Output menurut lingkungan usaha dan wilayah Kesempatan kerja menurut lingkungan usaha dan wilayah Pendapatan menurut lingkungan usaha dan wilayah

		Kemiskinan menurut wilayah
Krisis impor	Output Kesempatan kerja Pendapatan Inflation	Output menurut lingkungan usaha dan wilayah Kesempatan kerja menurut lingkungan usaha dan wilayah Pendapatan menurut lingkungan usaha dan wilayah Kemiskinan menurut wilayah Inflasi menurut wilayah
Krisis modal	Output Nilai tukar Kesempatan Kerja Pendapatan Inflasi	Output menurut lingkungan usaha dan wilayah Kesempatan kerja menurut lingkungan usaha dan wilayah Pendapatan menurut lingkungan usaha dan wilayah Inflasi menurut wilayah Kemiskinan menurut wilayah

4.3 Pengalaman Krisis Ekonomi Asia

4.3.1 Faktor Penyebab

Deficit current account yang berkelanjutannya menjadi penyebab Krisis Asia. Banyaknya kegiatan ekspor-impor negara di Asia tenggara berdampak pesat terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia tenggara. Negara Asia tenggara sangat bergantung pada dana asing karena beberapa negara di Asia tenggara untuk membiayai pembangunan harus meminjam dari luar negeri. Sebelum terjadinya krisis Asia, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, dan Philippines banyak mendapatkan bantuan luar negeri karena ketertarikan untuk berinvestasi di negara-negara Asia tenggara tersebut. Regulasi ekonomi yang buruk merupakan faktor lain penyebab terjadinya krisis Asia 1997/1998. Pada

waktu itu para investor asing tidak memperhitungkan berbagai kebijakan ekonomi dan ketidakstabilan politik dari negara-negara Asia tenggara. Fixed exchange rate merupakan salah satu kebijakan yang dianggap cukup merugikan karena kebijakan ini sangat rentan terhadap spekulasi.

4.3.2 Dampak dan Proses

Pada tahun 1997/1998 krisis Asia Tenggara menjadi penyebab terjadinya krisis di Asia. Krisis asia berdampak buruk terhadap perekonomian Asia tenggara dan wilayah lain seperti Korea, Brazil, China dan juga Russia. Krisis ini juga menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk menghindari kerugian para investor asing memilih untuk menarik dananya lebih awal. Ketidakmampuan negara untuk melunasi utang luar negeri menimbulkan kondisi inflasi yang berlebih di mana nilai tukar mata uang negara-negara Asia Tenggara mengalami penurunan yang signifikan (devaluasi).

4.3.3 Respon Kebijakan

1. Bantuan IMF

Agar perekonomian di beberapa negara Asia tidak hancur karena spekulasi nilai tukar terhadap utang luar negeri yang jatuh tempo di akhir tahun 1997, pemerintah Thailand, Korea dan Indonesia meminta bantuan IMF dengan rincian pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2: Bantuan IMF terhadap Beberapa Negara Asia (US\$ miliar) ("Asian Meltdown", The Banker, December 1997)

Negara	IMF	Skema Bantuan		Total	Jumlah Penarikan
		Multilateral (Kerjasama dengan WB & ADB)	Bilateral (bantuan individual negara lain)		
Indonesia	9,9	8,0	18,7	36,6	4,0
Korea	20,9	14,0	23,3	58,2	17,0
Thailand	3,9	2,7	10,5	17,1	2,8
Total	34,7	24,7	52,5	111,9	23,8

2. Kebijakan Fiskal

IMF menyarankan Thailand untuk untuk menata kembali perbankan dengan cara mengurangi kekurangan anggaran bantuan sosial. Sementara untuk Indonesia, IMF menyarankan Indonesia untuk menunda proyek prasarana, penyesuaian pembebasan pajak pertambahan nilai dan menghapus subsidi harga bahan bakar minyak serta tarif dasar listrik agar kekurangan anggaran dapat berkurang sebesar 1-2% produk domestik bruto.

3. Kebijakan Moneter

Tekanan terhadap nilai tukar berdampak pada meningkatnya suku bunga di negara-negara Asia. Hong Kong menerapkan pola kebijakan dengan meningkatkan suku bunga secara signifikan dan berkelanjutan. Peningkatan suku bunga hingga 25% selama tiga bulan bertujuan untuk mempertahankan nilai tukar mata uang terhadap dollar AS dalam menghadapi penurunan harga aset.

4.3.4 Hasil Kebijakan

Indonesia, Thailand dan beberapa negara Asia berhasil menekan kekurangan anggarannya hingga 1-3% produk domestik bruto. Korea dalam hal kebijakan moneter gagal meningkatkan suku bunga secara signifikan. Peningkatan suku bunga yang tinggi di beberapa negara lainnya di Asia kecuali di Hong Kong tidak serta merta menguatkan nilai tukar uang tersebut.

4.3.5 Pelajaran yang dapat dipetik

Hal yang dapat dipelajari dari pengalaman krisis ini ialah

1. Penguatan arsitektur sistem moneter internasional;
2. Peningkatan ketahanan ekonomi kawasan;
3. Peningkatan peran ASEAN;
4. Standar sistem keuangan global;
5. Pajak universal atau adanya sistem berbasis biaya dalam transaksi mata uang.

4.4 Pengalaman Krisis Ekonomi Indonesia

4.4.1 Krisis Ekonomi 1965-1967

Setelah Indonesia merdeka ekonomi Indonesia mengalami perubahan yaitu dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung menyebabkan penurunan produksi. Konflik politik yang berkepanjangan, pemberontakan di berbagai daerah, keamanan dan perekonomian yang tidak stabil dapat memperburuk kondisi ini. Minsky mengelompokkan sinyal krisis ekonomi menjadi empat, yaitu guncangan awal, mekanisme umpan balik positif, sumber pendanaan, dan guncangan negatif. Minsky dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2012) mengelompokkan krisis 1965 – 1967 sebagai berikut.

Guncangan awal:

- Struktur ekonomi setelah Indonesia merdeka berubah dari ekonomi kolonial menjadi nasional;
- Konflik politik yang berkelanjutan dan terlihat dari penggantian kabinet yang terlalu sering;
- Beberapa wilayah melakukan pemberontakan sebagai contoh Sumatera dan Sulawesi;
- Rendahnya produksi di lingkungan usaha industri manufaktur dan pertanian
- Adanya pembangunan proyek mercusuar.
- Mekanisme umpan balik positif:
- Nasionalisasi beberapa perusahaan asing;
- Pertumbuhan industri kecil meskipun belum maksimal;
- Sumber pendanaan:
- Pembiayaan pembangunan proyek mercusuar dan pembiayaan penumpasan pemberontakan dilakukan dengan mencetak uang.

Guncangan negatif:

- Peningkatan jumlah uang beredar yang pesat yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi berakibat pada peningkatan inflasi sekitar 650%.

4.4.2 Krisis 1997 -1998

Pemerintah mengubah arah perekonomian dari lingkungan usaha migas ke lingkungan usaha non migas karena gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga minyak bumi yang sulit untuk diprediksi dan harga minyak bumi di pasar dunia yang mengalami penurunan. Sehingga pemerintah memberikan kemudahan di bidang industrialisasi dan kemudahan membuka bank baru, selain itu pemerintah juga memberikan ijin kepada bank asing untuk beroperasi di Jakarta, pemerintah juga menghapus batas kredit, dan memberikan izin kepada investor asing untuk memiliki saham domestik. Kebijakan ini menyebabkan utang swasta berjangka pendek maupun jangka panjang mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan mekanisme pengawasan di lingkungan usaha perbankan menjadi tidak efektif dan tidak dapat mengikuti pertumbuhan lingkungan usaha perbankan yang pesat sehingga banyak industri bank yang menjadi tidak sehat. Minsky dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2012) mengelompokkan krisis 1997-1998 sebagai berikut.

Guncangan awal:

- Besarnya jumlah utang jangka pendek luar negeri swasta.
- Pesatnya pertumbuhan lingkungan usaha perbankan karena kebijakan menghapuskan pembatasan dan peraturan lingkungan usaha perbankan dan pemerintah telah membuka akses pasar modal bagi investor asing.
- Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan perbankan menyebabkan banyak industri bank yang menjadi tidak sehat.
- Berkembangnya isu pemerintahan mengenai masalah ekonomi hal ini dikarenakan ketidakjelasan arah perubahan politik.
- Dampak krisis ekonomi yang diperburuk oleh memanasnya situasi politik.

Mekanisme umpan balik positif:

- Industri perbankan di Indonesia dan investasi asing bertumbuh secara cepat;
- Peningkatan ekspor non migas, kinerja pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh masuknya arus modal asing;
- Perusahaan swasta Indonesia mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman. Hal ini dikarenakan investor asing merasa optimis terhadap keberhasilan perekonomian Indonesia.

Sumber pendanaan:

- Peningkatan investasi asing yang signifikan dalam bentuk investasi portfolio, investasi langsung, dan utang swasta jangka pendek yang terjadi.

Guncangan negatif:

- Nilai rupiah dan capital outflow yang mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan di Korea, Thailand, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Nasabah yang mengambil dana sebanyak-banyaknya semakin memperburuk kondisi ini karena neraca industri perbankan swasta nasional menjadi terganggu sehingga beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga harus ditutup/meger.
- Di awal tahun 1998 rupiah mengalami kemerosotan hingga menyentuh harga Rp 16000/US\$.
- Situasi politik yang terus memanas berakibat pada peningkatan harga,
- Kegiatan ekonomi terganggu karena pendapatan perusahaan dan kegiatan ekspor menurun. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebanyak 13,1%.

4.4.3 Krisis Subprime (2007-2009)

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami kontraksi sebesar 0.34% dan hal ini disebabkan oleh krisis Subprime Mortgage. Pada

tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terus mengalami penurunan sebanyak 3.07%. Indonesia turut merasakan imbas dari krisis keuangan ini. Minsky dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2012) mengelompokkan krisis 2007-2009 sebagai berikut.

Guncangan awal:

- Penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh krisis keuangan di beberapa negara di Eropa dan Amerika.
- Kesulitan bank untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih yang dialami oleh beberapa lembaga keuangan di Eropa dan Amerika Serikat.
- Mekanisme umpan balik positif:
- Arus masuk modal asing jangka pendek ke dalam negeri mengalami peningkatan.
- Peningkatan cadangan devisa.
- Sumber pendanaan:
- Peningkatan investasi jangka pendek di pasar modal dan saham.

Guncangan negatif:

- Pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang dan ekspor mengalami penurunan. Hal ini berimbas pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009 Indonesia masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,6% jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang mengalami kontraksi. Penyebab hal ini ialah kontribusi perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi sebanyak lebih dari 50% produk domestik bruto. Meskipun demikian pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bab 5

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

5.1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di banyak negara sedang berkembang sering sekali tidak memberikan manfaat dalam pemecahan persoalan kemiskinan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai telah gagal mengurangi jumlah kemiskinan absolut, artinya pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi ternyata tidak otomatis mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat banyak, seperti yang disampaikan para ahli dengan proses “trickle-down effect” yang tidak membuahkan manfaat bagi penduduk miskin.

Persoalan sebenarnya tentu saja ada dua, yakni: bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kondisi ekonominya ada di bawah garis kemiskinan, dan bagaimana mempersempit perbedaan pendapatan antar penduduk atau antar wilayah. Keberhasilan dari kedua hal ini terlihat dari penurunan persentase kemiskinan dalam suatu wilayah dan laju peningkatan pendapatan penduduk miskin lebih cepat dibandingkan laju penambahan pendapatan golongan kaya (Permana, 2016).

Kemiskinan adalah suatu keadaan nyata di masyarakat yang timbul akibat ketidakmampuan, perbedaan kesempatan serta perbedaan dalam sumber daya

yang dimiliki. Kemiskinan tidak dapat dihapuskan, namun bukan berarti menjadi pembiaran yang menimbulkan banyak permasalahan termasuk kejahatan sosial di masyarakat.

Pertanyaan yang sering sekali muncul adalah mengapa kemiskinan sulit untuk dikurangi bahkan dihapuskan dari dunia ini. Ada banyak elemen masyarakat, pemerintah, pemerhati kemanusiaan serta lembaga internasional memberikan program penyelesaian masalah kemiskinan. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah memahami konsep dari kemiskinan itu sendiri, yang sejalan dengan perkembangan zaman, konsep itu pun juga berkembang. Lalu apa sebenarnya kemiskinan dan mengapa kemiskinan selalu menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh masyarakat, tokoh agama, ahli ekonomi, dan para pembuat kebijakan. Lalu bagaimana mengukur kemiskinan, serta bagaimana perkembangan kemiskinan di Indonesia dan di belahan dunia lain, serta apa kebijakan yang telah dan dapat dilakukan untuk mengatasinya. Keseluruhan pertanyaan tersebut akan dijawab dalam bab ini (Maipita, 2014).

5.2 Konsep Kemiskinan

5.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kata kemiskinan dalam bahasa Inggris adalah poverty atau poor berasal dari bahasa Latin, yakni “pauper” yang berarti miskin atau melahirkan ketiadaan, yang dulu ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki lahan pertanian yang produktif atau ternak. Ada banyak definisi tentang kemiskinan menurut cara pandangnya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa kemiskinan adalah kondisi memiliki sumber daya atau pendapatan yang tidak mencukupi. Dalam bentuk paling esktrim, kemiskinan adalah kurangnya kebutuhan dasar manusia yang menopang efisiensi kerja, seperti makanan yang bergizi, pakaian yang memadai, perumahan, air bersih dan ketersediaan layanan kesehatan (Addae-korankye, 2014).

Kemiskinan umumnya didefinisikan yakni bagaimana seorang individu berada lebih rendah dari tingkat standar minimal yang mampu dimiliki oleh penduduk. Kemiskinan juga dapat dinyatakan sebagai ketidakmampuan dalam membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini adalah makanan, pakaian, obat-obatan serta tempat tinggal (Niemiets, 2011).

Pengertian kemiskinan dapat dijelaskan tergantung pada pihak mana yang bertanya, bagaimana kemiskinan tersebut dipahami dan siapa yang akan memberikan respon, sehingga pandangan ini mengelompokkan makna dari kemiskinan itu sendiri menjadi empat kelompok, antara lain:

1. Kelompok pemikir yang memandang kemiskinan dari segi pendapatan atau *income-poverty*, walaupun pada prakteknya kelompok ini sering mengukur dari segi pengeluaran.
2. Kelompok pemikir yang mengukur kemiskinan dari kekurangan materi yang dimiliki. Konsep ini dibangun dengan lebih luas, di mana selain kekurangan pendapatan, kemiskinan juga dapat diartikan kurangnya kekayaan, memiliki aset yang kualitasnya rendah serta ketidakmampuan mendapatkan akses pada kesehatan dan pendidikan
3. Kelompok pemikir ketiga yang mengacu pada pendapat Amartya Sen, bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan termasuk di dalamnya kurangnya material, ketidakmampuan fisik, serta dimensi sosial.
4. Kelompok pemikir yang menjelaskan makna kemiskinan sebagai ketidakmampuan multidimensi (Maipita, 2014).

Bank Dunia memberikan definisi kemiskinan sebagai seseorang yang kekurangan dalam kesejahteraan baik dari banyak dimensi. Keadaan ini termasuk pendapatan yang rendah serta tidak mempunya orang tersebut dalam mendapatkan kebutuhan dasar dan fasilitas layanan yang diperlukan agar bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan meliputi pula rendahnya tingkat pendidikan serta kesehatan, serta akses masyarakat miskin terhadap sanitasi dan air bersih, tidak memadainya keamanan fisik, suara dan kapasitas kurang memadai, serta sulitnya memperoleh kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) turut memberikan definisi tentang kemiskinan yakni kondisi di mana seorang individu atau kelompok masyarakat, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan serta meningkatkan hidup yang lebih memiliki martabat (Nurmalita and Suryandari, 2017). Kemiskinan dapat digolongkan dalam dua jenis, antara lain: fakir dan miskin. Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki pendapatan dikarenakan menganggur yang mengakibatkan kebutuhan hidupnya tidak mampu dipenuhi, sedangkan orang

miskin merupakan individu yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya hanya mampu memenuhi sebagian (50%-70%) kebutuhannya. Berdasarkan penjelasan tersebut orang fakir merupakan orang miskin dengan derajat yang paling rendah, sedangkan orang miskin merupakan seseorang atau sekelompok orang yang kehidupan ekonominya berada di bawah garis rata-rata kehidupan masyarakatnya (Al-Ghazi, 2005).

Mengacu pada undang-undang No.13 tahun 2011, kata fakir dan miskin sebenarnya hampir tidak berbeda, fakir miskin merupakan seroang individu yang memang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tetap tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarga yang ditanggungnya. Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat mempunyai tanggung jawab terhadap kemiskinan yang telah menjadi amanah dalam UUD 1945, yang terdapat dalam Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” (Rustanto, 2015).

5.2.2 Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan sendiri memiliki ciri-ciri dimensi ekonomi yang berarti tidak memiliki harta, atau tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan dasar serta terkait dimensi sosial yakni tidak memiliki akses dalam ruang publik maupun akses mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang masuk kategori miskin:

1. Rendahnya pendapatan yang dimiliki bahkan ada yang tidak memiliki pendapatan.
2. Tidak mempunyai pekerjaan yang menetap
3. Rendahnya pendidikan atau bahkan tidak berpendidikan
4. Tidak mempunyai tempat tinggal
5. Standar gizi minimal tidak mampu terpenuhi (R., 2009)
6. Karena cacat fisik atau mental serta sakit sehingga tidak mampu berusaha.
7. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
8. Sangat rentan pada guncangan sosial
9. Tidak mendapatkan akses untuk layanan kesehatan
10. Tidak memiliki jaminan akan masa depan (Rustanto, 2015).

5.3 Penyebab dan Dampak Kemiskinan

5.3.1 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dalam suatu wilayah dapat dikarenakan:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap orang dan yang mampu pertama sekali memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri. Bila seseorang tidak mampu memenuhi standar minimum dalam suatu pendidikan atau pendidikan yang ditempuhnya tergolong rendah, hal ini akan mengakibatkan individu tersebut dinilai kurang terampil, tidak berwawasan, dan pengetahuan yang dimiliki sangat rendah.

2. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan

Dengan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, penduduk miskin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena melalui pekerjaan mereka mendapatkan upah atau gaji yang bisa mereka gunakan untuk membeli kebutuhan dasar mereka. Keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan menjadi konsekuensi baru, artinya seandainya seseorang ingin membuka lapangan usaha baru, tetapi kemungkinan yang ada kecil karena keterbatasan modal dan keterampilan. Dan bila diamati dengan baik, banyaknya pengangguran di suatu negara dapat menjadi cerminan atau ukuran tingkat kemiskinan di negara itu. Bila pengangguran di negara tersebut tinggi, maka kemiskinan juga akan bertambah di negara tersebut, dan akhirnya akan mendatangkan ketidakstabilan ekonomi, serta tingginya angka kriminalitas.

3. Malas Bekerja

Hal yang paling dasar penyebab kemiskinan adalah sifat malas, di mana sifat ini yang paling sering menjangkit setiap individu. Sikap seseorang yang merasa tidak memiliki apapun yang ingin dikejar, menghasilkan sikap santai dan tidak ingin maju. Mereka kecenderungan berasumsi bahwa kemiskinan merupakan takdir mereka, sehingga bersikap tidak acuh pada pekerjaan dan tidak bergairah.

4. Kehidupan Keluarga yang Menjadi Beban

Penyebab lainnya adalah masalah beban hidup keluarga, yang sangat signifikan mengakibatkan seseorang menjadi miskin. Ketika seseorang baik kepala keluarga ataupun anggota keluarga yang memiliki banyak tanggungan yang harus dihidupi, beban hidupnya akan bertambah. Hal ini mendorong seseorang harus menambah pendapatannya agar dirinya mampu menopang anggota keluarga yang lain.

5. Keterbatasan Sumber Daya (Alam maupun Modal)

Terbatasnya sumber daya alam serta permodalan juga mampu menyebabkan seseorang menjadi miskin. Alam yang tidak mendukung dalam usaha mencari nafkah juga menyulitkan seseorang untuk berusaha seperti lahan gersang, tandus, kering, sehingga sulit ditanami, dan diolah pada wilayah pedesaan. Seringnya ini bukan kehendak individu tersebut. Hal yang tidak bisa dihindari adalah ketika suatu wilayah dilanda bencana, yang mengakibatkan sumber potensi alam, infrastruktur serta kondisi psikologis masyarakatnya terdampak. Kerusakan tersebut sering kali membutuhkan waktu yang lama, dan akibatnya banyak penduduk menjadi miskin.

Selain itu, terbatasnya modal usaha juga menghambat perkembangan seseorang, terutama jika seseorang itu tingkat pendidikannya rendah, tidak mempunyai modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan atau pengetahuan. Hal ini tentu saja akan menjadi faktor penyebab kemiskinan yang serius (Abdi, 2019).

Menurut Houghton ada empat elemen penyebab kemiskinan, yang dijelaskan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1: Penyebab Kemiskinan (Houghton and Shahidur, 2009)

Karakteristik Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi wilayah terisolasi, terpencil, di mana termasuk kondisi infrastruktur yang buruk akibatnya tidak dapat akses masuk pasar serta pelayanan publik. • Kondisi SDA yang tidak mendukung, termasuk ketidakmampuan penduduk mengelola lahan. • Cuaca dalam suatu wilayah, kondisi lingkungan yang ekstrim. • Tata Kelola wilayah dan ketidakmampuan manajemen.
Karakteristik Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi infrastruktur yang buruk antara lain: jalan, air bersih, listrik, dan lain sebagainya. • Tidak meratanya distribusi lahan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Barang dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan lainnya) yang tidak dapat diakses. • Struktur sosial dan modal sosial yang tidak sama
Karakteristik Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ukuran rumah yang tidak memenuhi standar • Adanya rasio ketergantungan dalam hal ini jumlah anggota keluarga yang menganggur atau yang belum bekerja • Jenis kelamin kepala keluarga • Asal (tanah, peralatan, alat produksi, rumah dan perhiasan) • Pekerjaan dan <i>income</i> • Kesehatan dan pendidikan anggota keluarga
Karakteristik Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Usia • Pendidikan • Status Perkawinan • Suku dan daerah

5.3.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Terdapat beberapa jenis kemiskinan sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan, antara lain: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan hidup di mana seseorang atau sekelompok orang memiliki pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan akibatnya mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses kesehatan serta pendidikan yang dibutuhkan dalam menaikkan taraf hidupnya. Garis kemiskinan merupakan ukuran pengeluaran per kapita dalam pemenuhan standar kesejahteraan. Kemiskinan absolut paling populer digunakan sebagai konsep untuk menetapkan kondisi seseorang dikatakan miskin (Hildegunda, 2010).

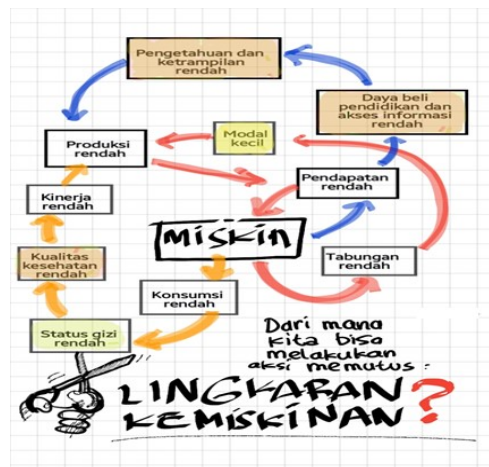
Kemiskinan relatif dapat dijelaskan merupakan kondisi seseorang menjadi miskin yang terjadi karena ada dipengaruhi kebijakan pembangunan yang tidak mampu diterima oleh seluruh kalangan masyarakat akibatnya terjadi kesenjangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Beberapa daerah yang belum merasakan hasil dari program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal. Kemiskinan Kultural merupakan kondisi kehidupan seorang individu atau kelompok orang yang mengacu pada sikap hidup yang biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan hidup, gaya hidup, dan budaya yang ada di tempat mereka tinggal, di mana mereka hidup dalam kondisi tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan, namun tidak ada niat untuk mengubah keadaannya. Umumnya masyarakat

yang seperti ini sulit diajak berpartisipasi dalam program pengurangan angka kemiskinan, atau perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan mereka memiliki pendapatan yang rendah menurut standar minimum yang dipakai secara umum. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, tidak pernah hemat atau pemboros, relatif pula bergantung pada pihak lain, dan kurang kreatif.

Kemiskinan Struktural merupakan kondisi miskin yang dialami individu atau kelompok masyarakat yang diakibatkan faktor buatan manusia, di mana sistem sosial budaya atau sosial politik yang tidak mendukung pengurangan angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena adanya unsur diskriminatif misalnya dari kebijakan pembangunan yang tidak adil, pendistribusian aset produksi yang tidak merata, maraknya KKN yang menguntungkan pihak tertentu. Sering sekali kemiskinan ini disebut dengan “accident poverty” yakni kemiskinan akibat dampak kebijakan yang keliru (Rustanto, 2015).

5.3.3 Perangkat dan Lingkaran Kemiskinan

Lingkaran kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan perangkat kemiskinan telah lama menjadi perbincangan para ekonom dan pembuat kebijakan. Ada banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan tentang lingkaran kemiskinan seperti apakah mula dari kemiskinan, kapan terjadi dan bagaimana memutuskan lingkaran tersebut. Berikut ini akan dipaparkan dari gambar, lingkaran kemiskinan tersebut.



Gambar 5.1: Lingkaran Perangkat Kemiskinan (Sya' bani, 2016)

Beberapa negara sedang berkembang sampai saat ini masih memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negeri menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Di saat mereka tidak mampu menjalankan pembangunan ekonomi, dampaknya adalah kapital riil cenderung kurang, tabungan rendah, serta menurunnya investasi sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh sebab itu, sudah seharusnya usaha memerangi kemiskinan diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

5.4 Mengukur Kemiskinan

5.4.1 Ukuran Kemiskinan Menurut Bank Dunia

Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada standar bank dunia didasarkan pada ukuran pendapatan (finansial), yakni dihitung dari besaran minimum makanan dan bukan makanan. Apabila seseorang memiliki pendapatan kurang dari US\$2,- per hari maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut masuk dalam kategori miskin dan masuk kategori miskin absolut jika pengeluarannya di bawah US\$1,- per hari (World Bank, 2020). Bila mengacu pada metode ini kemiskinan dinilai merupakan ketidaksanggupan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan melalui sisi pengeluaran dengan menggunakan pendekatan hitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari unsur, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) (Suryawati, 2005).

Garis kemiskinan makanan merupakan nilai dari pengeluaran minimum dari makanan dengan ukuran 2100 kkal per hari serta terdapat 52 jenis komoditi yang mewakili makanan. Ukuran ini didasarkan dari hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyamaan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan melalui perhitungan harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Rumus dasar dalam perhitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{*jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \times Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

yang mana GKM_{*jp} adalah kemiskinan dari makanan daerah j (ketika belum dilakukan penyetaraan 2100 kkal) provinsi p ; P_{jkp} adalah rata-rata jumlah

komoditas k yang dikonsumsi daerah j provinsi p ; V_{jkp} merupakan nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditas k di daerah j provinsi p ; j daerah (pedesaan maupun perkotaan), serta p adalah provinsi ke p . Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah pengeluaran minimum untuk perumahan, pendidikan, sandang, serta kesehatan. Berikut ini rumus menentukan garis kemiskinan:

$$GK = GKM + GKBM$$

5.4.2 Ukuran Kemiskinan Menurut BPS

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik bisa diperhatikan dengan ciri-ciri antara lain: luas lantai bangunan temoat tinggal kurang dari 8m² per orang; jenis lantai tempat tinggal terbuat dari kayu murahan, tanah atau bambu; kondisi dinding tempat tinggal hanya terbuat dari tembok tidak dipleset, bambu, atau kayu murahan; tidak ada memiliki fasilitas buang air besar (jamban) atau bahkan berbagi dengan rumah tetangga.

Ukuran kemiskinan menurut BPS adalah sebagai berikut:

1. Tidak miskin adalah seseorang yang memiliki pengeluaran per bulannya lebih dari Rp350.610,00;
2. Hampir tidak miskin adalah mereka yang pengeluaran per bulannya kisaran Rp280.488,00 hingga Rp350.610,00 atau antara Rp9.350,00 hingga Rp11.687,00 per orang per hari.
3. Hampir miskin, adalah seseorang yang pengeluaran per bulannya per kepala antara Rp233.740,00 hingga 280.488,00 atau kisaran Rp7.780,00 hingga Rp9.350,00 per hari.
4. Miskin, adalah seseorang yang pengeluaran per bulan per kepala adalah Rp233.740,00 ke bawah atau sekitar Rp7.780 ke bawah per hari.
5. Sangat miskin atau kondisi ekonomi kronis adalah seseorang yang pengeluaran per harinya tidak ada dalam kriteria, sehingga tidak bisa diketahui jumlahnya (Nainggolan, 2017).

5.5 Kemiskinan di Indonesia dan Beberapa Negara Berkembang

5.5.1 Sejarah Perjuangan Mengatasi Kemiskinan

Indonesia dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan ekonomi serta mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, hal ini banyak memperoleh apresiasi positif dari masyarakat dunia, bahkan Laporan Bank Dunia, yaitu: "The East Asian Miracle" menyebutkan Indonesia telah menjadi salah satu macan Asia dalam daftar "The High Performing Asian Economies (HPAEs)" keadaan ini disejajarkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan. Namun, keadaan ini tidak bertahan lama sebab kemudian krisis keuangan (krisis moneter) melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997.

Awalnya krisis ini adalah masalah nilai kurs uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang pemicunya adalah jatuhnya mata uang bath Thailand. Keadaan ini tidak diduga bahkan krisis tersebut sulit dikendalikan pemerintah yang kemudian memicu munculnya krisis politik yang ditandai dengan kejatuhan rejim Orde Baru. Kondisi ini layaknya bola salju, di mana krisis ini semakin parah serta menjadi pemicu munculnya krisis yang lain. Singkatnya, krisis tersebut berubah menjadi krisis ekonomi total mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.

Hantaman gelombang krisis ini menyebabkan Indonesia jatuh hingga ke titik terendah baik dalam ekonomi maupun politik; dari negara berprestasi di segi pembangunan yang gemilang menjadi negara yang membutuhkan keajaiban agar mampu lepas dari krisis. Dalam buku tahun 1998 yang berjudul "East Asia in Crisis: From Being a Miracle to Needing One?" karangan Garnaut dan Mcleod sangat tepat dalam mendeskripsikan bagaimana kondisi Indonesia tersebut. Krisis multi dimensi itu telah mengakibatkan Indonesia sulit merangkak keluar dari krisis. Bahkan ketika negara-negara Asia Tenggara lainnya, misalnya, Malaysia, Thailand, dan Singapura, telah berhasil memulihkan momentum pembangunan ekonomi mereka seperti kondisi sebelum krisis, Indonesia masih belum mampu keluar dari belitan krisis.

Pada saat itu berbagai program anti kemiskinan yang disusun pemerintah Orde Baru ketika memimpin menjadi tidak relevan lagi dilaksanakan. Akibat yang timbul dari kondisi yang demikian adalah meroketnya kembali angka

kemiskinan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, jika pada tahun 1996 (sebelum krisis) jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat ditekan menjadi sebelas persen, setelah krisis melanda, angka tersebut semakin membesar kembali menjadi dua puluh empat persen atau sekitar 39,4 juta orang. Penduduk miskin cenderung masih lebih tinggi di daerah pedesaan, hal ini memang tidak begitu mengejutkan mengingat program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan pada masa orde baru bias ke daerah perkotaan saja (Purwanto, 2007).

Kemudian pada tahun 2008-2009, krisis ekonomi yang terjadi di sejumlah negara di Amerika dan Eropa telah menjadi titik berat bagi negara tersebut dan negara lain yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia mengalami kondisi yang sulit dan sangat berpengaruh dalam menjalani perekonomian dunia. Kita dapat mengamati gelombang krisis akibat pergolakan bahan bakar minyak, sampai krisis sektor pangan yang melanda banyak negara di dunia, serta berdampak pada terjadinya krisis finansial yang begitu meresahkan hingga saat ini. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa kerugian di seluruh dunia terkait hutang yang berasal dari AS (yang berkaitan dengan mortgages) akan mencapai sekitar 1,4 triliun US dollar. Angka ini melesat melebihi proyeksi awal dari IMF yang hanya sebesar 945 miliar US dollar pada bulan April 2008. Akibat krisis ini sejumlah negara kaya menghadapi resesi, serta sebagian lagi dikarenakan lonjakan harga minyak pada 2009, seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang yang pendapatannya menurun (Nainggolan et al., 2020).

Tabel 5.2: Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin, 1970-2010 (BPS, 2018)

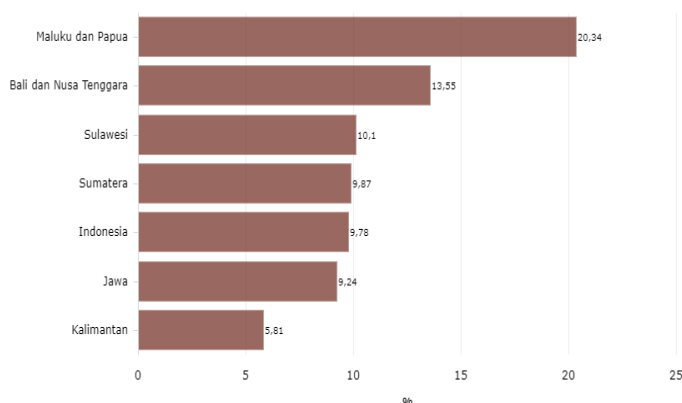
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1970	n.a	n.a	0,00	n.a	n.a	0,00
1976	0,00	4,20	4,20	8,80	0,40	0,10
1978	8,30	38,90	47,20	30,80	33,40	33,30
1980	9,50	32,80	42,30	29,00	28,40	28,60
1981	9,30	31,30	40,60	28,10	26,50	26,90

1984	9,30	25,70	35,00	23,10	21,20	21,60
1987	9,70	20,30	30,00	20,10	16,10	17,40
1990	9,40	17,80	27,20	16,80	14,30	15,10
1993	8,70	17,20	25,90	13,40	13,80	13,70
1996	7,20	15,30	22,50	9,70	12,30	11,30
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,20
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,31	26,43	38,74	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41
2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,10	18,20
2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42
2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33

5.5.2 Kondisi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020

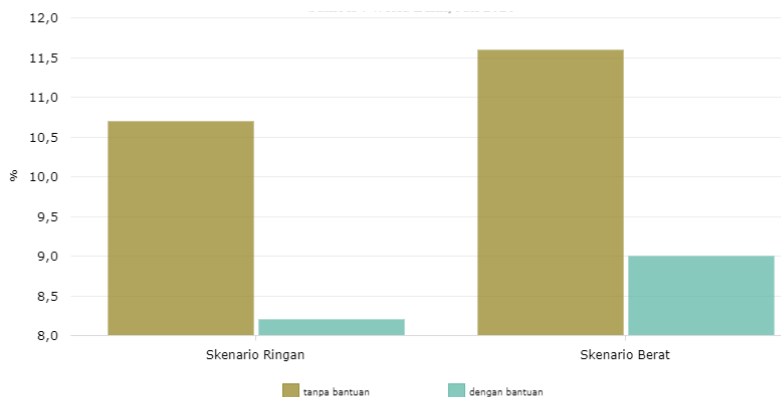
Berdasarkan data BPS per Maret 2020, Indonesia berada di angka 26,42 juta jiwa penduduk miskin atau 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 9,41% atau sekitar 25,14 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Maluku dan Papua yakni sebesar 20,34 %, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah ada di Provinsi Kalimantan sebesar 5,81%.

Kondisi ini disebabkan melemahnya kondisi ekonomi akibat konflik dagang antara Amerika Serikat dan China, serta diperparah dengan Pandemi Covid-19 sehingga memukul ekonomi Indonesia. Kondisi ini memberikan dampak yang signifikan dan dirasakan 12,15 juta penduduk hampir miskin yang mayoritas bekerja di sektor informal di mana kelompok ini yang paling rentan terimbas dan menghadapi kemiskinan absolut.



Gambar 5.2: Persebaran kemiskinan di Indonesia, 2020 (Jayani, 2020b)

Berdasarkan proyeksi dari bank dunia, Indonesia pada tahun 2020 akan menghadapi tingkat kemiskinan hingga 11%, di mana ada sekitar 5,5 juta hingga 8 juta jiwa penduduk miskin baru dibandingkan tahun 2019.



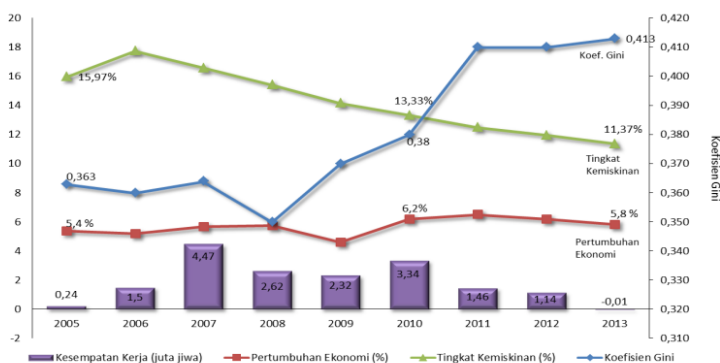
Gambar 5.3: Perkiraan Bank Dunia terkait Kemiskinan di Indonesia (Jayani, 2020a)

5.6 Kesenjangan Pendapatan

5.6.1 Pengertian Kesenjangan Pendapatan

Konsep ketimpangan dan kemiskinan sering sekali dicampuradukkan sekalipun dua istilah berbeda. Kemiskinan adalah gambaran kondisi seseorang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan tertentu. Ketimpangan menggambarkan jurang si kaya dan orang yang berpendapatan rendah. Dalam suatu wilayah, bisa saja kemiskinan yang ada menurun namun ketimpangan pendapatan tetap tinggi. Hal ini mungkin saja terjadi ketika perekonomian membaik sehingga orang yang tadinya berpendapatan rendah memiliki kehidupan ekonomi lebih baik atau melewati garis kemiskinan, namun si kaya justru semakin kaya.

Keadaan lain misalnya, perekonomian menurun sehingga si miskin semakin baik pendapatannya, justru pasar modal yang melemah akibatnya pemodal kaya mengalami kerugian besar, sehingga ketimpangan justru membaik (Kuncoro, 2015). Gambar 5.4 menunjukkan bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan, kemiskinan serta kesempatan kerja sejak 2005 hingga 2013:



Gambar 5.4: Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja (Biro Anapel, 2013)

Gambar 5.4 di atas diperlihatkan angka perkembangan ekonomi tinggi di periode 2010–2013 yakni di atas 6%, keadaan ini belum dapat dikatakan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bahkan keadaan ini tidak sebaik pada periode sebelumnya yaitu 2005–2007. Hal ini ditunjukkan

dengan melebarnya kesenjangan ekonomi, angka kemiskinan yang menurun akan tetapi melambat serta tingkat penambahan angka kesempatan kerja yang semakin rendah (Biro Anapel, 2013).

Masalah kesenjangan pendapatan selalu mampu memicu kecemburuan sosial di masyarakat, bahkan yang lebih buruk kekerasan bahkan kriminalitas sosial yang sering terjadi di wilayah tertentu. Sebagai contoh, SDA di Indonesia yang melimpah sejatinya mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, jika kebijakan serta regulasi dilaksanakan serta berpihak pada seluruh rakyat. Namun yang terjadi kesenjangan terjadi, di mana fokus pembangunan lebih condong ke wilayah Jawa, sedangkan mayoritas wilayah timur hampir tidak menikmati pembangunan. Kemudian kasus perusahaan besar yang melakukan eksploitasi SDA secara besar-besaran di daerah, namun masyarakat di daerah tersebut hanya sebagai penonton dan tidak memberikan manfaat, akibatnya terjadi frustrasi sosial yang berujung pada perbuatan kriminal (Kuncoro, 2015).

5.6.2 Penyebab Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan bisa diamati dari bagaimana percepatan pembangunan suatu negara, adanya kediktatoran, pemerintahan yang gagal di suatu negara, serta heterogenitas etnis. Kesenjangan pendapatan umumnya mungkin terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini biasanya distribusi pendapatan akan memburuk, namun, sejalan dengan waktu di tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan kesenjangan akan terkikis, sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara (Hajiji, 2010). Pola distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, mengakibatkan semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi sebab orang kaya akan mempunyai persentase tabungan yang lebih banyak dari pada orang miskin sehingga mendorong meningkatnya *aggregate saving rate* yang dibarengi dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi (Todaro and Smith, 2013).

Terjadinya ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah disebabkan delapan faktor, yaitu (Arsyad, 2010):

1. Tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita.

2. Keadaan inflasi yakni pendapatan uang bertambah tetapi tidak dibarengi secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang sehingga terjadi *shortage supply*.
3. Pembangunan antar wilayah tidak merata.
4. Proyek-proyek yang padat modal (*capital insentive*) cenderung mendapat banyak investasi, akibatnya persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar jika dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari tenaga kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Mobilitas sosial yang rendah.
6. Kenaikan harga barang yang dihasilkan industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis akibat pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor.
7. Nilai tukar (*term of trade*) memburuk di negara sedang berkembang ketika melakukan perdagangan dengan negara maju, yang diakibatkan ketidakelestarian permintaan negara maju terutama untuk barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain mengalami kehancuran.

5.6.3 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa indikator yang dijadikan alat ukur oleh para peneliti dalam melihat kesenjangan pendapatan di suatu negara atau daerah.

1. Indeks Gini (IG) dan Kurva Lorenz

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendistribusian pendapatan yang dapat diperoleh dari Kurva Lorenz. Koefisien Gini adalah ukuran dispersi statistik yang bertujuan mewakili distribusi output dalam bentuk angka. Koefisien Gini pertama sekali dikenalkan oleh ahli statistik dan sosiolog yang berasal dari Italia bernama Corrado Gini dalam jurnal penelitiannya berjudul *Variabilitas dan Mutabilitas*, 1912 (Suleman et al., 2020). Indeks gini dirumuskan sebagai berikut:

$$IG = \sum_{t=1}^{n-1} \eta_{t+1}\pi_t - \sum_{t=1}^{n-1} \eta_t\pi_{t+1}$$

yang mana η_t adalah kumulatif dari pendapatan, dan η_t adalah kumulatif penduduk.

Salah satu yang menjadi menarik dari indeks gini ini adalah metodenya sangat langsung mengukur ketidakmerataan. Nilai IG berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menjelaskan pendapatan dibagi secara merata sempurna (perfect equality) sedangkan nilai 1 menunjukkan pendapatan hanya dikuasai satu orang pada keseluruhan distribusi (perfect inequality). Kemudian ketimpangan rendah berada di kisaran 0,4 ke bawah, sedangkan ketimpangan parah berada di kisaran 0,4 ke atas. Lebih lengkap dapat dilihat dari tabel berikut:

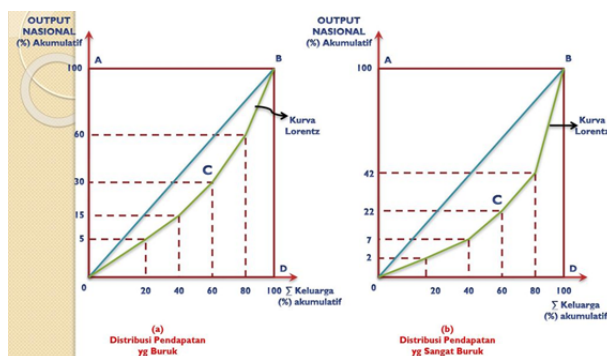
Tabel 5.3: Patokan Nilai Indeks Gini (Gini Ratio)

Nilai Indeks Gini (x)	Kriteria Distribusi Pendapatan Nasional
x=1,00	Merata Sempurna
0<x<0,4	Kesenjangan Rendah
0,4<x<0,5	Kesenjangan Sedang
0,5<x<1,00	Kesenjangan Parah
x=1,00	Tidak Merata Sempurna

Kurva lorenz pertama sekali diperkenalkan oleh seorang ekonom Amerika bernama Max Otto Lorenz. Kurva lorenz adalah kurva yang menggambarkan ketidakmerataan distribusi pendapatan, di mana kurva tersebut terdiri dari segi empat, dan garis diagonal pada segi empat, dan satu kurva riil yang menghubungkan dua titik diagonal. Sumbu horizontal pada kurva lorenz menunjukkan jumlah kumulatif dari penduduk dengan rentang dari 1-100 persen, dibagi menjadi 5 golongan, yaitu 20 persen kelompok keluarga paling miskin, sampai 20 persen keluarga paling kaya. Sumbu vertikal adalah jumlah keseluruhan dari penerimaan kelompok termiskin, sampai yang paling kaya (Suleman et al., 2020).

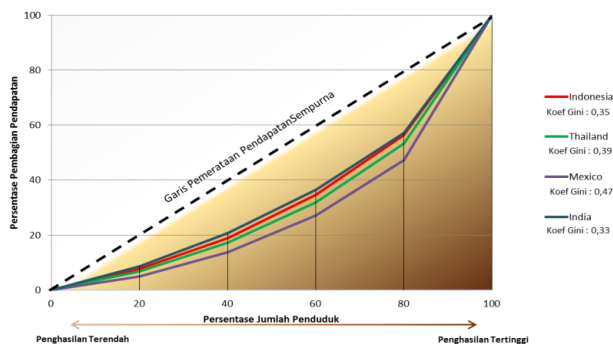
Berdasarkan Gambar 5.5 dapat dilihat bahwa ketika kurva lorenz semakin mendekati garis diagonal, maka makin kecil kesenjangan, bisa juga dikatakan pembagian semakin sempurna, artinya ada 20 persen keluarga termiskin

menikmati 20 persen distribusi. Lalu 20 persen keluarga miskin, dapat menikmati 20 persen distribusi pendapatan lainnya. Demikian selanjutnya sampai total 100 persen kelompok dalam suatu negara itu menikmati 100 persen distribusi tersebut. Dalam kondisi distribusi output yang sempurna, kurva ini akan menunjukkan garis diagonal OB dan akan memotong segi empat OABD jadi segitiga sama kaki, yakni: OAB dan ODB. Namun jika output didistribusikan dengan tidak adil, akan terbentuk Kurva Lorenz yang melengkung, seperti garis OB yang menjauhi garis diagonal.



Gambar 5.5: Kurva Lorenz (Rahardja and Manurung, 2016)

Mengacu pada data Bank Dunia, kesenjangan pendapatan di Indonesia cenderung relatif rendah jika dibanding dengan beberapa negara berkembang, yakni pada tahun 2010 angka IG Indonesia sebesar 0,35. Pada Gambar 5.6 terlihat kurva lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan beberapa negara antara lain Indonesia, Thailand, Mexico, dan India.



Gambar 5.6: Kesenjangan Indonesia Relatif Rendah Berdasarkan Standard World Bank (Biro Anapel, 2013)

2. Indeks Theil dan Indeks-L

Ukuran kesenjangan yang banyak dipakai sebab dinilai telah memenuhi semua kriteria untuk sebuah ukuran kesenjangan yang baik adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kriteria ukuran kesenjangan yang baik adalah: tidak tergantung pada nilai rata-rata; tidak terpengaruh pada populasi; simetris; sensitivitas transfer Pigou-Dalton yaitu transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan meningkatkan pemerataan. Ukuran kesenjangan, wajib memiliki dua sifat, yaitu: dapat didekomposisi; serta dapat diuji secara statistik (Kuncoro, 2015).

3. Bank Dunia

Dalam mengukur ketimpangan distribusi output nasional suatu negara, Bank Dunia melihat dari 40 persen kelompok keluarga termiskin terhadap total pengeluarannya. Kesenjangan pendapatan menurut Bank Dunia ada tiga klasifikasi, yakni:

- a. Kesenjangan Tinggi. 40% yaitu penduduk yang memiliki pendapatan rendah, menerima < 12% dari total pendapatan.
- b. Kesenjangan Sedang. 40% yaitu penduduk yang memiliki pendapatan rendah, menerima 12%-17% dari total pendapatan.
- c. Kesenjangan Rendah. 40% yaitu penduduk yang memiliki pendapatan rendah, menerima > 17% dari total pendapatan (Suleman et al., 2020).

Bab 6

Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Utang Luar Negeri

6.1 Pendahuluan

Dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang ekonomi makro istilah-istilah seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan utang luar negeri sangat akrab di telinga masyarakat pada umumnya dan siapapun yang menekuni bidang ekonomi. Istilah yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal identik dengan optimalisasi pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak untuk memengaruhi kondisi ekonomi, terutama kondisi makroekonomi, termasuk permintaan agregat untuk barang dan jasa, lapangan kerja, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Abbas, S.M. Ali; Bouhga-Hagbe, 2011).

Istilah kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter, sisi permintaan dari kebijakan ekonomi, mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengontrol jumlah uang beredar dan mencapai tujuan makroekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Istilah ketiga yaitu utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan uang yang dipinjam oleh pemerintah, perusahaan atau rumah tangga swasta dari pemerintah atau pemberi pinjaman swasta negara lain. Utang luar negeri juga termasuk kewajiban kepada organisasi internasional seperti Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Dana Moneter Internasional (IMF). Total utang luar negeri merupakan total dari utang jangka pendek dan jangka panjang.

6.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sebagian besar didasarkan pada ide dari seorang ekonom dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes (1883-1946). Dia berpendapat bahwa resesi ekonomi disebabkan oleh kekurangan belanja konsumsi dan komponen investasi bisnis dari permintaan agregat. Keynes percaya bahwa pemerintah dapat menstabilkan siklus bisnis dan mengatur keluaran ekonomi dengan menyesuaikan pengeluaran dan kebijakan pajak untuk menutupi kekurangan sektor swasta. Teorinya dikembangkan sebagai respon atas “The Great Depression”, yang menentang asumsi ekonomi klasik bahwa perubahan ekonomi dapat mengoreksi dengan sendirinya (auto correction) (Cimadomo, 2008).

Dalam mazhab ekonomi Keynesian, aggregate supply and aggregate demand adalah yang mendorong kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan agregat terdiri dari belanja konsumen, belanja investasi bisnis, belanja bersih pemerintah, dan ekspor neto. Selain itu, komponen sektor swasta dari permintaan agregat terlalu bervariasi dan bergantung pada faktor psikologis dan emosional untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pesimisme dan ketidakpastian di antara konsumen dan bisnis dapat menyebabkan resesi dan depresi ekonomi.

Namun, aspek perpajakan dan pengeluaran pemerintah dapat dikelola secara rasional untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan konsumsi sektor swasta dan pengeluaran investasi untuk menstabilkan ekonomi. Ketika pengeluaran sektor swasta menurun, pemerintah dapat membelanjakan lebih banyak dan atau mengurangi pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Ketika sektor swasta terlalu optimis dan membelanjakan terlalu banyak dan terlalu cepat untuk konsumsi dan proyek-proyek investasi baru, pemerintah dapat membelanjakan lebih sedikit dan atau mengenakan pajak lebih banyak untuk

mengurangi permintaan agregat. Dengan demikian untuk membantu menstabilkan ekonomi, pemerintah harus menjalankan system anggaran defisit yang besar selama kemerosotan ekonomi dan menjalankan anggaran surplus saat ekonomi mengalami pertumbuhan. Hal ini dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif (Group, 2017).

6.2.1 Kebijakan Fiskal Ekspansif

Untuk menggambarkan bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk memengaruhi perekonomian, pertimbangkan ekonomi yang sedang mengalami resesi. Pemerintah mungkin mengeluarkan stimulus pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika orang membayar pajak yang lebih rendah, mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan atau diinvestasikan, yang memicu permintaan yang lebih tinggi. Permintaan itu membuat perusahaan mempekerjakan lebih banyak sehingga mengurangi pengangguran, dan bersaing lebih ketat untuk mendapatkan tenaga kerja. Konsekuensinya hal ini ini berfungsi untuk menaikkan upah dan memberikan konsumen lebih banyak penghasilan untuk dibelanjakan dan diinvestasikan (Jaelani, 2016).

Daripada menurunkan pajak, pemerintah dapat mengupayakan ekspansi ekonomi melalui peningkatan pengeluaran (tanpa kenaikan pajak yang sesuai). Dengan membangun lebih banyak jalan raya, misalnya, dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong permintaan dan pertumbuhan. Kebijakan fiskal ekspansif biasanya dicirikan oleh pengeluaran defisit, ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan dari pajak dan sumber lainnya. Dalam praktiknya, pengeluaran defisit cenderung dihasilkan dari kombinasi pemotongan pajak dan pengeluaran yang lebih tinggi. John Maynard Keynes berpendapat bahwa negara-negara dapat menggunakan kebijakan pengeluaran/pajak untuk menstabilkan siklus bisnis dan mengatur output ekonomi.

Dampak langsung dari kebijakan fiskal adalah mengubah permintaan agregat untuk barang dan jasa. Kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan permintaan agregat melalui salah satu dari dua saluran. Pertama, jika pemerintah meningkatkan pembelian namun pajaknya konstan, maka akan meningkatkan permintaan. Kedua, jika pemerintah memotong pajak atau meningkatkan belanja pemerintah, maka pendapatan rumah tangga meningkat, dan mereka membelanjakan lebih banyak untuk konsumsi. Konsumsi yang meningkat akan meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan fiskal juga

mengubah komposisi permintaan agregat. Dalam kondisi defisit, sebagian pengeluaran pemerintah dibiayai dengan penerbitan obligasi. Konsekuensinya, pemerintah bersaing dengan pihak swasta.

Kebijakan fiskal merupakan alat penting untuk mengelola perekonomian karena kemampuannya memengaruhi jumlah total output yang diproduksi yaitu, produk domestik bruto. Dampak pertama dari kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan yang lebih besar ini mengarah pada peningkatan output dan harga. Sejauh mana permintaan yang lebih tinggi meningkatkan output dan harga bergantung pada keadaan siklus bisnis. Jika perekonomian berada dalam resesi, dengan kapasitas produktif yang idle dan pekerja yang menganggur, maka peningkatan permintaan akan menghasilkan lebih banyak output tanpa mengubah tingkat harga. Sebaliknya, jika perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh, kebijakan fiskal ekspansif akan lebih berpengaruh pada harga dan dampaknya lebih sedikit pada total output (Spilimbergo, Antonio; Symansky, Steve; Blanchard, Olivier; Cottarelli, 2009).

Defisit yang meningkat adalah salah satu dampak dari kebijakan fiskal ekspansif. Banyak ekonom hanya mempermasalahkan efektivitas kebijakan fiskal ekspansif, dengan alasan bahwa pengeluaran pemerintah terlalu mudah menghalangi investasi oleh sektor swasta. Stimulus fiskal secara politis sulit untuk dibalik apakah memiliki efek ekonomi makro yang diinginkan atau tidak di mana masyarakat lebih menyukai pajak rendah dan pengeluaran publik. Oleh karena insentif politik yang dihadapi oleh pembuat kebijakan, cenderung ada bias yang konsisten untuk terlibat dalam pengeluaran defisit yang kurang lebih konstan yang sebagian dapat dirasionalisasi sebagai suatu hal yang baik untuk perekonomian (Mountford, Andrew; Uhlig, 2008).

6.2.2 Kebijakan Fiskal Kontraktif

Dalam menghadapi peningkatan inflasi dan gejala ekspansif lainnya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang kontraktif, bahkan mungkin sampai menimbulkan resesi singkat untuk memulihkan keseimbangan ekonomi. Seperti telah disinggung sebelumnya, kebijakan fiskal merupakan penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk memengaruhi perekonomian. Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan serta mengurangi kemiskinan. Peran dan tujuan kebijakan fiskal menjadi menonjol selama krisis ekonomi global baru-baru ini, ketika pemerintah turun tangan

untuk mendukung sistem keuangan, mempercepat pertumbuhan, dan mengurangi dampak krisis terhadap kelompok rentan. Kebijakan fiskal dikatakan ketat atau kontraksi ketika pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran (yaitu, anggaran pemerintah surplus) dan longgar atau ekspansif ketika pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan (yaitu, anggaran mengalami defisit). Seringkali, fokusnya bukan pada tingkat defisit, tetapi pada perubahan defisit.

Secara historis, keunggulan kebijakan fiskal sebagai alat kebijakan telah mengalami peningkatan dan penurunan. Sebelum tahun 1930, pendekatan pemerintahan terbatas, atau *laissez-faire* yang berlaku. Dengan jatuhnya pasar saham dan *The Great Depression*, pembuat kebijakan mendorong pemerintah untuk memainkan peran yang lebih proaktif dalam perekonomian. Beberapa negara telah mengurangi fungsi pemerintah, namun ketika krisis keuangan global mengancam resesi di seluruh dunia, mereka akan kembali ke kebijakan fiskal yang lebih aktif.

6.2.3 Mekanisme Kebijakan Fiskal

Ketika pembuat kebijakan berusaha memengaruhi perekonomian, mereka memiliki dua alat utama yang mereka miliki — kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bank sentral secara tidak langsung menargetkan aktivitas dengan memengaruhi jumlah uang beredar melalui penyesuaian suku bunga, persyaratan cadangan bank, dan pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah dan valuta asing. Pemerintah memengaruhi perekonomian dengan mengubah tingkat dan jenis pajak, tingkat dan komposisi pengeluaran, serta tingkat dan bentuk pinjaman. Pemerintah secara langsung dan tidak langsung memengaruhi cara penggunaan sumber daya dalam perekonomian. Persamaan dasar penghitungan pendapatan nasional yang mengukur output suatu perekonomian atau produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran yaitu: $PDB = C + I + G + NX$.

Di sisi kiri adalah PDB yang merupakan nilai semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian. Selanjutnya di sisi kanan adalah sumber pengeluaran atau permintaan agregat yaitu konsumsi swasta (C), investasi swasta (I), pembelian barang dan jasa oleh pemerintah (G), dan ekspor dikurangi impor (ekspor neto, NX). Persamaan ini memperjelas bahwa pemerintah memengaruhi aktivitas ekonomi (PDB), mengendalikan G secara langsung, dan memengaruhi C, I, dan NX secara tidak langsung, melalui perubahan pajak, transfer, dan pengeluaran. Kebijakan fiskal yang

meningkatkan permintaan agregat secara langsung melalui peningkatan pengeluaran pemerintah biasanya disebut ekspansif atau "longgar". Sebaliknya, kebijakan fiskal sering dianggap kontraksi atau "ketat" jika menurunkan permintaan melalui pengeluaran yang lebih rendah (Auerbach and Gorodnichenko, 2012).

Selain menyediakan barang dan jasa seperti public safety, jalan raya, atau pendidikan dasar, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang bervariasi. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat berfokus pada stabilisasi ekonomi makro misalnya dengan memperluas pengeluaran atau memotong pajak untuk merangsang ekonomi yang sedang melemah, atau mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk menahan laju inflasi. Dalam jangka panjang, tujuannya untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan atau mengurangi kemiskinan dengan tindakan di sisi penawaran untuk meningkatkan infrastruktur atau pendidikan. Meskipun tujuan-tujuan ini tersebar luas di berbagai negara, kepentingan relatifnya berbeda-beda, bergantung pada keadaan negara.

Dalam jangka pendek, prioritas dapat mencerminkan siklus bisnis atau respons terhadap bencana alam atau lonjakan harga pangan atau bahan bakar global. Dalam jangka panjang, penggeraknya dapat berupa tingkat pembangunan, demografi, atau ketersediaan sumber daya alam.

6.2.4 Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global pada tahun 2007-2008 adalah studi kasus yang baik dalam kebijakan fiskal di mana pada waktu itu sektor keuangan dan kepercayaan yang lesu telah memukul konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional (yang semuanya memengaruhi output, PDB). Pemerintah merespon krisis tersebut dengan meningkatkan aktivitas melalui dua saluran: stabilisator otomatis dan stimulus fiskal yaitu, pengeluaran diskresioner baru atau pemotongan pajak. Stabilisator mulai berlaku saat penerimaan pajak dan tingkat pengeluaran berubah dan tidak bergantung pada tindakan pemerintah (Doraisarni, 2011).

Contohnya, karena output menurun, jumlah pajak yang dikumpulkan menurun karena laba perusahaan dan pendapatan pembayar pajak turun, terutama dengan tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan orang, maka akan ditekankan tarif pajak yang semakin tinggi pula. Pengeluaran sosial lainnya juga dirancang untuk meningkat selama penurunan. Perubahan siklus

ini membuat kebijakan fiskal secara otomatis ekspansif selama penurunan dan kontraksi selama kenaikan.

Stabilisator otomatis terkait dengan ukuran pemerintah, dan cenderung lebih besar di negara maju. Di mana stabilisator lebih besar, mungkin ada lebih sedikit kebutuhan untuk stimulus seperti pemotongan pajak, subsidi, atau program pekerjaan umum karena kedua pendekatan itu membantu melunakkan efek penurunan. Selama krisis, negara-negara dengan stabilisator yang lebih besar cenderung tidak menggunakan langkah-langkah diskresioner. Selain itu, meskipun tindakan diskresioner dapat disesuaikan dengan kebutuhan stabilisasi, stabilisator otomatis tidak tunduk pada kelambatan implementasi seperti yang sering terjadi pada tindakan diskresioner. Selain itu, stabilisator otomatis dan efeknya secara otomatis dicabut saat kondisi membaik (Taylor, 2000).

6.3 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan proses penyusunan, pengumuman, dan pelaksanaan rencana tindakan yang diambil oleh bank sentral, dewan mata uang, atau otoritas moneter kompeten lainnya dari suatu negara yang mengontrol jumlah uang dalam suatu perekonomian dan saluran di mana uang baru itu disediakan. Misalnya, otoritas moneter dapat melihat angka-angka makroekonomi seperti produk domestik bruto (PDB) dan inflasi, tingkat pertumbuhan industri / sektor tertentu dan angka terkait, serta perkembangan geopolitik di pasar internasional termasuk embargo minyak atau tarif perdagangan. Entitas ini juga dapat merenungkan kekhawatiran yang diajukan oleh kelompok yang mewakili industri dan bisnis, hasil survei dari organisasi yang bereputasi, dan masukan dari pemerintah dan sumber yang dapat dipercaya lainnya.

Kebijakan moneter terdiri dari pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga yang ditujukan untuk memenuhi tujuan makroekonomi seperti pengendalian inflasi, konsumsi, pertumbuhan, dan likuiditas. Hal ini dicapai dengan mengubah suku bunga, membeli atau menjual obligasi pemerintah, mengatur nilai tukar valuta asing, dan mengubah jumlah uang yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan. Kebijakan moneter dapat digunakan sebagai kombinasi dengan atau sebagai alternatif dari kebijakan fiskal, yang

menggunakan pajak, pinjaman pemerintah, dan pengeluaran untuk mengelola perekonomian (Werning, 2011).

6.3.1 Kebijakan Moneter Ekspansif

Jika suatu negara menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi selama perlambatan atau resesi, otoritas moneter dapat memilih kebijakan ekspansif yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas aktivitas ekonomi. Sebagai bagian dari kebijakan moneter ekspansif, otoritas moneter acapkali menurunkan suku bunga melalui berbagai langkah, berfungsi untuk mendorong pengeluaran dan membuat penghematan uang relatif tidak menguntungkan. Peningkatan jumlah uang beredar di pasar bertujuan untuk meningkatkan investasi dan belanja konsumen. Suku bunga yang lebih rendah berarti bahwa bisnis dan individu dapat memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang nyaman untuk memperluas kegiatan produktif dan membelanjakan lebih banyak untuk barang-barang konsumen yang sangat mahal. Contoh dari pendekatan ekspansif ini adalah tingkat suku bunga rendah hingga nol yang dipertahankan oleh banyak negara ekonomi terkemuka di seluruh dunia sejak krisis keuangan 2008.

6.3.2 Kebijakan Moneter Kontraktif

Jumlah uang beredar yang meningkat dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, meningkatkan biaya hidup dan biaya menjalankan bisnis. Kebijakan moneter kontraktif, menaikkan suku bunga, dan memperlambat pertumbuhan jumlah uang beredar, bertujuan untuk menurunkan inflasi. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran, tetapi sering kali diperlukan supaya perekonomian tetap terkendali. Pada awal 1980-an ketika inflasi mencapai rekor tertinggi dan berada di kisaran dua digit sekitar 15%, The Fed menaikkan suku bunga acuannya ke rekor 20%. Meskipun tingkat yang tinggi mengakibatkan resesi, ia berhasil mengembalikan inflasi ke kisaran yang diinginkan dari 3% hingga 4% selama beberapa tahun ke depan.

6.3.3 Instrumen Kebijakan Moneter

Bank sentral menggunakan sejumlah instrumen untuk membentuk dan menerapkan kebijakan moneter. Instrumen yang pertama adalah membeli dan menjual obligasi jangka pendek di pasar terbuka menggunakan cadangan bank yang baru dibuat. Ini dikenal sebagai operasi pasar terbuka. Operasi pasar

terbuka biasanya menargetkan suku bunga jangka pendek seperti suku bunga dana federal. Bank sentral menambahkan uang ke dalam sistem perbankan dengan membeli aset atau menghapusnya dengan menjual aset dan bank merespons dengan lebih mudah meminjamkan uang dengan suku bunga yang lebih rendah — atau lebih tepatnya, dengan suku bunga yang lebih tinggi — sampai target suku bunga bank sentral terpenuhi. Operasi pasar terbuka juga dapat menargetkan peningkatan tertentu dalam jumlah uang beredar agar bank lebih mudah meminjamkan dana dengan membeli sejumlah aset tertentu.

Instrumen kedua adalah mengubah suku bunga dan / atau jaminan yang diminta bank sentral untuk pinjaman darurat langsung ke bank dalam perannya sebagai lender-of-last-resort. Di Amerika tarif ini dikenal sebagai tingkat diskonto. Membebaskan suku bunga yang lebih tinggi dan membutuhkan lebih banyak agunan, contoh kebijakan moneter kontraktif, akan berarti bahwa bank harus lebih berhati-hati dengan pinjaman mereka sendiri atau risiko kegagalan. Sebaliknya, meminjamkan kepada bank dengan suku bunga yang lebih rendah dan dengan persyaratan agunan yang lebih longgar akan memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman yang lebih berisiko dengan suku bunga yang lebih rendah dan menjalankan dengan cadangan yang lebih rendah (Mishkin, 2011).

Instrumen ketiga adalah persyaratan cadangan, yang mengacu pada dana yang harus disimpan bank sebagai bagian dari simpanan yang dibuat oleh pelanggan mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban mereka. Menurunkan persyaratan cadangan ini berarti melepaskan lebih banyak modal bagi bank untuk menawarkan pinjaman atau membeli aset lain. Instrumen terakhir adalah kemampuan bank sentral untuk membentuk ekspektasi pasar melalui pengumuman publik mereka tentang kebijakan bank sentral di masa depan. Pernyataan bank sentral dan pengumuman kebijakan menggerakkan pasar, dan investor yang menebak dengan benar tentang apa yang akan dilakukan bank sentral dapat memperoleh keuntungan yang besar.

Pengumuman kebijakan hanya efektif sejauh kredibilitas otoritas yang bertanggung jawab untuk menyusun, mengumumkan, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam dunia yang ideal, otoritas moneter seperti itu harus bekerja sepenuhnya terlepas dari pengaruh pemerintah, tekanan politik, atau otoritas pembuat kebijakan lainnya. Pada kenyataannya, pemerintah di seluruh dunia mungkin memiliki berbagai level intervensi terhadap kinerja otoritas moneter. Jika bank sentral mengumumkan kebijakan tertentu untuk membatasi peningkatan inflasi, peningkatan inflasi akan tetap

tinggi jika tingkat kepercayaan masyarakat rendah. Dengan demikian, kredibilitas otoritas memegang peranan penting.

Dalam jangka panjang, output yang biasanya diukur dengan produk domestik bruto (PDB) akan tetap, sehingga setiap perubahan jumlah uang beredar hanya menyebabkan harga berubah. Namun dalam jangka pendek, oleh karena harga dan upah yang biasanya tidak segera menyesuaikan, jumlah uang beredar dapat memengaruhi produksi barang dan jasa yang sebenarnya. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan moneter yang umumnya dilakukan oleh bank sentral adalah alat kebijakan yang berarti untuk mencapai tujuan inflasi dan pertumbuhan. Dalam resesi, misalnya, konsumen berhenti berbelanja sebanyak dulu; produksi bisnis menurun, menyebabkan perusahaan memberhentikan pekerja dan berhenti berinvestasi dalam kapasitas baru; dan minat asing untuk ekspor negara juga bisa turun. Singkatnya, ada penurunan permintaan secara keseluruhan, atau agregat, yang dapat ditanggapi oleh pemerintah dengan kebijakan yang bersandar pada arah arah perekonomian. Kebijakan moneter sering kali menjadi alat pilihan berlawanan.

Kebijakan *countercyclical* seperti itu akan mengarah pada perluasan output yang diinginkan (dan kesempatan kerja), tetapi, karena hal itu memerlukan peningkatan jumlah uang beredar, juga akan mengakibatkan kenaikan harga. Ketika perekonomian semakin dekat untuk berproduksi pada kapasitas penuh, peningkatan permintaan akan menekan biaya input, termasuk upah. Para pekerja kemudian menggunakan pendapatan mereka yang meningkat untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, selanjutnya menawar harga dan upah dan mendorong inflasi umum ke atas hasil yang biasanya ingin dihindari oleh pembuat kebijakan (Doraisarni, 2011).

6.3.4 Peran Bank Sentral

Pendekatan dasar bank sentral dalam mengubah kebijakan moneternya adalah mengubah ukuran jumlah uang beredar. Ini biasanya dilakukan melalui operasi pasar terbuka, di mana utang pemerintah jangka pendek dipertukarkan dengan sektor swasta. Sementara banyak bank sentral telah berpengalaman selama bertahun-tahun dengan target eksplisit untuk pertumbuhan uang, target seperti itu menjadi semakin tidak umum, karena korelasi antara uang dan harga lebih sulit diukur daripada sebelumnya. Banyak bank sentral telah beralih ke inflasi sebagai target mereka baik sendiri atau dengan tujuan implisit yang mungkin untuk pertumbuhan dan / atau lapangan kerja.

Ketika bank sentral mempunyai wacana tentang kebijakan moneter, biasanya berfokus pada tingkat suku bunga yang ingin dilihatnya, daripada pada jumlah uang tertentu (meskipun tingkat suku bunga yang diinginkan mungkin perlu dicapai melalui perubahan jumlah uang beredar). Bank sentral cenderung berfokus pada satu “suku bunga kebijakan” biasanya suku bunga jangka pendek, seringkali dalam semalam, yang dibebankan bank satu sama lain untuk meminjam dana. Ketika bank sentral memasukkan uang ke dalam sistem dengan membeli atau meminjam sekuritas, yang dalam bahasa sehari-hari disebut kebijakan pelonggaran, tingkat suku bunga menurun. Ini biasanya meningkat ketika bank sentral mengetatkan dengan menyerap cadangan. Bank sentral mengharapkan bahwa perubahan suku bunga kebijakan akan memengaruhi semua suku bunga lain yang relevan dalam perekonomian (Vasco and Woodford, 2009).

Kebijakan moneter memiliki pengaruh tambahan yang penting terhadap inflasi melalui ekspektasi komponen inflasi yang terpenuhi dengan sendirinya. Banyak kontrak upah dan harga disepakati sebelumnya, berdasarkan proyeksi inflasi. Jika pembuat kebijakan menaikkan suku bunga dan mengkomunikasikan bahwa kenaikan lebih lanjut di masa depan, ini dapat meyakinkan publik bahwa pembuat kebijakan serius untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter mengacu pada instrumen yang digunakan bank sentral yang digunakan untuk memengaruhi jumlah uang beredar, atau jumlah uang dalam suatu perekonomian. Bank sentral menggunakan instrumen ini karena mereka ingin menjaga kenaikan harga dalam suatu perekonomian yang meningkat namun tetap terkendali, dan memaksimalkan lapangan kerja.

Namun, kebijakan moneter bukan hanya masalah domestik. Dalam dunia global, ekonomi nasional terhubung, dan keputusan yang dibuat di satu negara dapat berdampak pada negara lain. Kebijakan moneter seperti penyesuaian suku bunga dan jumlah uang beredar dapat memainkan peran penting dalam memerangi perlambatan ekonomi. Penyesuaian semacam itu dapat dilakukan dengan cepat, dan otoritas moneter mencurahkan banyak sumber daya untuk memantau dan menganalisis perekonomian. Kebijakan moneter dapat mengimbangi penurunan karena suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya pinjaman konsumen untuk membeli barang-barang mahal seperti mobil atau rumah. Bagi perusahaan, kebijakan moneter juga dapat mengurangi biaya investasi. Oleh karena itu, suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan pengeluaran baik oleh rumah tangga maupun perusahaan, sehingga

meningkatkan perekonomian (Ridhwan, Masagus M.; de Groot, Henri L.F.; Rietveld, Piet; Nijkamp, 2011).

Perubahan kondisi ekonomi memerlukan waktu dengan memberlakukan undang-undang stimulus dan kemudian menerapkannya. Konsekuensinya, pengaruh stimulus fiskal terhadap pengeluaran rumah tangga dan bisnis mungkin terlambat. Besaran stimulus yang diperlukan tergantung pada kondisi ekonomi saat ini, proyeksi kondisi masa depan, dan kemungkinan risiko baik terhadap aktivitas ekonomi maupun inflasi (Davig and Leeper, 2009).

6.4 Utang Luar Negeri

6.4.1 Definisi

Utang luar negeri adalah bagian dari utang suatu negara yang dipinjam dari pemberi pinjaman asing, termasuk bank komersial, pemerintah, atau lembaga keuangan internasional. Pinjaman ini, termasuk bunga, biasanya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk mendapatkan mata uang yang dibutuhkan, negara peminjam dapat menjual dan mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman. Krisis hutang dapat terjadi jika suatu negara dengan ekonomi yang lemah tidak dapat membayar kembali hutang luar negerinya karena ketidakmampuan untuk memproduksi dan menjual barang dan menghasilkan keuntungan yang menguntungkan. Dana Moneter Internasional (IMF) adalah salah satu lembaga yang memantau utang luar negeri negara. Bank Dunia menerbitkan laporan triwulanan tentang statistik utang luar negeri.

Jika suatu negara tidak dapat atau menolak untuk membayar hutang luar negerinya, maka dikatakan sebagai negara gagal bayar. Hal ini dapat menyebabkan pemberi pinjaman menahan pelepasan aset di masa depan yang mungkin dibutuhkan oleh negara peminjam. Contoh seperti itu dapat memiliki efek bergulir. Mata uang peminjam bisa runtuh, dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan akan terhenti. Kondisi gagal bayar dapat mempersulit negara untuk membayar kembali hutangnya ditambah denda yang diberikan pemberi pinjaman terhadap negara yang menunggak. Wanprestasi dan kebangkrutan dalam kasus negara ditangani secara berbeda dari default dan kebangkrutan di pasar konsumen. Ada kemungkinan bahwa

negara-negara yang gagal membayar hutang luar negeri berpotensi menghindari keharusan untuk membayarnya kembali (Bi, 2011).

6.4.2 Penggunaan Utang Luar Negeri

Dalam banyak kasus, utang luar negeri berbentuk pinjaman terikat, yang berarti dana yang dijaminakan melalui pembiayaan tersebut harus digunakan di negara yang menyediakan pembiayaan tersebut. Misalnya, pinjaman memungkinkan satu negara untuk membeli sumber daya yang dibutuhkannya dari negara pemberi pinjaman.

Utang luar negeri, terutama pinjaman terikat, mungkin ditetapkan untuk tujuan tertentu yang ditentukan oleh peminjam dan pemberi pinjaman. Bantuan keuangan semacam itu dapat digunakan untuk menangani kebutuhan kemanusiaan atau bencana. Misalnya, jika suatu negara menghadapi kelaparan parah dan tidak dapat mengamankan makanan darurat melalui sumber dayanya sendiri, negara tersebut mungkin menggunakan utang luar negeri untuk mendapatkan makanan dari negara yang memberikan pinjaman terikat. Jika suatu negara perlu membangun infrastrukturnya, ia mungkin memanfaatkan utang luar negeri sebagai bagian dari kesepakatan untuk membeli sumber daya, seperti bahan untuk membangun pembangkit listrik di daerah yang kurang terlayani (Azam, Muhammad; Emirullah, Chandra, Prabhakar, A.C.; Khan, 2013).

Selama ini baik melalui media massa sering dijumpai kasus di mana seseorang mengalami masalah pembayaran kartu kredit atau hipotek dan perlu menyusun rencana pembayaran untuk menghindari kebangkrutan. Apa yang dilakukan seluruh negara ketika mengalami masalah utang yang serupa? Bagi sejumlah negara berkembang, menerbitkan utang negara adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan dana, tetapi keadaan bisa memburuk dengan cepat. Bagaimana negara-negara menangani hutang mereka sambil berjuang untuk tumbuh? Sebagian besar negara - dari mereka yang mengembangkan ekonomi hingga negara terkaya di dunia - mengeluarkan hutang untuk membiayai pertumbuhan mereka. Ini mirip dengan bagaimana sebuah bisnis akan mengambil pinjaman untuk membiayai proyek baru, atau bagaimana sebuah keluarga mungkin mengambil pinjaman untuk membeli rumah. Perbedaan besar adalah ukuran; pinjaman hutang pemerintah kemungkinan akan menutupi miliaran dolar sementara pinjaman pribadi atau bisnis pada saat itu bisa menjadi cukup kecil.

Utang pemerintah merupakan janji pemerintah untuk membayar mereka yang meminjamkan uang. Itu adalah nilai obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara itu. Perbedaan besar antara hutang pemerintah dan hutang pemerintah adalah hutang pemerintah diterbitkan dalam mata uang domestik, sedangkan hutang pemerintah diterbitkan dalam mata uang asing. Pinjaman tersebut dijamin oleh negara penerbit (Anidiobu, Gabriel A.; Okolie, 2016).

Sebelum membeli utang pemerintah, investor menentukan risiko investasi. Utang beberapa negara, seperti Amerika Serikat, umumnya dianggap bebas risiko, sedangkan utang negara berkembang atau negara berkembang memiliki risiko lebih besar. Investor harus mempertimbangkan stabilitas pemerintah, bagaimana rencana pemerintah untuk melunasi utangnya, dan kemungkinan negara tersebut gagal bayar. Dalam beberapa hal, analisis risiko ini mirip dengan yang dilakukan dengan utang korporasi, meskipun dengan utang negara terkadang dapat dibiarkan lebih terekspos secara signifikan. Oleh karena risiko ekonomi dan politik untuk utang negara berkembang lebih besar daripada utang dari negara maju, utang tersebut seringkali diberi peringkat di bawah status aman dan dapat dianggap di bawah peringkat investasi.

6.4.3 Penerbitan Utang Luar Negeri

Investor lebih memilih investasi dalam mata uang yang mereka kenal dan percayai, seperti dolar AS dan pound sterling. Hal ini yang menyebabkan negara maju dapat menerbitkan obligasi dalam mata uang mereka sendiri. Mata uang negara berkembang cenderung memiliki track record yang lebih pendek dan mungkin tidak stabil, yang berarti akan ada permintaan yang jauh lebih sedikit untuk hutang dalam mata uang mereka (Chung, 2010).

Negara berkembang dapat dirugikan dengan utang luar negeri ini, seperti halnya investor dengan profil kredit yang buruk, harus membayar suku bunga yang lebih tinggi dan menerbitkan utang dalam mata uang asing yang lebih kuat untuk mengimbangi risiko tambahan yang diasumsikan oleh investor. Namun, sebagian besar negara tidak mengalami masalah pembayaran. Masalah dapat muncul ketika pemerintah yang tidak berpengalaman menilai terlalu tinggi proyek yang akan didanai oleh hutang dengan membesar-besarkan penerimaan yang akan dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi, menyusun hutang mereka sedemikian rupa sehingga pembayaran hanya layak dalam keadaan ekonomi terbaik, atau jika ditukar tarif membuat pembayaran dalam denominasi mata uang terlalu sulit. Negara berkembang yang memiliki kemampuan membayar hutang akan mempunyai reputasi yang kuat dan dapat

digunakan investor saat mengevaluasi peluang investasi di masa depan. Seperti halnya negara-negara yang menerbitkan utang negara ingin membayar kembali utangnya sehingga investor dapat melihat bahwa mereka dapat melunasi pinjaman berikutnya (Malik, Shahnawaz; Hayat, Muhammad Khizar; Hayat, 2010).

6.4.4 Gagal Bayar dan Penyebabnya

Gagal bayar utang negara lebih kompleks daripada gagal bayar utang perusahaan karena aset tidak bisa disita untuk membayar kembali. Sebaliknya, persyaratan utang akan dinegosiasikan ulang, seringkali membuat pemberi pinjaman dalam situasi yang tidak menguntungkan, jika bukan kerugian keseluruhan. Dengan demikian, dampak dari default dapat jauh lebih luas jangkauannya, baik dari segi dampaknya terhadap pasar internasional maupun dari pengaruhnya terhadap populasi negara. Pemerintah yang gagal bayar dapat dengan mudah menjadi pemerintahan dalam kekacauan, yang dapat menjadi bencana bagi jenis investasi lain di negara penerbit.

Pada dasarnya, default akan terjadi ketika kewajiban hutang suatu negara melebihi kapasitasnya untuk membayar. Ada beberapa keadaan di mana ini bisa terjadi dalam tiga kondisi. Pertama adalah selama krisis mata uang. Mata uang domestik kehilangan konvertibilitasnya karena perubahan cepat dalam nilai tukar. Menjadi terlalu mahal untuk mengubah mata uang domestik ke mata uang yang mengeluarkan hutang. Kondisi kedua adalah mengubah iklim ekonomi. Jika negara sangat bergantung pada ekspor, terutama pada komoditas, penurunan permintaan luar negeri yang signifikan dapat menurunkan PDB dan membuat pembayaran kembali mahal. Jika suatu negara menerbitkan utang negara jangka pendek, negara itu lebih rentan terhadap fluktuasi sentimen pasar. Kondisi ketiga adalah politik dalam negeri. Risiko gagal bayar sering dikaitkan dengan struktur pemerintah yang tidak stabil. Partai baru yang merebut kekuasaan mungkin enggan memenuhi kewajiban hutang yang dikumpulkan oleh para pemimpin sebelumnya.

Beberapa contoh kasus di mana negara-negara terlibat dalam utang. Pertama adalah Korea Utara pada tahun 1987 di mana pasca perang memerlukan investasi yang besar untuk memulai pembangunan ekonomi. Pada tahun 1980 mereka gagal membayar sebagian besar utang luar negerinya hampir \$ 3 miliar. Pengeluaran militer yang signifikan menyebabkan penurunan pendapatan nasional negara dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang belum dibayar.

Kasus kedua dialami oleh Rusia pada tahun 1998. Sebagian besar ekspor Rusia berasal dari penjualan barang, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. Kegagalan Rusia mengirimkan sentimen negatif ke seluruh pasar internasional karena ternyata kekuatan internasional dapat mengalami gagal bayar. Kasus ketiga dialami oleh Argentina pada tahun 2002. Ekonomi Argentina mengalami hiperinflasi setelah mulai tumbuh pada awal 1980-an, tetapi berhasil menjaga keseimbangan dengan mematok mata uangnya ke dolar AS. Resesi pada akhir 1990-an mendorong pemerintah untuk gagal bayar utangnya pada 2002, dengan investor asing kemudian berhenti memasukkan lebih banyak uang ke dalam ekonomi Argentina (Panizza, Ugo; Sturzenegger, Federico; Zettelmeyer, 2009).

Bab 7

Perusahaan Non Koperasi BUMS, BUMN dan BUMD

7.1 Pendahuluan

Setiap negara sangat memerlukan kegiatan-kegiatan produktif dalam menggerakkan ekonomi, untuk itu badan usaha memiliki peranan penting dengan kegiatan operasional yang dilakukan. Perkataan badan usaha yang dikaitkan dengan kata bisnis atau perusahaan pada pandangan setiap orang adalah tidak sepenuhnya benar dan tidak juga sepenuhnya disalahkan. Hal ini karena ada badan-badan usaha yang memiliki oroentiasi pada profit *oriented*. Badan usaha ini yang sering disebut sebagai perusahaan menjalankan aktivitas perekonomian dengan beberapa unit usaha sebagai sebuah lembaga atau wadah yang memiliki payung hukum atau kekuatan legislasi untuk perlindungan usaha yang dilakukan dan eksistensinya (Harmiati and Zulkhakim, 2018).

Pelaksanaan sebuah badan usaha yang dijalankan dengan transparansi merupakan hal yang penting dalam pengelolaannya guna menciptakan lingkungan bisnis yang tepat. Untuk itu prinsip-prinsip *Good Goorporate Governance*, pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan juga harus dapat konsisten. Pada awalnya dalam perekonomian yang sederhana dan

tertutup, di mana aktivitas ekonomi dilakukan oleh para pelaku ekonomi masih sangat terbatas dan belum kompleks tetapi terjadi aktivitas perdagangan (pertukaran) maka terlihat hanya ada 2 (dua) pelaku ekonomi yang melakukan aktivitas ekonomi, yakni rumah tangga dan swasta (perusahaan) (Mahmuddin Yasin, 2002). Dalam perekonomian sederhana ini, kehadiran pemerintah belum dibutuhkan. Namun untuk pengelolaan usaha yang semakin luas, regulasi dan ketentuan lainnya memerlukan kehadiran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara.

Berdasarkan tujuannya, badan usaha terbagi menjadi dua yaitu mencari keuntungan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Meski begitu, kini tidak ada badan usaha yang benar-benar tidak menghasilkan laba karena tetap membutuhkan dana operasional (Alma et al., 2011). Keseluruhan badan usaha memerlukan modal kerja, namun tentu juga harus dapat pemasukan atau kontribusi. Indonesia saat ini memiliki badan usaha yang dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu koperasi, BUMN, dan BUMS. Pada negara Indonesia Perusahaan atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sebagai salah satu Perusahaan Non Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya (Asu and Yoga, 2017). BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal.

Perusahaan yang ada tentu secara konprehensif akan mendukung kepada perekonomian nasional. Pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pergerakan dari usaha-usaha yang ada, apakah itu perusahaan non koperasi, BUMN dan BUMD (Ikhwanisyah, Chandrawulan and Amalia, 2018). Secara keseluruhan memerlukan dukungan dari semua pihak dalam menumbuhkembangkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha pencapaian kemakmuran rakyat. Tentu hal ini juga sangat dilematis jika kebijakan tersebut tanpa di ikuti ketersediaan modal dalam pengelolaan sumber daya alam (M. Iqbal Asnawi, 2016). Karena dalam dunia usaha khususnya swasta dalam menggairahkan usaha harus diberi kesempatan dalam memperluas kesempatan usaha, kesempatan kerja dalam pengelolaannya.

Saat ini perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia telah memasuki berbagai sector kehidupan, mulai dari sector pengolahan, jasa dan perdagangan.

Perusahaan swasta yang lebih inovatif dalam pengembangan serta mengambil peluang usaha, di mana perusahaan ini ada yang nasional dan asing (Reza and Hermawansyah, 2019). Hal ini dilihat dari sisi penanaman modal yang di lakukan tentunya dapat dibagi dua jenis. Perkembangan ekonomi dunia yang semakin cenderung liberal pada pengelolaannya khususnya sector perdagangan, di mana diterapkannya pasar global bebas, namun masih banyak yang tetap menganut sistem ekonomi Keynesian.

Sistem ini dianggap sangat penting dalam kondisi ekonomi yang sedang lesuh (pertumbuhan rendah atau mengalami resesi) karena motor pertumbuhan dari sektor swasta tidak bekerja (konsumsi atau investasi swasta lesuh) (Rahayu and Budi, 2013). Dalam konsep ekonomi adanya aktivitas menimbulkan pergerakan setiap sktor, sehingga sektor swasta sebagai salah satu penggerak ekonomi dengan berbagai usaha yang dilakukan sangat penting. Untuk itu potensi sumber daya yang berkaitan dengan jenis kegiatan yang akan dijalankan merupakan sebuah hal penting dalam perekonomian nasional.

7.2 Eksistensi Perusahaan Non Koperasi/BUMS

Banyaknya badan usaha yang berjalan saat ini, dapat dibedakan dari jenis kepemilikannya atau permodalannya serta besar usahanya. Perusahaan non Koperasi yang dibicarakan dalam hal ini adalah usaha yang menjalankan kegiatan dengan regulasi yang secara utuh dimiliki oleh seorang atau kelompok yang disebut dengan badan usaha milik swasta atau BUMS. Menurut kepemilikan, perusahaan-perusahaan non-koperasi di Indonesia terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN (Mochamad Muslih, 2019). Perusahaan Non Koperasi dapat dilihat dari skala usahanya yaitu kecil, menengah dan besar. Sedang yang terkait langsung dengan pemerintah disebut dengan BUMN dengan kepemilikan oleh Negara. Sedang perusahaan swasta dengan kepemilikan dari warga Negara Indonesia sebagai Perusahaan Swasta Nasional dan kepemilikan atau modal dari luar Negara disebut Perusahaan swasta asing.

Dilihat dari jumlah unit usaha, data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia didominasi oleh UK yang jumlahnya jika digabungkan dengan UM

(sebut UKM) mencapai lebih dari 90% dari jumlah perusahaan yang ada (Candra and K, 2015). Oleh karena mereka merupakan pencipta kesempatan kerja terbesar di Indonesia. BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.

Peran sektor swasta dinilai masih dibutuhkan dalam pembangunan nasional, bahkan perlu ditingkatkan. Pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai berbagai proyek strategis, sementara hasil yang diharapkan dari proyek tersebut dibutuhkan segera mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat. Sektor swasta berdiri karena melihat peluang yang ada terutama sumber daya alam dan tentunya harus sesuai dengan regulasi pemerintah.

Persaingan usaha yang sehat dapat mewujudkan kegiatan usaha yang lebih kompetitif bagi para pelaku ekonomi nasional, yaitu perusahaan negara, perusahaan swasta dan koperasi. *Monopolization activity* yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kelompok usaha besar menyebabkan pemusatan produksi dan pemasaran yang bersifat monopolistis (Indrati Rini, 2002). Pelaku usaha besar atau konglomerat seyogyanya bertindak wajar, tidak menghambat pelaku usaha lain terutama pengusaha ekonomi lemah. Memang kekuatan ekonomi nasional dan global memengaruhi partisipasi dan kesempatan untuk berusaha secara sehat. persaingan usaha yang sehat sebenarnya dapat diwujudkan tidak saja oleh sektor swasta tetapi juga sektor Pemerintah dan koperasi. Oleh karena itu, perlu dicermati sejauhmana legitimasi dan eksistensi BUMN/D, perusahaan swasta dan koperasi berkiprah.

Namun perlu diingat, hubungan yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu. Disinilah peran dan fungsi pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan diperlukan. Sebagaimana kita sadari bahwa sudah jelas dengan adanya keterlibatan pihak swasta adalah untuk meraih keuntungan sebagai konsekuensi dalam pembangunan (A. Hardjana, 2008). Kehadiran pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi perlu lebih dipertegas dengan pengawasan yang lebih baik khususnya dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Banyak kebocoran yang terjadi dalam proses kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara, misalnya modal kerja yang dilakukan dari pinjaman perbankan, namun dalam penyelesaiannya terjadi kemacetan bahkan gagal bayar. Hal ini gambaran bagaimana pengawasan yang dilakukan dari

proses rekomendasi pihak pemerintah atas pengusulan pinjamannya dalam modal kerja.

Dalam eksistensi perusahaan swasta ini juga tidak kalah penting bagi kelancaran pembangunan, jika dilakukan sesuai dengan regulasi dan aturan kegiatan yang ada. Banyak usaha-usaha yang dijalankan perusahaan swasta yang dijalankan dengan pola kemitraan guna mendukung pergerakan usaha yang dijalankan oleh semua pihak. Tentunya hal ini dapat terjadi jika ada kesepakatan dan hubungan yang saling menguntungkan dan dijalankan sesuai aturan. Misalnya pekerjaan pemerintah yang dijalankan oleh pihak swasta, tentu dalam prosesnya tahapan serta aturan kerja yang di sepakati sesuai maka terjadi pelaksanaan, dan disinilah kehadiran pengawasan dari pemerintah sebagai pemegang regulasi. Jika memang tidak sesuai ada peringatan dan sanksi yang diberikan.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan akan memberi penguatan kepada Perusahaan Non Koperasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Swasta agar berperan penting dalam pergerakan perekonomian negara Indonesia. Untuk pemerintah diharapkan dapat mendorong berbagai kebijakan yang dapat menumbuh kembangkan BUMS dalam berusaha. Kebijakan-kebijakan ini tentu didasari oleh regulasi yang memberi peluang untuk dapat melakukan peminjaman modal, pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan serta aksesibilitas usaha. Perusahaan swasta ini jika dilihat dari jenis penanaman dan kepemilikannya saat ini adalah perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta asing. Perusahaan swasta nasional merupakan usaha yang dijalankan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, tentunya secara perlakuan negara sudah harus mengutamakan perkembangannya. Perusahaan swasta nasional yang dapat dilihat saat ini seperti PT. Indomobil, PT. Indofood, PT. Astra International dan PT. Surya Tani.

Sedangkan pihak swasta dalam hal ini memiliki fungsi untuk menjalankan usahanya dengan tetap berpatok pada keuntungan, mengola sumber daya secara efisien.



Gambar.7.1: Perusahaan Swasta Nasional
(<https://www.liputan6.com/bisnis/read>)

Manfaat swasta adalah membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat mengatasi pengangguran, sektor swasta juga membantu meningkatkan neraca perdagangan yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Kesejahteraan masyarakat suatu negara ditentukan oleh perekonomian nasional yang baik dan berkembang. Di mana perekonomian tersebut tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, namun juga dipengaruhi oleh peran pihak swasta. Sehingga perusahaan swasta yang ada juga merupakan bagian dalam perekonomian nasional, hal ini dapat kita lihat pada aktivitas yang ada di tengah-tengah masyarakat, pelaku usaha jasa, pengolahan, konstruksi, perkebunan, transportasi, perdagangan ekspor import dan usaha lainnya banyak dilakoni oleh perusahaan swasta. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam citra dan imej public, di mana usaha swasta terlihat dan kenyataannya memiliki kinerja yang lebih optimal. Sementara BUMN memiliki kinerja yang lebih rendah dari perusahaan swasta yang ada saat ini, jika di rujuk BUMN memiliki peluang permodalan dan usaha yang didukung pemerintah. Citra organisasi publik termasuk pelayanan birokrasi pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk dibandingkan dengan organisasi swasta (Tasruddin, 2018).

Untuk itu dalam perekonomian negara BUMS memiliki eksistensi yang baik mendukung pembangunan nasional. Kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah dalam meningkatkan hasil-hasil pembangunan sangat perlu ditingkatkan. Dorongan untuk pelaku usaha pihak swasta di daerah sangat penting dilakukan untuk dapat melakukan percepatan pembangunan, karena ketersediaan perusahaan swasta ini di daerah dapat memberi peluang dalam

meningkatkan perekonomian daerah sehingga perputaran uang dapat lebih cepat akibat aktivitas yang ditimbulkan oleh perusahaan swasta tersebut.

7.3 Perkembangan BUMN dan BUMD

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar pembangunan di Indonesia, untuk itu dalam perkembangannya BUMN sebagai perusahaan milik negara yang berbentuk badan hukum berdasarkan UU Perusahaan Indonesia (Indonesische Bedrijvenwet). Tahun 1927 dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 dan perusahaan-perusahaan milik negara yang didirikan berdasarkan undang-Undang Kompatibilitet Indonesia (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448). Perkembangan ini terus dilakukan dengan adanya nasionalisasi perusahaan milik Belanda pada tahun 1958 dengan UU No 86. Dalam nasionalisasi ini seluruh perusahaan milik Belanda diambil alih dan dikelola oleh pemerintah.

Dalam perjalanannya berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dibentuklah penyeragaman bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Perusahaan Negara (PN) yang berjumlah 822 PN. dengan dikeluarkannya UU No.19 Tahun 1960. Bentuk yang di buat pada masa itu sesuai amanah Undang-undang masih ada yang bentuk Perseoran terbatas adalah seperti PT. Hotel Indonesia Internasional. PT Sarinah dan usaha lainnya yang dibuat peraturan tersendiri guna menjadikan asset nasional. Salah satu usaha yang di nasionalisasi adalah perkebunan tembakau deli di Sumatera Utara.



Gambar.7.2: Nasionalisasi Perkebunan Tembakau Deli
(<http://luk.staff.ugm.ac.id/itd/tembakau/01.html>)

Banyaknya asset milik Belanda yang di nasionalisasi mengakibatkan peran BUMN semakin dibutuhkan dalam perekonomian bangsa. Tujuan nasionalisasi ini dalam perkembangan BUMN merupakan suatu kesatuan yang memberikan jasa, menyelenggarakan kepenringan umum atau social dari sisi penyerapan tenaga kerja, dan memberi pendapatan nasional. Keseluruhan modal badan usaha ini sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar dapat lebih mandiri tetapi tetap memberikan tanggung jawab kepada negara. Namun dalam perubahan kepemimpinan juga mengakibatkan pengaruh kepada optimalisasi BUMN. Pada tahun 1966 dengan TAP MPRS No.23 yang menetapkan posisi pemerintah sebagai pengarah kebijakan perekonomian nasional, bukan sebagai pemimpin badan usaha, sehingga menurunkan perlakuan BUMN dalam pemerintahan. Artinya ada hubungan yang rendah antara pemerintah dan BUMN, mengakibatkan kurang optimal dari sisi permodalan, pengarahannya usaha dan pengawasannya.

Dalam bentuk badan usaha negara di Indonesia dikenal ada tiga yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perseroan Terbatas (Persero), dan Jawatan (Perjan). Pembagian ini juga didasari oleh system permodalan yang diberikan oleh negara, Perum merupakan perusahaan yang mendapatkan modal langsung dari APBN dengan fokus pada profit dan pelayanan social (Kemenkeu, 2018). Pesero yang mengutamakan pelayanan tetapi tidak mendapat fasilitas dari pemerintah, namun usaha-usaha pemerintah mereka kerjakan dengan sharing modal dari bursa saham. Sementara Perjan, usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan modal keseluruhan dimiliki pemerintah, namun saat ini perjan sudah tidak lagi di jalankan. Jika ditilik dari sisi ekonomi, BUMN dan BUMD diperlukan sebagai unit bisnis dengan pengukuran kinerja dari laba yang di dihasilkan (Lestari Kurniawati, 2017). Semakin besar laba maka semakin baik kinerjanya, karena dalam prinsip perusahaan dalah untuk menghasilkan laba yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Namun pada tahun 1995 telah dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya UU no.1, yang menegaskan dalam BUMN negara sebagai pemilik yang memegang saham terbesar. Hal ini merupakan angin segar bagi perjalanan BUMN sehingga perkembangan BUMN yang melakukan ekspansi pada beberapa bidang usaha, dan pengelolaan di buat dalam satu kementerian Pendaayaan BUMN tahun 1998 dalam Kabinet Pembangunan VII. Sehingga BUMN muncul dengan wajah baru yang sudah langsung ditangani oleh negara.



Gambar:7.3: Kementerian BUMN Pada Tahun 1998

Sehingga keberadaan BUMN dapat berjalan sepenuhnya dengan layaknya sebuah perusahaan yang lebih profesional. Dengan adanya kementerian yang menangani dengan totalitas, fungsi corporate dan pelayanan dapat diwujudkan sebagai perwakilan negara. Tentu hal ini juga harus di ikuti oleh keberadaan daerah, di mana semenjak UU tentang otonomi daerah yang ada mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah, namun dalam biasanya tentang defenisi BUMD yang masih hanya mendukung pemerintah daerah, maka berdampak negative terhadap optimalisasinya dalam pelaksanaannya. Sehingga sampai sekarang perkembangan BUMD sangat miris kita melihatnya, karena lebih mengutamakan kepentingan politik dari kepala daerah.

Berbeda dengan BUMN yang sudah jelas maksud dan legislasinya dalam regulasi negara kita. Sehingga percepatan implementasi BUMN lebih cepat daripada BUMD. Dalam perkembangan Badan Usaha Miliki Negara dari masa ke masa, maka tahun 2001 dikordinir oleh satu kementerian Segala pengelolaanya merupakan tanggung jawab negara dengan mengangkat para personal dengan professional. Namun pada saat ini masih rentan kepentingan, sehingga konkritnya BUMN masih berjalan sarat dengan kepentingan. Hal ini tentu memperlemah posisi dan kinerja BUMN sebagai sebuah corporate government. Padahal BUMN sebuah asset yang sangat penting bagi negara, karena merupakan core bisnis yang menjalankan usaha-usaha profit.

Untuk BUMD saat ini merupakan sebuah pilar yang perlu penguatan di daerah dengan mungoptimalkan potensi daerah. Hal ini telah di dorong, apalagi

semenjak di berikannya dana hibah desa, yang di isyaratkan untuk membangun usaha desa dalam bentuk BUMDES. Sehingga dalam regulasi diharapkan ada jaminan yang mengisyaratkan daerah harus memiliki badan usaha dan di dukung oleh badan usaha desa yang saat ini sudah jelas sumber permodalannya.

7.4 Peran BUMN dan BUMD Dalam Perekonomian

Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja. Trend merubah perusahaan negara menjadi perusahaan swasta dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat yang digagas oleh Inggris menjadikan model utama dalam perubahan global dari Negara kesejahteraan (welfarestate) menjadi privatisasi atau penswastaaan BUMN dan BUMD. Tata kelola perusahaan juga merupakan salah satu unsur penting pendorong kinerja. Sejak awal tahun 2000 Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk membangun tata kelola pada Badan Usaha Milik Negara.

Dalam tatakelola tersebut tentu sangat diharapkan bagaimana BUMN dapat berperan dalam sistem ekonomi nasional, bagaimana hal ini bisa terjadi? Usaha yang dijalankan oleh BUMN akan membuka peluang kesempatan kerja, memberi multifier effect kepada masyarakat baik dari sektor bahan baku, sumber daya manusia, dan transportasi. Perkembangan BUMN yang diberi peluang akan semakin mamacu pergerakan ekonomi pada lingkungan usaha BUMN tersebut dan juga ke wilayah lainnya (Waluyo and Badan, 2004).

Semakin banyaknya peran yang dilakukan oleh BUMN akan memberi kontribusi positif dalam perekonomian bangsa Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; ketiga, bahwa pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal (Asu and Yoga, 2017). Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan

pertimbangan filosofis dan sosiologis keberadaan BUMN itu sendiri. Secara normatif pentingnya BUMN dalam sistem perekonomian nasional.

Implementasi konkrit dari peran BUMN ini dalam perekonomian nasional dapat ditunjukkan pada sektor usaha perkebunan, perdagangan, jasa, transportasi, pertambangan, energi, pengolahan/industri serta konstruksi. Banyaknya bentuk usaha yang dikerjakan oleh BUMN sesuai amanah peraturan dan peluang modal yang ada, maka sudah selayaknyalah peran serta kontribusinya bisa lebih meningkat buat negara (Mahmuddin Yasin, 2002). Seperti yang dilakukan pada era saat ini yaitu pembangunan konstruksi jalan tol, di mana peran BUMN PT Waskita Karya, PT Wika, PT Hutama Karya dan PT.Adhi Karya. Tentunya perusahaan swasta juga ikut andil dalam pekerjaannya, namun yang menjadi leadernya adalah BUMN, seperti pada gambar di bawah ini.



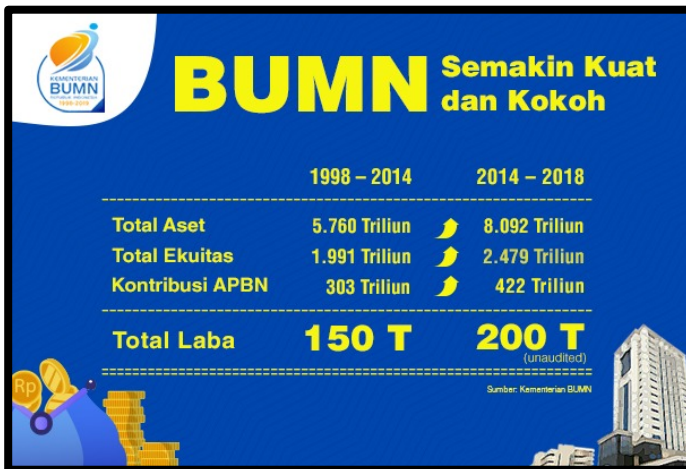
Gambar 7.4: BUMN Dalam Pembangunan Infrastruktur

(<https://www.trenasia.com/jalan-tol-pertama-aceh-siap-beroperasi-juni-2020/>)

Hadirnya BUMN yang memberi peluang bagi mendukung pembangunan, salah satunya infrastruktur jalan Tol. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa pekerjaan strategis BUMN sangat berperan, diketahui jalan tol merupakan kebijakan strategis pemerintahan saat ini. Sehingga peran strategis dari BUMN sebagai pelayanan publik merupakan suatu harapan yang tidak kalah penting. Namun, kewajiban pelayanan umum ada kalanya ditugaskan oleh pemerintah kepada BUMN (Garuda and Pendahuluan, 2011).

Dengan pelaku langsung dalam ekonomi nasional, BUMN hadir memberikan arti penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai profit oriented

BUMN juga berkewajiban melakukan pelayanan umum. BUMN harus dapat melaksanakan tugas business entity yang memberi peluang bisnis dan pelayanan umum (Alif, 2014). Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham BUMN & BUMD bisa mengambil langkah – langkah yang bijaksana dalam menyikapi kondisi tersebut (Waluyo and Badan, 2004). Tentunya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk penguatan BUMN dengan sinergi BUMD akan lebih memberi peluang bagi perkembangan badan usaha plat merah tersebut. Jika dilihat dari penerimaan BUMN terjadi peningkatan yang signifikan seperti data berikut.



Gambar 7.5: Pertumbuhan Keuntungan BUMN

(<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190416/9/912481/13-april-1998-2019-bumn-hadir-membangun-indonesia>)

Pertumbuhan capaian BUMN yang ditunjukkan pada gambar di atas, tentu menjadi gambaran bagaimana kinerja secara global dari BUMN yang ada di Indonesia. Secara konprehensif negara harus hadir dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya peranan ini untuk mewujudkan kepentingan rakyat, bukan untuk mendominasi kepentingan rakyat di bidang ekonomi (Ikhwanisyah, Chandrawulan and Amalia, 2018). Seperti yang ada dalam UUD negara kita dalam pasal 33 untuk kesejahteraan rakyat. Peran ini yang harus ditunjukkan oleh negara dalam kehadiran bagi masyarakat. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah ini merupakan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang tidak terpisahkan, disamping ada usaha BUMS dan koperasi (Yansyab, 2009).

Dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan sistem demokrasi ekonomi BUMN dan BUMD serta BUMS dan Koperasi secara bersama ikut serta dalam perlakuan ekonomi nasional baik bidang perdagangan, konstruksi, pertanian, pariwisata, Industri, dan jasa lainnya. Namun yang sering menjadi permasalahan menarik adalah keberadaannya menjadi unik karena amanat UU diberlakukan dengan UU Otonomi daerah, menjadikan keberadaannya unik, variatif dan berat dalam bersaing (Albrecht, 2013). Karena dia masuk dalam rangka pemerintahan daerah, namun tujuannya adalah untuk menguatkan perekonomian daerah. Perlu disadari bahwa dengan amanah UU tersebut BUMD belum optimal siap sebagai sebuah *coorporate* yang berdaya saing, sehingga permasalahan ini menjadi ganjalan dalam pengembangannya (Soit, 2000). Saat ini BUMD lebih cenderung dibebani dengan berbagai tugas politis kepala daerah sehingga tidak produktif, bahkan mendistorsi kegiatan utama dari jenis usaha yang dibuat, misalnya sebagai pendukung kegiatan olah raga dan lain sebagainya yang tidak ada kaitan langsung dengan *core business* yang di buat.

Sehingga pendapatan yang diperoleh BUMD bias untuk kepentingan populis kepala daerah yang mengakibatkan menurunnya tingkat efesiensi usaha. Senahagian besar dari BUMD menderita kerugian karena dikelola tidak efisien dan produktivitas yang rendah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam persaingan di pasar domestik maupun Internasional (Sidik, 2015). Semenjak BUMD ada, banyak persoalan dan tantangan besar yang sering dihadapi karena *political will* yang ridak komit dari pemilik perusahaan dalam hal ini Kepala Daerah. Memang ada beberapa BUMD yang berjalan standart, namun belum bisa membentuk sebuah imej bahwa BUMD hadir untuk menoptimalkan potensi daerah.

Jika dilihat penyebab pengelolaan BUMD yang tidak optimal adalah; a.mayoritas BUMD tidak memiliki budaya perusahaan yang sesuai dengan "Coorporate Culture"; kurangnya jiwa *enterpreneurship* para sumber daya manusia yang berada dalam usaha; kaburnya wewenang legislasi yang diberikan, karena dalam keberadaan UU otonomi daerah; dan tidak dikelola dengan prinsip manajemen bisnis yang baik dengan konsep Good Corporate Governance (GCG), karena campur tangan pemilik atau pemerintah dalam operasionalnya (Rifai, 2014).

Namun yang paling essential adalah terkait dengan social accountabilitynya, di mana dukungan politik yang memberi pengaruh besar dalam optimalisasi BUMD ini bisa berjalan dengan baik (Ilham Aldelano Azre, 2017).

Kepentingan politik sehingga pelaku dari BUMD tidak dapat berbuat banyak sesuai dengan GCG. Dalam perjalanannya BUMD harus dapat melakukan perubahan-perubahan yang drastis bagi menuju kompetisi bisnis. Tuntutan kualitas, teknologi, dan globalisasi atau internasionalisasi pasar juga harus dihadapi BUMD. Konsep GCG yang dilakukan semestinya dapat berjalan untuk mengatasi permasalahan dalam perekonomian Indonesia .

Dalam penataan BUMN dan BUMD telah di buat pedoman tentang pemegang saham sampai pola rekrutmen dan pertanggungjawaban dengan prinsip GCG. Tentu hal ini dilakukan guna mereduksi permasalahan-permasalahan dalam sistem perekonomian Indonesia, khususnya praktik-paraktik curang yang mengarah ke korupsi yang menimbulkan kerugian negara (Hartono, 2005). Proteksi dini yang dilakukan tujuannya untuk mengawal perjalanan BUMN dan BUMD yang ada saat ini.

7.5 Tantangan dan Peluang BUMN dan BUMD

Perkembangan digital membawa gelombang revolusi industri 4.0. Harus terjun atau tidak menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi seluruh pelaku industri. Dari perusahaan besar ataupun kecil, jika ingin kompetitif dengan perusahaan lain harus mengikuti gelombang revolusi tersebut. Perubahan pola perdagangan dengan kesepakatan yang berlaku, di mana pasar global telah terjadi dengan adanya perjanjian MEA, AFTA, dan World Trade Organization (WTO) (Eva, 2007). Hal ini menjadi tantangan bagi peluang BUMN dan BUMD Indonesia, di mana kesepakatan pasar bebas yang memungkinkan pihak luar berusaha di Indonesia.

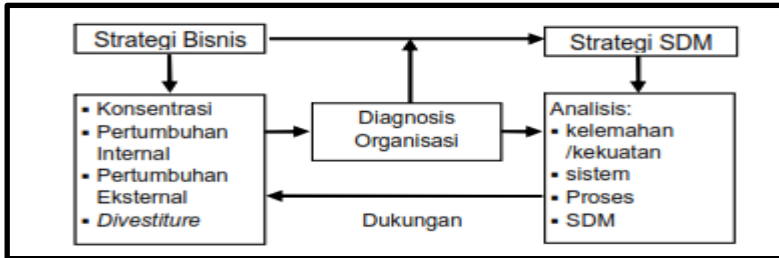
Tentu kemajuan era revolusi industri yang sudah memasuki level 5.0 akan memerlukan kesiapan penguatan kelembagaan, regulasi dan sumber daya manusia. Keharusan bertransformasi bagi badan usaha non koperasi yang ada di Indonesia menghadapi perubahan secara global untuk menjadikan kekuatan negara dan daerah (Abdullah, 2012). Untuk itu diperlukan sinergitas semua pihak, menjadi bagian penting yang harus dilakukan. Kesiapan pegawai BUMN dan BUMD harus lebih profesional dengan iklim kerja *cooperate*, bukan lagi menunggu perintah kerja, namun harus mampu berinovasi dan

kreatif (Nawawi, 2010). Dengan ide-ide yang "out of the box" dalam mengejar ketertinggalan pasar global.

Seperti dijelaskan di atas sebelumnya, BUMD menjadi terhalang dalam melakukan permodalan, sebab dalam regulasinya BUMD hanya sebagai penopang, dengan keterbatasan modal kerja melakukan usaha di daerah. Untuk itu dalam pengembangannya BUMD sangat terikat dengan regulasi yang tidak memberi ruang kewenangan yang totalitas. Kontribusi yang diberikan juga tidak dapat meningkatkan pendapatan daerah secara utuh. Weewngang regulasi mengakibatkan kendala sehingga kurangnya inovasi serta terobosan untuk penyehatan dan pengembangan perusahaan yang dapat dilakukan oleh BUMD (Vebiola Jesika Terok, Daisy S.M Engka, 2019).

Untuk itu perlu dikaji ulang proses perlakuan kepada BUMD agar dapat lebih leluasa menjalankan usaha di daerah. Diperlukan langkah dan strategi yang lebih mendorong aura usaha berkembang. Memperkuat peran dan wewenang bagi pengembangan potensi daerah saat ini, baik usaha menengah maupun usaha besar (Suwardi and Prasetyo, 2018). Dengan adanya porsi wewenang dalam pengelolaan BUMN akan dapat lebih mandiri dan mengoptimalkan potensi daerah.

Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha di negara Indonesia, karena hari ini penguatan daerah sebagai pemilik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sudah saatnya ikut serta dengan dekatnya daerah kepada potensi tersebut. Kewenangan yang diberikan dalam konsep otonomi daerah tentu menjadi acuan juga bagi BUMD. Sehingga dalam konsep diagnosis organisasi dapat ditunjukkan bahwa dalam strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia harus dapat saling memberi dukungan (D'Costa, Bodolica and Spraggon, 2018). Dalam diagnosis organisasi menjadi jembatan dalam strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia. Strategi bisnis dijalankan oleh manajemen organisasi terkait dengan sumber daya manusianya untuk tujuan organisasi lebih optimal (Abdullah, 2012). Dalam menjalankan kedua strategi ini akan saling mendukung sehingga pelaksanaannya dapat menjalankan visi misi organisasi serta memiliki analisis yang kuat dari bisnis yang dilakukan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 7.6: Diagnosis Organisasi

Gambar diagnosis Organisasi digambarkan BUMN dan BUMD dalam dukungan harus jelas bagaimana kompetensi sumber daya manusia dan proses yang tidak ada tendensius politik. Permasalahan pada BUMN dan BUMN yang menjadi tantangan adalah memberi pemilahan peran pemerintah dan korporasi. Sehingga dalam prosesnya perusahaan ini dapat lebih mengutamakan profit *oriented* dan mendukung sumber pemasukan secara nasional maupun daerah (Lasmarita Nugra Gesty*, 2016). Saat ini setelah di berikan wewenang pada daerah otonomi, tentu konsistensi desentralisasi manajemen BUMD harus lebih profesional menyangkut penempatan dan rekrutment sumber daya manusia (Yansyab, 2009). Jika memang harus mendatangkan tenaga kerja yang mumpuni dari luar daerah harus bersikap konsisten demi memajukan perusahaan. Kompetitif worker yang harus dibangun, agar ketersediaan tenaga kerja di daerah juga harus dipersiapkan.

Dengan tuntutan kemajuan saat ini BUMN dan BUMD harus mampu bersaing dengan pasar global dalam membatu negara memberikan pendapatan. Khususnya BUMD yang menjadi pilar bagi mengembangkan usaha dengan pendekatan potensi daerah dan wilayah. Tentu diperlukan *political will* dari semua pihak dalam menghadapi tantangan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Perubahan yang harus dilakukan pada struktur organisasi, metode job posting dan pola rekrutment.

Bab 8

Ekonomi Koperasi

8.1 Pendahuluan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak akhir abad 19 yaitu sekitar tahun 1896 dipelopori oleh R Arya Wiria Admaja. Tetapi dengan dilaksanakan kongres I di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 secara resmi gerakan koperasi Indonesia memperingati sebagai hari Koperasi Indonesia (Subandi,2019). Koperasi yang berkembang di Indonesia merupakan suatu sistem tersendiri dalam kehidupan ekonomi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menjadi salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan ekonomi. Sehingga keberadaan koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Keberadaan koperasi di Indonesia telah dinyatakan dan diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bentuk badan usaha yang mampu memenuhi kebutuhan anggota serta memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan budaya kekeluargaan dan sifat gotongroyong yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

8.2 Pengertian

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pertimbangan dengan menetapkan Undang-Undang tentang Perkoperasian ini, Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha ikut berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Bangsa Indonesia telah memiliki budaya kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan wujud pelaksanaan dari Sila kelima Pancasila, hal ini sangat sesuai dengan gerakan ekonomi yang telah dilaksanakan di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan" dalam hal ini yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Secara etimologis koperasi berasal dari bahasa Inggris (co-operation), co berarti bersama-sama, sedangkan operation berarti usaha untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi koperasi menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut :

1. Mohammad Hatta Bapak Koperasi Indonesia, (1994) bahwa :

"koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong "seorang untuk semua dan semua untuk seorang".

2. Dr. Charles Ryle Fay

Seorang sejarawan ekonomi Dr. Charles Ryle Fay dalam *Co-operation at Home and Abroad: a Description and Analysis* (1908) menuliskan koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

3. RM Margono Djohadikoesoemo

Tokoh koperasi ini menjelaskan, sebagaimana dalam 10 Tahun Koperasi (1930-1940) (2013), koperasi merupakan sebuah perkumpulan manusia yang dengan kemauannya sendiri bersedia untuk bekerja sama dalam upaya memajukan ekonominya.

4. Dr. G Mladenata

Menurut Dr.G.Mladenata dalam bukunya "Historie Desdactrines Cooperative" bahwa koperasi merupakan kumpulan dari produsen yang bersama-sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, bersedia untuk tukar jasa secara kolektif dan bersedia dalam menanggung resiko bersama, serta melakukan sumber-sumber kegiatan yang diberikan oleh anggota.

5. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Menurut KBBI menyatakan Koperasi adalah berupa perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan cara menjalankan barang keperluan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dan tidak bermaksud mencari keuntungan.

6. ILO (Internasional Labour Organization)

Menurut ILO atau organisasi buruh internasional, koperasi merupakan kumpulan orang-orang dengan berdasarkan pada sifat sukarela dengan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dan berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Selain itu terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan di mana tiap anggota koperasi akan menerima resiko dan menerima manfaat secara seimbang (Edilius & Sudarsono, 1993).

Berdasarkan definisi dari para ahli tentang koperasi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah merupakan organisasi ekonomi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang atau badan usaha yang melaksanakan usaha dengan sukarela dan setiap anggota akan menerima manfaatnya dan resiko secara seimbang.

8.3 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

8.3.1 Landasan

Sebagai organisasi ekonomi dalam melaksanakan kegiatannya yang merupakan landasan dan asas koperasi terdiri dari tiga hal sebagai berikut (Baswir,1997):

- a. Unsur landasan idiil yang menentukan arah dan perjalanan usaha koperasi, adalah pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa.
- b. Unsur landasan koperasi yang meliputi semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa Indonesia benar-benar dihayati dan diamalkan, Landasan ini juga dinamakan landasan struktural
- c. Adanya keinginan untuk hidup dengan mengutamakan gotong royong antar sesama manusia serta memiliki kesadaran sebagai makhluk sosial dengan berjiwa harus bersedia bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar ini disebut dengan asas koperasi.

Landasan koperasi Indonesia digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam gerakan ekonomi dan sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut : a) Landasan idiil adalah Pancasila, b) Landasan Struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945.

8.3.2 Asas Koperasi

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 2 telah ditetapkan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

8.3.3 Tujuan Koperasi

Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana tertuang dalam BAB II Pasal 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992, berbunyi :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan koperasi secara garis besar meliputi 3 hal (Subandi, 209) yaitu :

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional

8.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi sebagai penjabaran dari asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dianut oleh koperasi. Hal ini yang membedakan dengan bentuk badan usaha yang lain terletak pada landasan dan asas yang dimiliki oleh koperasi.

8.4.1 Prinsip Koperasi Rochdale

Prinsip koperasi Rochdale menjadi contoh dan pedoman bagi seluruh gerakan koperasi di dunia. Faugent (1951) mengatakan bahwa setidaknya ada empat prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang dinamakan koperasi.

Keempat prinsip tersebut adalah :

1. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota
3. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi

4. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

Prinsip koperasi disebut juga dengan sendi-sendi dasar koperasi, hal ini juga merupakan pedoman pokok yang harus menjiwai pada setiap kegiatan dalam pengelolaan dan usaha koperasi. Peranan yang dimiliki koperasi secara garis besar adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuan bersama
2. Sebagai ciri-ciri khas koperasi

The Principle of Rochdale atau prinsip-prinsip koperasi yang telah digunakan oleh koperasi di berbagai negara dalam prinsip pendiriannya terdapat enam prinsip yang dijalankan adalah sebagai berikut: (a) barang yang dijual adalah harus asli dan sesuai takaran; (b) penjualan barang yang dilakukan secara tunai; (c) harga penjualan mengikuti harga yang ada di pasaran; (d) sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota sesuai pertimbangan jumlah pembelian masing-masing anggota; (e) setiap anggota mempunyai hak satu suara; (f) setiap anggota netral dalam politik dan keagamaan. Di dalam perkembangannya prinsip Rochdale ditambah beberapa prinsip, yaitu (a) adanya pembatasan bunga atas modal yang dimiliki, (b) keanggotaan bersifat sukarela, (c) semua anggota ikut serta menyumbang dalam permodalan.

8.4.2 Prinsip Koperasi menurut ICA

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan kongres International Cooperative Alliance (ICA) yang telah dilaksanakan di London pada tahun 1934 terdapat kesepakatan tentang rumusan prinsip koperasi yaitu; 1) Keanggotaan bersifat sukarela ; 2) Pengawasan dilakukan secara demokratis; 3) Pembagian SHU didasarkan partisipasi masing-masing dalam usaha koperasi; 4) Bunga yang terbatas atas modal; 5) Netral dalam lapangan politik; 6) Tata niaga yang dijalankan secara tunai ; 7) Menyelenggarakan pendidikan.

Kemudian dalam pelaksanaan sidang di Paris pada tahun 1937 juga dalam pelaksanaan kongres di Praha tahun 1948, ICA menetapkan keempat prinsip koperasi yang pertama dalam anggaran dasarnya ditetapkan sebagai prinsip ICA.

Pelaksanaan kongres ICA pada tahun 1963 bertempat di Bournemouth telah disusun sebuah komisi yang mempunyai tugas untuk meninjau dan mempelajari prinsip yang berlaku pada seluruh anggota ICA diberbagai negara. Kemudian hasil kerja dari komisi ini dibawa saat kongres ICA ke 23 di Wina pada tahun 1966, dengan rumusannya sebagai berikut : a) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela; b) koperasi harus diselenggarakan secara demokratis; c) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya; d) sisa hasil usaha jika ada yang berasal dari usaha harus menjadi milik anggota; e) koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota, pengurus, pegawai koperasi serta kepada warga masyarakat; f) seluruh organisasi baik tingkat lokal sampai tingkat nasional hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal maupun internasional.

8.4.3 Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip koperasi di Indonesia telah tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No 25/1992, disebutkan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi adalah mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berwatak sosial.

Prinsip koperasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

Koperasi merupakan sekumpulan orang-orang atau badan yang memiliki sifat sukarela untuk menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan dari siapapun. Koperasi juga memiliki sifat terbuka berarti bahwa dalam keanggotaan tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Koperasi merupakan perkumpulan demokratis yang dilakukan oleh para anggota dengan melaksanakan pengelolaan berdasarkan kehendak dan keputusan para anggota.

- c. Pembagian SHU secara adil sebanding dengan jasa yang diberikan

Dalam pembagian sisa hasil usaha yang dibagikan kepada para anggota dilakukan bukan semata-mata karena besar modal yang dimiliki pada koperasi,

tetapi juga mempertimbangkan besaran jasa usaha yang diberikan oleh anggota tersebut kepada koperasi.

d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal

Modal koperasi yang berasal dari para anggota dapat pula dipergunakan untuk kepentingan dan pemanfaatan bagi anggota bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu dalam memberikan balas jasa kepada anggota juga terbatas., dan tidak semata-mata pada besarnya modal yang diberikan. Maksud dari terbatas, adalah pada hal yang wajar dalam arti nilainya tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e. Kemandirian.

Maksudnya adalah bahwa koperasi dalam usahanya dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain serta memiliki tanggung jawab, otonomi, swadaya dan berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

Dalam usaha untuk mengembangkan koperasi, juga dilaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerjasama antar anggota

8.5 Fungsi dan Peran Koperasi

Awal pendirian koperasi dimaksudkan untuk membantu para petani dari permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak. Hal ini terjadi pada awal revolusi industri di Eropa, dengan harga barang hasil pertanian yang dipermainkan oleh para tengkulak, juga kaum buruh yang diabaikan oleh kaum kapitalis (Subandi, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam tiga aliran. Sebagaimana dikemukakan oleh Casselman (1989), ketiga aliran tersebut adalah :

1. Aliran Yardstick, sebagaimana yang dikemukakan bahwa aliran ini menyatakan sebagai fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya menjadi kekuatan untuk melakukan keseimbangan dan menetralsir kondisi ekonomi serta sebagai koreksi atas keburukan pada sistem kapitalisme.
2. Aliran Sosialis, sebagaimana yang dikemukakan bahwa aliran ini menyatakan bahwa fungsi dan peranan koperasi dipandang sebagai alat yang mampu dan efektif dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta dapat mempermudah untuk menyatukan rakyat dengan organisasi koperasi.
3. Aliran Persemakmuran, memandang koperasi sebagai alat yang dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat secara efektif dan efisien. Bagi masyarakat yang menganut aliran ini akan memberikan pendapatnya, bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam pemanfaatan potensi ekonomi rakyat, serta mampu berperan dalam mencapai kemakmuran masyarakat.

8.5.1 Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial

Pada dasarnya dalam melakukan usahanya koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial.

Adapun fungsi bidang ekonomi adalah sebagai berikut : a) menumbuhkan fungsi untuk berusaha yang lebih berperikemanusiaan, b) mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil, c) memerangi monopoli, d) menawarkan penjualan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, e) meningkatkan penghasilan para anggota, f) menyederhanakan dan efisiensi tata niaga, g) menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan usaha, h) menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, i) melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

8.5.2 Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

Usaha koperasi dalam bidang sosial adalah sebagai berikut ; a) mendidik para anggotanya memiliki semangat dalam bekerja, b) mendidik para anggotanya untuk semangat berkorban sesuai dengan kemampuan masing-masing, c) mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, d) mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai.

8.6 Pengelompokan Sesuai Bidang Usaha Koperasi

Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, adalah sebagai berikut ;

1. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang dijalankan memiliki usaha dibidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggota.
2. Koperasi Produksi, adalah koperasi yang memiliki usaha utamanya dengan memproses bahan baku menjadi barang jadi.
3. Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang dibentuk untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan.
4. Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang melaksanakan usahanya dengan pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan sebagai bantuan modal untuk usahanya.

8.7 Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi

Prof. Ewell P.Roy (Hendrojogi, 2000) mengatakan bahwa manajemen dari koperasi itu melibatkan empat unsur atau perangkat, yaitu Anggota, Pengurus, Manajer dan Karyawan. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 alat kelengkapan organisasi koperasi terdiri tiga unsur, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi. Sebagai lembaga ekonomi yang memiliki usaha di mana anggota koperasi juga berfungsi sebagai pemilik, produsen dan pemasok barang-barang dagangan serta sebagai konsumen atau pembelinya. Sebagai anggota koperasi semua dituntut untuk ikut serta secara aktif dalam mengelola usahanya, sehingga peran masing-masing anggota diharapkan pada koperasi yang telah dibangun akan menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan dengan yang cita-citakan.

8.7.1 Rapat Anggota

Keberhasilan koperasi tidak lepas daripada partisipasi anggota, agar dapat menjalankan kegiatan dengan baik, maka koperasi harus memiliki alat kelengkapan organisasi. Dengan adanya pilar-pilar yang diupayakan dapat menentukan perkembangan koperasi, maka disebutkan bahwa Rapat Anggota menjadi salah satu pilar ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Sebagaimana disebutkan pada UU No 25 Tahun 1992 Bab VI pasal 21 sampai pasal 28.

8.7.2 Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi adalah anggota yang terpilih dan mendapat kepercayaan pada rapat anggota untuk menjalankan organisasi dan usaha koperasi. Sebagai Pengurus Koperasi yang terpilih harus memiliki kemampuan dalam mengelola koperasi dan mempunyai tanggung jawab penuh akan perkembangan organisasi dan usaha koperasi.

Menurut Garayon dan Mohn (Hendrojogi, 2000) dikatakan bahwa Pengurus Koperasi mempunyai fungsi idiil (ideal function) dan karenanya Pengurus Koperasi memiliki fungsi yang luas yaitu :

1. Sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi (Supreme decision center function)

2. Sebagai pemberi nasihat (Advisory Function)
3. Sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya (Trustee Function)
4. Sebagai penjaga keseimbangan organisasi (Perpetuating Function)
5. Sebagai simbol (Symbolic Function)

8.7.3 Pengawas Koperasi.

Merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi yang diatur dalam pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992, Pengawas dipilih dalam rapat anggota dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil dari pengawasannya. Pengawas memiliki kewenangan untuk meminta keterangan yang diperlukan dari Pengurus koperasi dan pihak lain bila dianggap perlu. Dengan demikian sebagai pengawas koperasi dapat melakukan penelitian terhadap catatan kegiatan yang telah dilakukan termasuk pula akuntansi koperasi kemudian berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya kepada rapat anggota.

8.8 Arti Lambang Koperasi

Koperasi Indonesia mempunyai lambang yang biasa digunakan oleh banyak koperasi. Lambang koperasi pertama ditetapkan dalam Kongres Koperasi I di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Berbentuk pohon beringin dengan rantai, kapas dan padi, serta timbangan. Pada 2013, lambang koperasi itu diubah menjadi logo yang lebih modern dan minimalis. Dalam Peraturan Menteri No. 02/Per/M.KUKM/IV/2012, tujuan perubahan itu untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat pada koperasi.

Logo buatan Menteri Syarif Hasan itu berupa bunga teratai dengan warna dominan hijau. Tetapi setelah tiga tahun Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menganulir penggunaan bunga teratai versi pemerintah. Kemudian melalui Surat bernomor SKEP/03/Dekopin-E/I/2015 menyatakan bahwa melalui Munas Dekopin 2014 gerakan koperasi kembali kepada logo pohon beringin. Lambang koperasi Indonesia dikembalikan lagi secara resmi lewat Permen No. 1/Per/M.KUKM/II/2015.



Gambar 8.1: Logo Koperasi Indonesia

Tabel 8.1: Arti Logo Koperasi Indonesia

No	Lambang	Arti
1	Gerigi roda/ gigi roda	Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.
2	Rantai (di sebelah kiri)	Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh.
3	Kapas dan Padi (di sebelah kanan)	Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan.

4	Timbangan	Keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara “Rantai” dan “Padi-Kapas”, antara “Kewajiban” dan “Hak”. Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.
5	Bintang dalam perisai	Dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan idil koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti “tubuh”, dan Bintang bisa diartikan “Hati”.
6	Pohon Beringin	Simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunung wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab “Hayyu”/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.
7	Koperasi Indonesia	Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.
8	Warna Merah Putih	Warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia.

Bab 9

Ekonomi Kreatif

9.1 Pendahuluan

Perkembangan perekonomian sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan suatu negara atau daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal dalam mencapai kesejahteraan tetapi juga mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Todaro, mengatakan bahwa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pemanfaatan sumber daya maksimal (Todaro and Smith, 2003). Hal senada dikemukakan Kuncoro, bahwa kapasitas sumber daya alam suatu daerah menggambarkan kemampuan potensi penerimaan daerah (Kuncoro, 2004). Selanjutnya, menurut Adam Smith, mengatakan bahwa kemakmuran akan tercapai manakala manusia sebagai dalang utama dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya (Jhingan, 2008). Berbagai konsep tersebut, menunjukkan keterkaitan antar sumber daya alam dengan sumber daya manusia sangat penting dalam perekonomian suatu negara atau daerah.

Indonesia merupakan negara yang tingkat keanekaragaman makhluk hidupnya sangat tinggi, yang mana beberapa ahli ekologi menyebut wilayah ekologi Indonesia dengan istilah “Mega Biodiversity”. Indonesia juga seringkali dikenal dengan sebutan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor (pemilik modal). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki seperti : minyak bumi, timah, gas alam, nikel,

kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, perak dengan dominasi lahannya adalah hutan.

Selain itu, Indonesia di kawasan Asia Tenggara cukup terkenal sebagai Negara Kepulauan, oleh karena begitu banyak pulau tersebar di seantero negeri. Begitu luasnya kondisi geografis Indonesia, tidaklah heran jika mengandung beragam pula suku dan budaya. Di mana, kekayaan Indonesia tidak terbatas pada sumber daya alam yang melimpah ruah, akan tetapi diperkaya juga dengan kemajemukan budaya sebagai salah satu elemen pemersatu bangsa. Kekayaan sumber daya yang dimiliki, sangat berpotensi terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, dalam berbagai aspek ekonomi bahkan dengan memanfaatkan kemampuan intelektual manusia.

9.2 Pengertian Ekonomi Kreatif

Howkins, dalam United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) melihat ekonomi kreatif sebagai proses penciptaan, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan input utamanya kreativitas dan intelektual (Trade and Development, 2008). Ekonomi kreatif merupakan konsep yang digunakan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kreativitas. Kreativitas lahir dari pemanfaatan sumber daya yang terbarukan dan tidak terbatas (Purnomo, 2016). Ginting, mengatakan bahwa modal utama yang diandalkan dalam ekonomi kreatif adalah sumber daya insani, terutama untuk proses penciptaan, kreativitas, keahlian dan talenta individual (Ginting and others, 2017).

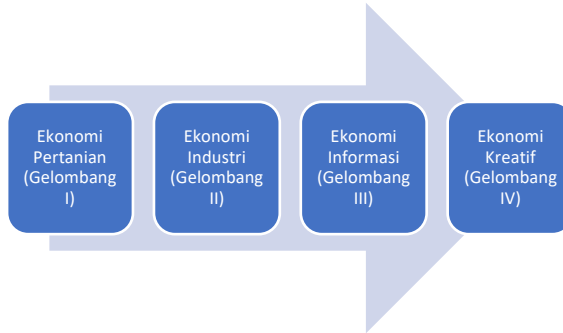
Berbagai definisi ekonomi kreatif di atas, menuntun pada kesimpulan bahwa dalam menghasilkan produk yang kreatif, tidak terbatas pada fisik bahan baku (input), melainkan dibutuhkan daya cipta, daya kreasi dan inovasi seiring perkembangan teknologi yang terus maju. Ekonomi kreatif juga mampu mengembangkan kewiraswastaan sekaligus sebagai solusi terhadap semakin menipisnya cadangan sumber daya alam. Indonesia sesungguhnya memiliki potensi dari sisi input yang mampu menghasilkan (output) berbagai jenis barang dan jasa yang memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan kreativitas dan intelektualitas.

9.3 Kilas Ekonomi Kreatif

John Howkins, sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan konsep ekonomi kreatif melalui bukunya *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*, di mana beliau mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang muncul dari kreativitas yang bertumpu pada aspek budaya dan lingkungan. Proses terlahirnya nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah kepada suatu perekonomian (Howkins, 2002). Munculnya Ekonomi Kreatif di Indonesia, sebenarnya sudah sejak lama dengan istilah mula-mula Ekonomi Industri dan Ekonomi Informasi, setelah Howkins memperkenalkan Ekonomi Kreatif tahun 2001 barulah dikenal istilah Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif mulai terkenal pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Indonesia, 2009).

Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) No.72 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No.6 Tahun 2009 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah melakukan klasifikasi terhadap subsektor ekonomi kreatif, di mana terdapat 16 subsektor (Indonesia, 2015). Banyaknya subsektor ekonomi kreatif sehingga ekonomi kreatif dapat dikategorikan industri yang multi industri karena melibatkan berbagai jenis industri dalam upaya mewujudkan kesatuan ide sebagai kekayaan intelektual yang memiliki kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi. Dalam ekonomi, kita kenal 4 (empat) era dalam perekonomian : (1) Era Ekonomi Pertanian; (2) Era Ekonomi Industri, (3) Era Ekonomi Informasi; (4) Era Ekonomi Kreatif. Perubahan era atau masa dalam ekonomi ini, ditandai perubahan basic aktivitas masyarakat yang terjadi di setiap era atau masa. Di mana, ada keterkaitan yang sangat erat antara kebutuhan manusia dan tingkat interaksi sosialnya.

Moelyono, menyebut masa dalam perekonomian ini sebagai gelombang pergeseran orientasi ekonomi, sebagaimana gambar 9.1.



Gambar 9.1: Gelombang Pergeseran Orientasi Ekonomi (Moelyono, 2010)

9.4 Ekonomi Kreatif Di Indonesia

Ekonomi kreatif, didahului dengan kehadiran industri berbasis kreativitas yang muncul pada era ekonomi informasi. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, melalui studi yang dilakukan tahun 2007 telah mengklasifikasi kegiatan atau aktivitas industri berbasis kreativitas, yaitu:

1. Periklanan, merupakan aktivitas kreatif di bidang jasa periklanan (menggunakan medium tertentu dan hanya komunikasi satu arah),
2. Arsitektur, merupakan aktivitas kreatif dalam menghasilkan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi,
3. Pasar Barang Seni, merupakan aktivitas kreatif dalam perdagangan barang antik bernilai estetika seni yang tinggi,
4. Kerajinan merupakan kreasi, produksi dan distribusi produk, yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin dan produk kerajinan biasanya diproduksi dalam jumlah terbatas .
5. Desain merupakan aktivitas kreatif dalam membuat rancangan grafis, rancangan interior, rancangan produk, konsultasi serta rancangan produksi kemasan dan jasa pengepakan.
6. Fashion merupakan aktivitas kreatif yang terkait dengan kreasi membuat pola pakaian, rancangan pola alas kaki, mode aksesoris dan

- lainnya, produksi model pakaian dan aksesorisnya, termasuk konsultansi rancangan produk fashion, serta distribusi produknya.
7. Video, Film, dan Fotografi merupakan aktivitas kreatif dalam hal kreasi untuk memproduksi, mendistribusikan serta jasa konsultasi pembuatan video, film, dan fotografi, sekaligus dalam hal penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.
 8. Permainan interaktif merupakan aktivitas kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi berbagai jenis permainan komputer dan video yang sifatnya hiburan, melatih ketangkasan, dan edukasi.
 9. Musik merupakan aktivitas kreatif untuk menghasilkan kreasi rekaman suara untuk komposisi sebuah lirik, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi.
 10. Seni Pertunjukan merupakan aktivitas kreatif yang berkaitan dengan usaha menampilkan sesuatu yang menarik dilihat seperti: pengembangan konten, produksi pertunjukan, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
 11. Percetakan dan Penerbitan merupakan aktivitas kreatif yang terkait penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita.
 12. Layanan computer dan piranti lunak merupakan aktivitas kreatif dalam rangka mengembangkan teknologi informasi, jasa layanan komputer, jasa pengolahan data, pengembangan database, software, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.
 13. Televisi dan radio merupakan aktivitas kreatif dalam rangka menciptakan kreasi terhadap kemasan acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk pengembangan pemancar siaran radio dan televisi.

14. Riset dan pengembangan merupakan aktivitas kreatif yang inovatif dalam menawarkan penemuan ilmu dan teknologi (dalam bentuk publikasi) dan penerapan ilmu dan pengetahuan.

Berbagai kegiatan industri kreatif inilah, seiring waktu dikenal dengan ekonomi kreatif. Dipertegas dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, telah menentukan 14 kegiatan yang menjadi subsektor ekonomi kreatif yang harus dikembangkan, sebagai berikut : Periklanan; arsitektur; pasar seni dan barang antik; kerajinan; desain; fashion (mode); film, video dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; radio dan televisi; dan riset pengembangan.

Selanjutnya, diikuti adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.72 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No.6 Tahun 2009 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah melakukan klasifikasi bidang dari ekonomi kreatif, di mana terdapat 16 bidang : arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Mengikuti evolusi yang terjadi terhadap ekonomi kreatif di Indonesia, dapat dikatakan secara tegas bahwa ruang lingkup ekonomi kreatif tidak terlepas dari aktifitas (kegiatan) industri.

9.5 Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Peningkatan Perekonomian Indonesia

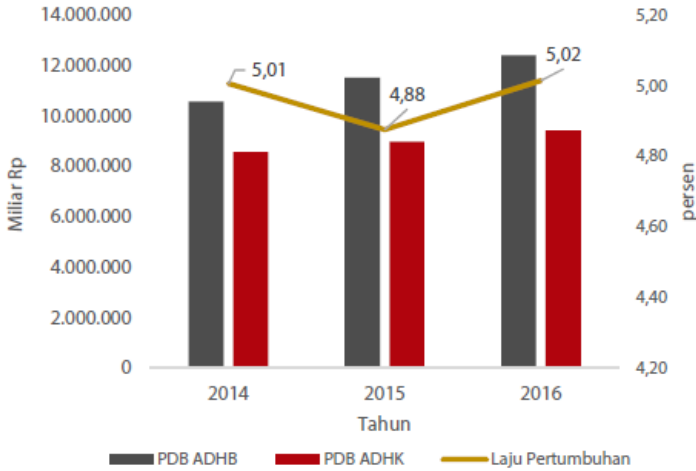
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa hampir seluruh dunia, mengakui adanya dampak signifikan ekonomi kreatif terhadap perdagangan internasional dan perekonomian suatu negara (Trade and Development, 2008). Tidak dipungkiri, sejak tahun 2009 Indonesia menangkap potensi ekonomi kreatif sebagai pondasi bagi perekonomian negara. Oleh karena, berbagai kontribusi positif bermunculan seiring pengembangan ekonomi kreatif.

Keeratan hubungan antara kebutuhan manusia dan interaksi sosial diyakini menempatkan ekonomi kreatif sebagai pusat perhatian yang berkontribusi positif terhadap perekonomian negara.

9.5.1 Ekonomi Kreatif dan PDB

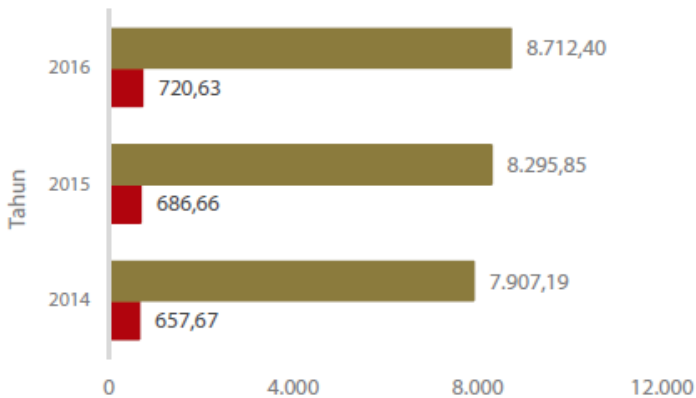
Penelitian Currid, yang dilakukan pada tingkat regional tahun 2007-2011 menemukan bahwa ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah krisis yang melanda Amerika Serikat (Currid-Halkett and Stolarick, 2013). Selanjutnya, Potts dan Cunningham menyampaikan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda, bahwa ekonomi kreatif memiliki pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta kontribusi nyata terhadap budaya dan masyarakat di mana ekonomi kreatif itu tumbuh.(Potts et al., 2008). Produk Domestim Bruto (PDB) sebagai indikator untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai tambah tiap sektor dalam PDB akan menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian suatu negara.

Dalam rangka pemetaan tahun 2016, BPS dan Bekraf membuat klasifikasi Ekonomi Kreatif yang setara Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Dalam hal ini, penyeteraan dimaksud menangkap korespondensi yang terjadi antara keenam belas subsektor ekonomi kreatif dengan 223 kelompok KBLI 2015. Terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang berkorespondensi dengan kegiatan ekonomi kreatif antara lain: industri pengolahan, informasi dan komunikasi, penyediaan hotel dan restaurant, jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan jasa hiburan. Perhitungan PDB Ekonomi Kreatif berdasarkan System of National Account (SNA) 2008. (Kreatif, 2015)



Gambar 9.2: PDB atas dasar harga berlaku, PDB atas dasar harga konstan, dan Laju pertumbuhan PDB Indonesia 2014-2016 (Kreatif, 2015)

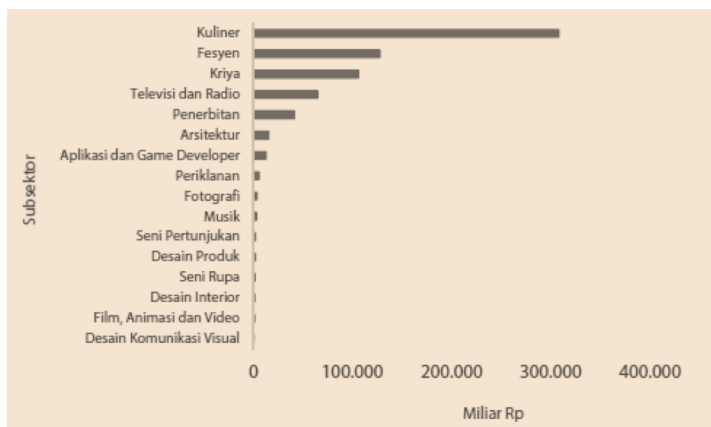
Gambar 2.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat dari 5,01 persen pada tahun 2014, menjadi tumbuh sebesar 4,88 persen pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 kembali melaju dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. PDB Ekonomi Kreatif atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2016, dari 657,67 triliun rupiah menjadi 720,63 triliun rupiah (Gambar 9.2)



Gambar 9.3: PDB Ekonomi Kreatif dan Non-Ekonomi Kreatif atas dasar harga konstan tahun 2014-2016 (Kreatif, 2015)

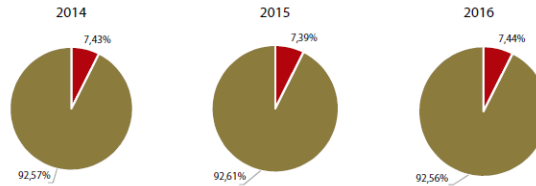
Peraturan Presiden (Perpres) No.72 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No.6 Tahun 2009 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kegiatan ekonomi kreatif mencakup 16 subsektor, yaitu arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Kontribusi setiap subsektor ekonomi kreatif terhadap PDB yang kemudian disebut PDB ekonomi kreatif. PDB Ekonomi kreatif yang akan menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan subsektor dari ekonomi kreatif.

Pada tahun 2016 kontribusi terbesar berasal dari subsektor kuliner, fesyen dan kriya dengan nilai masing 307.800,6; 127.435,3; dan 106.098,3 miliar rupiah. Sementara, kontribusi terkecil dari subsektor desain komunikasi sebesar 437,1 miliar rupiah.



Gambar 9.4: PDB Ekonomi Kreatif dan Non-Ekonomi Kreatif atas dasar harga konstan menurut sektor tahun 2016 (Kreatif, 2015)

Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB dalam kurun waktu 2014-2016 adalah sebesar 7,43 persen ; 7,39 persen dan 7,44 persen. Selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2016, ada tiga subsektor yang mendominasi pembentukan PDB Ekonomi Kreatif yakni subsektor kuliner, fesyen dan kriya. Ketiganya menyumbang 76,06 persen pada thn 2014, tahun 2015 kontribusinya turun menjadi 75,54 persen dan pada tahun 2016 kembali turun menjadi 74,81 persen.



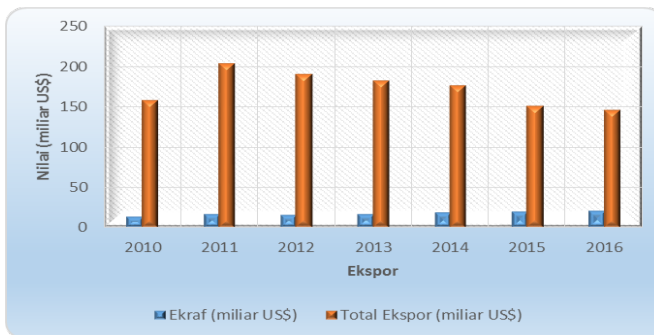
Gambar 9.5: Struktur Perekonomian Indonesia tahun 2014-2016 (Kreatif, 2015)

Secara keseluruhan, terlihat peran ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia dikategorikan kecil, namun menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi kreatif yang terus meningkat.

9.5.2 Ekonomi Kreatif dan Ketahanan Ekspor

Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih besar di era ekonomi kreatif (Ekraf), selain karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tetapi bonus demografi pun menjadi aset yang dapat dimanfaatkan dalam strategi ekspor. Sejak adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, sangat mempercepat gerak perkembangan industri kreatif untuk menghasilkan sejumlah produk kreatif yang bernilai ekonomis. Dengan keunggulan produk ekraf, memasuki pasar internasional diharapkan mampu berkontribusi terhadap pendapatan nasional negara.

Perkembangan Nilai Ekspor Ekraf dalam periode 2010 sampai dengan 2016, menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan total ekspor Indonesia yang mengalami fluktuasi.



Gambar 9.6: Perkembangan Nilai Ekspor Ekraf dan Ekspor Total (Statistik, 2017)

Ekspor ekonomi kreatif tahun 2010 hanya sebesar US\$13,51 miliar, selanjutnya peningkatan terjadi hingga tahun 2016 mencapai US\$19,99 miliar. Jika peningkatan ekspor ekonomi kreatif berlangsung jangka panjang, maka pelan tapi pasti ekspor Indonesia pasti mengalami peningkatan. Sehingga potensi ekspor ekonomi kreatif di masa yang akan datang, mendorong meningkatnya ekspor Indonesia secara keseluruhan.

9.5.3 Ekonomi Kreatif dan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Instruksi Presiden No.6 Tahun 2009, ekonomi kreatif (ekraf) adalah aktivitas ekonomi berbasis pada kreativitas, ketrampilan, bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di mana, dalam konsep ekraf menempatkan sumber daya manusia dalam hal ini kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama penggerak roda perekonomian. Tenaga Kerja diharapkan memiliki kreativitas dan pengetahuan yang memiliki daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis.

Menurut Badan Pusat Statistik, mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari suatu kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi. Secara spesifik bagaimana peran ekraf dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dengan impian, besarnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domesti Bruto, sekaligus peningkatan nilai ekspor ekraf, maka secara langsung berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dalam rangka peningkatan volume produksi untuk sektor ekraf.



Gambar 9.7: Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif (Statistik, 2017)

Secara keseluruhan, pekerja sektor ekraf berkontribusi kecil terhadap jumlah pekerja total di Indonesia, namun dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan tren perkembangan jumlah pekerja sektor ekraf yang semula pada tahun 2014 hanya berjumlah 15.1675,73 pekerja, hingga tahun 2017 mencapai jumlah 17.450,00 pekerja pada sektor ekraf.

Bab 10

Ekonomi Desa

10.1 Pendahuluan

Potensi ekonomi desa diberbagai wilayah Indonesia sangat besar, oleh karena itu perlunya pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dan masyarakat mengelola serta memanfaatkan semua potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat (Ramly et al., 2018). Potensi desa meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi pendukung. Potensi desa dijabarkan sebagai jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografi desa (Ramly et al., 2018), pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lainnya.

Desa diharapkan mampu mandiri dan mengelola sumber daya yang ada dalamnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pemerintah telah memberikan kewenangan dalam pengelolaan desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa desa berhak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014) dan desa memiliki kewenangan dalam pengembangan potensi sumber daya yang dimilikinya (Abisono, 2018). Dengan lahirnya Undang-Undang Desa maka desa memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sehingga desa tidak hanya sekedar pelayanan administrasi masyarakat namun mampu memanfaatkan potensi desa dan mengelolanya untuk kepentingan

masyarakat desa. Menurut Suroto dkk bahwa lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan bagi kemajuan desa karena Undang-Undang tersebut memberikan kedudukan, wewenang, alokasi dana untuk mewujudkan desa yang mandiri (Sutoro et al., 2014). Dengan adanya Undang-Undang Desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa yang salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (Sidik, 2017). Pengelolaan potensi desa diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, membentuk kemandirian dan ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan masyarakat desa (Ramly et al., 2018). Desa diharapkan mampu berdiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga pembangunan desa menjadi solusi dalam pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke lima Pancasila.

Pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan meliputi peningkatan pelayanan publik, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat sebagai objek pembangunan. Salah satu cara dalam pembangunan desa yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang mencerminkan sifat *people centered*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable* (Husaeni, 2017).

10.2 Ruang Lingkup Desa

Desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan (Saputra, 2016). Desa juga merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang diakui dan dihormati secara konstitusional (Kusumaputra, 2017). Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintah (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014). Desa memiliki pemerintahan sendiri dalam mengelola wilayahnya secara otonom (Kartini, 2016). Desa terletak di wilayah kota ataupun kabupaten, sedangkan pemerintahan desa merupakan penyelenggara untuk urusan pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat.

Dari Undang-Undang Desa dapat dijelaskan bahwa :

1. Desa memiliki masyarakat.
2. Asas desa adalah kekeluargaan, kebersamaan dan gotongroyong.
3. Merupakan wadah dalam bernegara dan bermasyarakat.
4. Desa memiliki legitimasi di masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan desa dalam dipatuhi dan dilaksanakan masyarakat.

Beberapa wilayah di Indonesia menyebut desa atau desa adat dengan beberapa istilah seperti binua, gampong, kampong, nagari, negeri, huta, marga, sosor, kuwu, lembang, yo, lumban, pemusungan dan lainnya (Kusumaputra, 2017). Menurut Permendagri No.12 Tahun 2007, desa dibagi menjadi empat jenis yaitu (Saputra, 2016) :

1. Desa Swadaya, desa yang sebahagian besar masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini merupakan desa terpencil dan jarang memiliki hubungan akses dengan masyarakat luar desa.
2. Desa Swakarsa, desa yang sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya, di mana desa sudah mampu menjual hasil desa ke daerah lain dan sudah adanya interaksi dengan daerah lain.
3. Desa Swasembada, desa yang sudah mampu mengembangkan potensi yang ada di desa secara optimal. Masyarakat telah mampu menggunakan teknologi dan memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola desa.

Desa dipimpin oleh kepala desa yang ditetapkan dari hasil dari pemilihan kepala desa secara langsung yang dijabat selama 6 tahun (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014). Era reformasi sekarang pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintahan desa. Kewenangan yang diberikan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014). Sehingga pemerintah desa memiliki peran sebagai pengelola, pembinaan dan pengawas pembangunan desa. Kepala desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran dana desa termasuk dalam mendirikan usaha milik desa atau BUMDes.

Masyarakat desa sangat terkenal dengan gotongroyong dan pergaulan kehidupan sehari-hari. Kedekatan masyarakat desa dipengaruhi oleh banyak

faktor seperti budaya, adat istiadat, dan kondisi geografis. Pengaturan desa mencerminkan asas keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan gotongroyong, musyawarah, demokratis, kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014).

10.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Ramly et al., 2018). Menurut Rizal pembangunan desa menjadi program pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Desa pasal 78 (Rizal, 2018) dan penetapan desa prioritas sebagai sasaran pembangunan (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2017).

Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan desa adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Pembangunan sarana dan prasarana.
4. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
5. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan pasal 80 ayat 4 UU No.6 Tahun 2012 bahwa prioritas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat desa meliputi :

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di desa.
3. Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri rumah tangga secara produktif.
4. Penggunaan teknologi tepat guna.
5. Peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan desa tidak sebatas masalah ekonomi, teknik dan infrastruktur tetapi pembangunan desa yang sesuai dengan karakteristik internal desa itu sendiri. Sehingga konsep dalam pembangunan desa selalu mencerminkan

karakteristik sosial budaya, demografis dan kelembagaan masing-masing desa. Pembangunan desa dilakukan sesuai dengan karakter desa di mana masyarakat desa yang selalu mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan program desa. Pembangunan desa yang melibatkan masyarakat tercermin dalam Undang-Undang Desa yaitu meningkatkan kerja sama dan gotong royong sehingga mampu memberikan perubahan-perubahan dan percepatan pembangunan. Pembangunan desa diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan desa adalah dengan meningkatkan sektor pertanian sehingga desa mampu menjadi desa swasembada pangan dan membantu kota sekitarnya untuk menyuplai pangan. Potensi desa berdasarkan data tahun 2014 dijelaskan bahwa bidang pertanian di desa sebesar 82,7 persen yang dapat dimanfaatkan sebagai agribisnis. Dibidang perkebunan pengembangan desa dapat dilakukan dengan pengelolaan perkebunan seperti tanaman sawit, cokelat, karet, nilam, pala dan lainnya. Dibidang perikanan dan kelautan dapat dimanfaatkan seperti pemeliharaan jenis-jenis ikan, pembibitan ikan, pengolahan ikan dan sumber daya alam yang terkandung dalamnya mengingat bangsa Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dari sabang sampai merauke. Menurut Wati pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana seperti jembatan, kebun percontohan, sarana ibadah dan lainnya. Pembangunan non fisik seperti peningkatan pengetahuan masyarakat dan peningkatan kesehatan rohani seperti penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan, perbaikan gizi masyarakat dan lainnya (Wati, 2016).

10.4 Pengalokasian Dana Desa

Kebijakan pembangunan desa agar terarah dan terstruktur dilakukan dengan penyediaan dana desa. Hal ini dilatarbelakangi masih terdapatnya kesenjangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Ramly et al., 2018). Penyebaran pembangunan yang tidak merata disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola desa, tingkat kemiskinan yang tersebar, dan luasnya wilayah desa disertai dengan tingkat kesulitan geografis. Dana desa merupakan bentuk kepedulian negara terhadap pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Dana desa diperuntukkan untuk peningkatan

ekonomi desa dan pembangunan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa untuk percepatan pertumbuhan dan pembangunan (Saputra, 2016). Beberapa alasan pentingnya sumber pendapatan desa yaitu: a. Desa memiliki anggaran, pendapatan dan belanja desa; b. Desa perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya; c. Desa perlu dana operasional untuk menjalankan layanan publik; d. Perlunya program pembangunan desa.

10.4.1 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Dana desa merupakan janji Negara kepada desa sebab desa memiliki peran penting dalam berdirinya Negara Kesatuan baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 dalam pengalokasiannya. Sumber dana desa selain dari APBN juga bersumber dari a. Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten sebesar 10%; b. Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar 10%; c. Bantuan dari APBD Kabupaten/Kota; d. Bantuan APBD Propinsi; e, Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi diatur dalam Undang-Undang (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014).

Rincian dana desa berdasarkan Permenkeu No.93/PMK.07/2017 di mana alokasi dana untuk setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis wilayah.

10.4.2 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa bermanfaat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya dana desa akan memberikan harapan untuk kemandirian dan kemajuan desa disegala bidang. Pengelolaan dana desa diprioritaskan pada pelaksanaan program desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimanfaatkan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa perlu melibatkan masyarakat seperti mengadakan rapat dengan badan permusyawaratan desa yang diikuti oleh perangkat desa dan wakil dari tokoh masyarakat, pemuka agama, perwakilan perempuan, masyarakat marginal, kepala dusun dan lainnya. Tujuan dari pengelolaan dana desa diharapkan menjadi prioritas pembangunan kepada pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat.

Beberapa prinsip dalam pengelolaan dana desa yaitu harus transparan, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan efektif, efisien, dan bersifat berkelanjutan :

1. Penggunaan dana desa harus adil dengan mengutamakan kepentingan seluruh warga tanpa membeda-bedakan.
2. Program pembangunan sesuai dengan prioritas dengan mempertimbangkan manfaat dan kondisi desa seperti geografis, antropologis, ekonomi, sosiologi desa.
3. Pengelolaan dana desa mengedepankan semangat kekeluargaan, gotongroyong dan kebersamaan.

Dalam penilaian efektivitas dana desa maka indikator yang digunakan adalah

1. Penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan padat karya.
2. Pemanfaatan BUMDes dalam mengelola potensi desa sebagai sumber pendapatan masyarakat, mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pembangunan serta perbaikan sarana prasarana desa.
3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa seperti keterlibatan wanita, penyandang cacat dan masyarakat miskin, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes.
4. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat desa.
5. Peningkatan indeks pembangunan masyarakat desa.

Penggunaan dan pengelolaan dana desa menjadi prioritas pemerintah saat ini agar benar-benar tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dalam pengelolaan dana desa perlunya sumber daya manusia yang terampil, sosialisasi penyaluran, koordinasi dan evaluasi (Ramly et al., 2018). Pengelolaan dana desa harus memiliki skala prioritas sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa bentuk pengelolaan dana desa yaitu :

1. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana

Pembangunan desa yaitu sarana dan prasarana desa menjadi prioritas di mana potensi desa perlu mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana sehingga terhadap akses menuju perkebunan, ladang, sawah dan pabrik. Pembangunan

akses akan meningkatkan kelancaran transportasi barang dari desa menuju desa maupun kota lain sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

2. Pengelolaan dana desa untuk perbaikan kesehatan masyarakat desa

Kesehatan merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan, dengan adanya dana desa diharapkan pemerintah desa mampu mengatasi persoalan-persolan gizi buruk dan tingkat kesehatan masyarakat.

3. Pengelolaan dana desa untuk peningkatan ekonomi rakyat dengan pendirian BUMDes dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

10.4.3 Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan dana desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dilaporkan kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaporkan diakhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali kota dalam forum musyawarah desa. Dalam pengalokasian dana desa perlu sikap kejujuran dari perangkat desa sesuai kepercayaan yang telah diberikan.

10.5 Pemberdayaan Masyarakat Desa

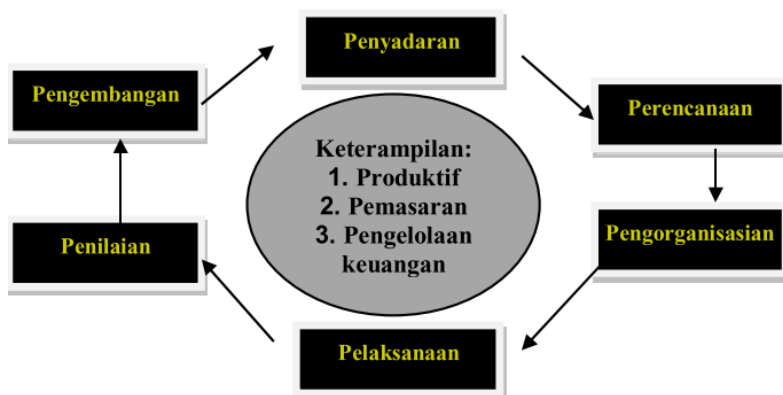
Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu tujuan utama dalam Undang-Undang Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat, keterampilan, sikap dan kemampuan mengolah sumber daya alam yang ada di desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014). Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi yang ada di desa (Sayuti, 2011). Sedangkan menurut Arfianto dan Balahmar pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat (Arfianto and Balahmar, 2014).

Pemberdayaan melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa (Arsiyah, Ribawanto and

Sumartono, 2009). Menurut Cohen dalam (Saputra, 2016) tahapan partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa tahapan seperti :

1. Tahapan Pengambilan Keputusan, dalam pengambilan keputusan pengelolaan desa masyarakat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program kerja desa. Masyarakat juga diikutsertakan dalam rapat-rapat desa.
2. Tahapan Pelaksanaan, bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dapat berupa sumbangan pemikiran, sumbangan bentuk materi dan tindakan untuk mewujudkan program desa.
3. Tahap Hasil, semakin besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan desa menunjukkan semakin berhasilnya program pembangunan desa tersebut.
4. Tahap Evaluasi, masyarakat memiliki partisipasi dalam memberikan umpan balik dan masukan demi perbaikan program di tahun berikutnya.

Sedangkan menurut Suyati bahwa model pemberdayaan meliputi pemberdayaan makro dan mikro. Pemberdayaan makro yaitu penyadaran, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penilaian dan pengembangan. Pengembangan mikro yaitu pengembangan keterampilan produktif, keterampilan pemasaran dan keterampilan pengelolaan keuangan (Sayuti, 2011).



Gambar 10.1: Model Pemberdayaan Masyarakat (Sayuti, 2011)

Beberapa alasan dilakukannya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan disebabkan a. masyarakat memahami kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat; b. Masyarakat memahami sebab akibat munculnya persoalan dan kejadian ditengah masyarakat; c. Masyarakat mampu menggali potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi yang ada di desa; d. Masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai sasaran pembangunan desa (Saputra, 2016).

Kebijakan pengelolaan desa sesuai Undang-Undang Desa diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa sesuai dengan kondisi wilayah dan mata pencaharian masyarakat desa. Mata pencaharian masyarakat desa tergantung pada kondisi geografisnya di mana sebagian wilayah bermata pencarian petani, perkebunan, nelayan dan lainnya. Kondisi wilayah Indonesia yang memiliki banyak pulau dan garis pantai menyebabkan rata-rata kondisi perekonomian desa bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa diharapkan mampu memberikan peningkatan dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang setiap aspek kehidupan masyarakat.

Beberapa kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah membentuk

1. Pembentukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga dengan usaha UMKM ini desa mampu mendorong masyarakatnya untuk menghasilkan produk dan jasa yang mampu mendorong perekonomian desa. Beberapa usaha di sektor UMKM adalah pengolahan kerajinan tangan, usaha makanan dan minuman serta pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam sehingga memiliki nilai tambah. Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi desa maka dibentuklah beberapa usaha desa seperti BUMDes, Pasar Desa, Lumbung Pangan Desa dan Tambatan Perahu.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pembentukan BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang ada di desa, sehingga dengan adanya BUMDes diharapkan potensi desa bisa dikelola dengan baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber pendapatan asli desa.
3. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi desa seperti pembangunan pasar desa, pembangunan irigasi, pembangunan

jalan, pembangunan saluran air, pembuangan tempat sampah, dan sebagainya.

4. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan perubahan perilaku masyarakat dengan pendekatan pembelajaran masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

10.6 Faktor penghambat Pembangunan Desa

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pembangunan dan pemberdayaan desa adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kemampuan perangkat desa dalam mengelola potensi desa dan dana desa menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa. Sehingga perlunya kemampuan manajerial dalam pengelolaan desa sehingga dapat mencapai pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelemahan ini juga disebabkan hampir kebanyakan penduduk desa melakukan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga menimbulkan kurangnya sumber daya manusia di desa.

2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan tidak berjalannya program-program desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyusunan program kerja, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program kerja desa.

3. Rendahnya kemampuan pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa.

Ketidakmampuan dalam pengalokasian dana desa agar tetap sasaran mengakibatkan tidak tercapainya prioritas dari dana desa yang telah dialokasikan.

4. Kurangnya Koordinasi Para Pelaksana Tugas Kebijakan

Dalam pengelolaan dana desa, semua pihak memiliki peranan yang sangat penting baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten/ kota dan masyarakat. Jika tidak adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dalam menyebabkan terkendalanya program dan pemberdayaan masyarakat.

10.7 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang modalnya baik seluruh maupun sebagian dimiliki oleh desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014). Pembentukan BUMDes didasari pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 di mana dijelaskan bahwa untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa maka pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004). BUMDes lahir sebagai usaha dalam peningkatan ekonomi dan pemanfaatan potensi desa (Zulkarnaen, 2016). Pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemauan dan kemampuan dari setiap kelompok masyarakat. Pemilihan bentuk BUMDes disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha, struktur organisasi, potensi dan kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola secara bersama, kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes ini merupakan lembaga yang bergerak dibidang ekonomi dan sosial untuk melayani masyarakat terutama dibidang usaha (Ramadana, Ribawanto and Suwondo, 2013).

Dengan adanya BUMDes diharapkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi desa dan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat menunjang perekonomian desa. Secara umum BUMDes diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014. Selain pengelolaan dana

desa, BUMDes juga mendapatkan modal dari sumbangan, hibah atau kerja sama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, swasta, dan lembaga donor. Pengelolaan potensi desa yang dilakukan BUMDes dapat berupa potensi alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan, simpan pinjam, pengolahan sampah, industri rumah tangga, dan lainnya. Dalam pengelolaan BUMDes harus akuntabel, jujur, demokratis, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BUMDes menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan pengelolaan potensi desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa (Sidik, 2017).

Beberapa manfaat dalam pengelolaan sumber daya potensial yang dikelola oleh BUMDes adalah :

1. Mendorong peningkatan jenis usaha warga desa.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Terciptanya integrasi pemasaran dan promosi produk dan jasa yang dihasilkan desa.
4. Peningkatan jumlah industri kreatif.
5. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
6. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sedangkan menurut Ramadana dkk bahwa pendirian BUMDes merupakan penguatan ekonomi desa yang memberikan kontribusi positif terhadap a. Sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa; b. Pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan c. Pembangunan desa secara mandiri (Ramadana, Ribawanto and Suwondo, 2013). Beberapa kendala yang mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan BUMDes untuk kepentingan masyarakat desa adalah (Kusumaputra, 2017) :

1. Kurangnya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengelolaan BUMDes
2. Pemahaman pengelolaan BUMDes dan penggalan potensi wilayah yang kurang sehingga aparatur desa tidak mampu mengelola BUMDes dengan efektif dan efisien.
3. Tingkat Partisipasi masyarakat yang kurang menyebabkan kinerja BUMDes tidak maksimal

4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada di Desa.
5. Untuk mengatasi persoalan di atas perlunya koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat, daerah, perangkat desa dan masyarakat agar mampu mengoptimalkan BUMDes untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

Bab 11

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi, di dalam perspektif bisnis memberikan nilai tambah posisi perusahaan dalam jangka panjang. Utamanya adalah posisi perusahaan dimata masyarakat, di mana citra positif bagi perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Singkatnya CSR, di dalam bisnis, merupakan salah satu faktor pengontribusi di area bisnis, sosial, dan lingkungan (Moon, 2010), (Weiss, 2009) (Lawrence, 2019). Apa itu CSR, bagaimana teori CSR serta beberapa contoh keterlibatan perusahaan di Indonesia menjalankan CSR akan dibahas di dalam bagian ini.

11.1 Pengertian CSR

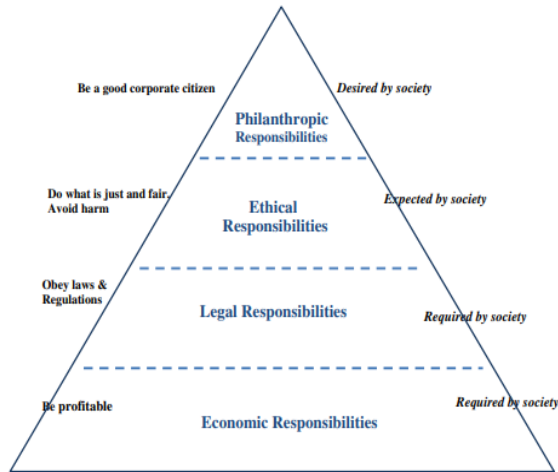
Apa itu CSR dapat dipelajari dari definisi definisi mengenai CSR dari parah ahli. Howard Bowen (1953) dianggap sebagai pemikir awal mengenai CSR sebagai konsepsi akademik, Di dalam tulisan Bowen, *Social Responsibilities of the Businessman* (Caroll, 2005), Caroll mengutip definisi CSR dari Bowen,

yaitu “ the obligation for the businessme to pursue those policies, to make those decision,or to follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and value of our society (Caroll, 2005). Dalam konsepsi awal tersebut, CSR sebatas sebagai aktivitas korporasi untuk lingkungan sosial korporasi, CSR belum menyentuh factor teknologi, lingkungan hidup, profit ekonomi atau aktivitas legal ekonomi di tahap pengembangan konsepsi ini.

Kotler dan Nancy, (2011), mendefinisikan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Sementara Perserikatan Bangsa Bangsa menyebut “corporate responsibility is concerned with the relationships that a company maintains with its shareholders, clients, suppliers, creditors and employees, as well as with the communities in which it operates. Corporations are responsible for ensuring that their dayto-day operations produce a selected range of products and services in the most efficient and economical manner, and for producing a profit in the process”

Definisi mengenai CSR, baik dari Kotler maupun PBB, dapat disebutkan melengkapi perkembangan mengenai tanggung jawab sosial korporasi sebagai bagian dari praktik bisnis yang memperhatikan faktor sosial dan lingkungan hidup, untuk menciptakan kesejahteraan, dengan melibatkan berbagai pengampu kepentingan perusahaan atau stakeholders. Definisi ini sejalan dengan pengertian CSR yang dicantumkan di UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) di Indonesia. Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” Kegiatan CSR, dipercaya meningkatkan citra perusahaan, mencerminkan perilaku perusahaan yang secara fundamental adalah baik, menjaga kontrak sosial antara antara bisnis dan masyarakat.

Caroll, (2016) menyampaikan konsepsi tanggung jawab korporasi secara lebih komprehensif, dalam bentuk piramida tanggungjawab, yang dijalankan korporasi secara berkesinambungan, yaitu : tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggungjawab etis, dan tanggungjawab philantropis.



Gambar 11.1: Piramida Tanggung Jawab Sosial (Caroll, 2016)

Berdasarkan piramida dari Carroll, bentuk- bentuk pelaksanaan tanggungjawab korporasi itu berkisar pengelolaan masalah-masalah yang berdampak pada masyarakat. Tanggung jawab ekonomi sebuah korporasi merupakan tanggungjawab sosial, mengingat korporasi diharapkan masyarakat untuk terus berkembang, dan salah satu caranya adalah menjalankan bisnis secara menguntungkan, memberikan daya tarik kepada investor, dan menyediakan modal yang cukup untuk beroperasi. Lebih dari itu, tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab sosial korporasi untuk memastikan segala sesuatunya memberikan manfaat tidak hanya kepada perusahaan tapi juga kepada masyarakat. Tanggung jawab legal korporasi merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, mengingat korporasi diharapkan mematuhi hukum dan peraturan ketika menjalankan bisnis. Termasuk di antaranya, agar para pimpinan korporasi memastikan kinerja perusahaannya tidak melanggar hukum dan peraturan, mematuhi kewajibannya sesuai dengan AD/ART pendirian perusahaan, menjamin kesepakatan dengan pendana atau kreditor, dan lebih dari itu menyediakan barang dan jasa yang tentunya memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan standar asosiasi bisnis.

Lebih dari itu, masyarakat juga mengharapkan korporasi tidak hanya mematuhi hukum, namun juga dipandu oleh norma, standar dan praktik bisnis yang memenuhi rasa kelaziman masyarakat. Meskipun dalam beberapa isu tidak diatur di dalam hukum. Tanggungjawab sosial korporasi etis ini dengan demikian memandu apa yang diharapkan dan tidak diharapkan, dengan

memperhatikan norma, kebiasaan, dan tidak berkompromi ketika praktik bisnis ada potensi yang merugikan kepentingan pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Yang terakhir dari piramida tanggungjawab sosial korporasi menurut Carrol, adalah korporasi diharapkan memberikan “give back” atau imbal balik sebagai dari apa yang di dapatkan dari masyarakat. Persepsi masyarakat ini mengharapkan korporasi membantu masyarakat dengan berbagai hal yang dimungkinkan, seperti donasi financial, barang, atau jasa. Termasuk melakukan kegiatan sukarela untuk turut mengembangkan masyarakat di mana bisnis beroperasi, Berbagai tanggungjawab sosial korporasi tersebut, dapat diwujudkan dengan berbagai aktivitas, antara lain, namun tidak terbatas kegiatan seperti: kegiatan komunitas kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Menjaga kualitas pengelolaan lingkungan fisik terbebas dari polusi udara, limbah berbahaya dari aktivitas bisnis yang dilakukan korporasi.

CSR Dengan demikian tidak hanya sebatas pemberian bantuan dana kepada masyarakat, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, mendorong keberagaman di dalam rekrutment karyawan, penempatan tenaga kerja, kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Termasuk kesehatan dan keamanan lingkungan kerja dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor untuk karyawan. Dari aspek praktik pembuatan produk, seperti, juga tanggung jawan sosial perusahaan untuk melakukan untuk menyediakan produk yang aman untuk kesehatan. Hal ini berlaku baik untuk produk dengan segmen masyarakat kurang mampu, maupun produk konsumen yang diperlukan untuk masyarakat umum dan mereka yang berpenghasilan tinggi. Merupakan tanggung jawab sosial juga, keberpihakan bisnis untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok, dan menjaga kelestarian alam. Melakukan pelaporan pelaporan finansial sesuai dengan standar dan praktik yang diterima oleh bisnis secara umum, misalnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia.

Singkatnya, pengertian CSR dengan demikian, sesuai dengan perkembangan teoritisnya, tidak hanya mengedepankan prinsip komutatif dan simbiotik untuk hubungan pembeli dan produsen, namun juga menjaga hubungan bisnis yang bermanfaat untuk perusahaan (profit) dan untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk keterbukaan untuk melakukan audit terbuka, membuka diri untuk asesmen dan menghasilkan kegiatan bisnis dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan korporasi saat menjalankan CSR. Korporasi singkatnya

memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek mencakup aspek ekonomi, legal, etis sosial, dan aspek lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan upaya perusahaan melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

11.2 CSR untuk Bisnis dan Masyarakat

Tujuan dari dijalankannya tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), memiliki implikasi nilai tambah bisnis, namun juga untuk turut menyejahterakan masyarakat. Bisnis adalah menciptakan nilai tambah bagi konsumen, sehingga hubungan antara penjual dan pembeli, pastinya juga sebagai upaya mewujudkan prinsip hubungan bisnis dan masyarakat di dalam sistem ekonomi pasar yang saling menguntungkan. Kotler (2005), pakar marketing bisnis, bersama Nancy Lee (2005) mengemukakan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari aktivitas membuat yang perusahaan berwajah baik dan turut mengupayakan kebaikan itu sebagai wajah bisnis sebagaimana apa adanya, yaitu :

1. Cause promotions dalam bentuk korporasi memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana untuk mempromosikan kesadaran akan mencegah masalah-masalah sosial tertentu misalnya kebiasaan cuci tangan untuk Kesehatan diri dan sesama, konservasi pusaka budaya untuk menjaga warisan masa lalu untuk Pendidikan masa depan, hingga promosi anti hoax dan bullying untuk promosi kehidupan digital yang sehat.
2. Cause-related marketing, merupakan bentuk kontribusi korporasi menyisihkan porsi dari pendapatan per item penjualan produk, sebagai donasi bagi menangani masalah sosial tertentu, untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu. Misalnya komitmen perusahaan untuk setiap pembelian produk makanan kesehatan diberikan sebagian pendapatannya untuk mendukung Yayasan kesehatan membantu penanganan kesehatan masyarakat miskin yang

- mebutuhkan, misalnya operasi jantung bagi penderita yang kurang mampu.
3. Corporate social marketing, upaya korporasi membantu pengembangan maupun implementasi dari kampanye sosial, dengan fokus mengubah perilaku masyarakat untuk kesehatan, seperti kebiasaan makan dengan gizi seimbang, bekerjasama dengan berbagai pihak berkegiatan komunikasi publik
 4. Corporate philanthropy adalah insiatif korporasi memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai, misalnya pembibitan atlet, penghijauan kawasan, Yayasan pengelola Pendidikan untuk orang berkebutuhan khusus
 5. Community volunteering, dalam aktivitas ini korporasi memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat, misalnya pelestarian kawasan sungai, atau kegiatan komunitas proteksi kawasan budaya
 6. Socially responsible business practices, merupakan inisiatif korporasi mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan, misalnya pengelolaan pertanian tumpangsari, menambahkan tanaman bahan baku industri, di lahan perdesaan masyarakat, untuk pemasok kopi, kedelai, atau bahan baku pabrikan makanan yang lain.

11.3 CSR dan Doktrin Hubungan Bisnis

Mengenal CSR dapat juga dibahas dari doktrin hubungan “bisnis dan masyarakat”. Tanpa menyangkal aktivitas bisnis adalah mencari untung di dalam transaksi barang dan jasa di dalam sistem ekonomi pasar, pembahasan mengenai hubungan bisnis dan masyarakat merupakan doktrin hubungan keduanya yang pemikirannya mendasari perkembangan cara-cara korporasi bertanggungjawab memelihara hubungan bisnis. Moon (2010) menyebutkan

hubungan bisnis dan masyarakat di negara-negara maju, seperti Amerika dan Eropa Barat memiliki akar untuk mengenal praktik tanggung jawab sosial perusahaan saat ini. Hubungan bisnis dan masyarakat, mencerminkan hubungan simbiotik dan resiprokal antara korporasi dan pemerintah pada sisi yang lain. Salah satu doktrin perlunya CSR adalah faktor sosial dan kultural bekerjanya sistem ekonomi pasar. CSR menjembatani antara kepentingan pribadi di dalam sistem ekonomi pasar, yang nyaris dijamin kebebasannya, untuk mengakumulasi kapital dan membuat nilai tambah barang dan jasa, dan dorongan korporasi untuk menciptakan kesejahteraan umum juga bersama-sama dengan pemerintah. Dengan tanggung jawab sosial perusahaan, aktivitas bisnis diberikan ruang pengelolaan kesejahteraan umum melalui partisipasi di dalam pengelolaan barang publik (*public goods*), yang lazimnya dilakukan oleh pemerintah, misalnya bidang kesehatan, pendidikan dan penanganan lingkungan.

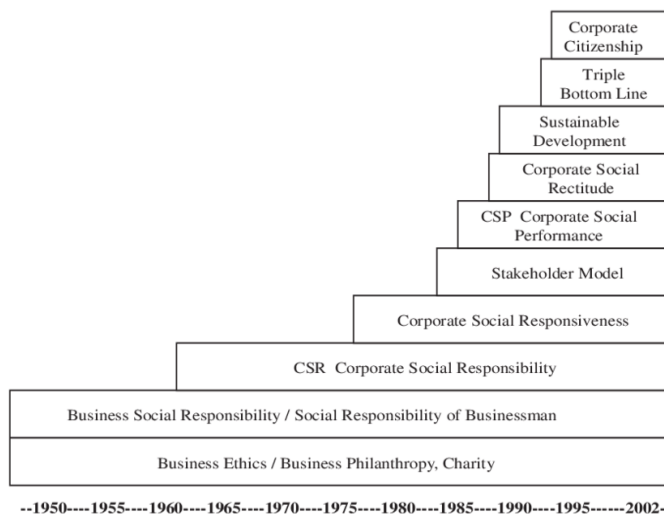
Di dalam pasar ekonomi yang mengutamakan individualitas, CSR memberikan ruang menjaga motif-motif pasar yang individualistik, untuk kepentingan umum dengan memberikan akses, produk dan pelayanan bagi mereka yang menjadi subyek program-program kemanusiaan pemerintah, misalnya. CSR menjaga kebebasan dari kemungkinan korupsi moral di sistem pasar, *aji mumpung* (*moral hazard*) yang seringkali diidentikkan sebagai ruang kebebasan kepentingan individu. Dengan demikian CSR memberikan kerangka agar kebebasan individu yang ada di dalam sistem ekonomi pasar, tidak membuka kemungkinan lain dalam bentuk kerusakan sosial akibat dilanggarnya kepentingan umum oleh kebebasan individu. Sistem ekonomi pasar yang diidealkan, dibentuk oleh kepentingan bisnis, yaitu memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sebisa mungkin ditiadakan dari campur tangan pemerintah (*laissez-faire*). Dengan demikian tanggung jawab sosial korporasi dikonsepsikan menjembatani kepentingan antara individu dan kepentingan umum yang dilakukan oleh korporasi bisnis.

Tanggung jawab sosial korporasi di negara maju, yang dikonsepsikan sebagai hubungan bisnis dan masyarakat, juga dikonsepsikan sebagai rekognisi pelaku-pelaku lain di dalam sistem ekonomi pasar. Pelaku pasar tidak hanya semata produsen dan konsumen, peranan pelaku pasar seperti asosiasi, pemerhati (masalah sosial), kelompok penekan yang menggunakan isu-isu sosial untuk berpartisipasi dalam hubungan bisnis dan masyarakat, tidak dapat ditiadakan perannya di dalam sistem ekonomi pasar. Sehingga CSR merupakan instrumen perekognisi, pengenalan, pengakuan mengenai pentingnya pelaku-

pelaku selain korporasi bisnis di dalam sistem ekonomi pasar. CSR, merupakan “value action” dari nilai-nilai utilitarian mengenai kegunaan korporasi bisnis di sistem ekonomi pasar, korporasi adalah instrumen legitimasi, sumber ekonomi dan sumber inovasi paling penting di masyarakat (Moon, 2010).

Merujuk doktrin di dalam hubungan bisnis dan masyarakat tersebut, CSR memiliki legitimasi untuk dijalankan oleh organisasi bisnis modern, dalam bentuk yang tidak semata-mata aktivis filantropis. Semula aktivitas filantropis didorong oleh motif religius dan pertimbangan praktis membagi kemakmuran kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada perkembangannya CSR berubah menjadi aktivitas organisasional mengelola tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Sehingga saat ini, sebagai konsepsi hubungan bisnis dan masyarakat, tanggungjawab sosial korporasi bukan semata-mata kesadaran individual lagi untuk berbuat kebaikan, “individual conscience”, namun juga bagaimana sebuah korporasi memainkan peranannya di masyarakat. Dalam hal ini CSR mendapatkan konsideran sebagai wujud kebebasan para pemimpin profesional, di dalam perusahaan atau korporasi modern, untuk mengelola perusahaan secara profesional, otonom, melakukan tatakelola perusahaan yang baik dan melakukan tanggungjawab sosialnya.

Pemahaman mengenai CSR, dalam debat akademik, juga menyangkut pembahasan apa itu tujuan legal korporasi bisnis. Sebagai entitas mencari untung, korporasi bisnis kemudian didebatkan apakah sebagai entitas legal sebagai pembuat “profit maximization” untuk pemilik dan pemegang saham dan sebatas membayar pajak untuk kepentingan pemerintah menjalankan program kesejahteraan dan pembangunan untuk masyarakat. Atau, sebagai entitas pencari untung, tanggungjawab korporasi bisnis juga sebagai entitas menjaga kepentingan setiap pihak yang tersangkut paut dengan korporasi bisnis, seperti masyarakat dan pelaku bisnis yang lain (Freeman, 2001), (Friedman, 1970), (Mitchell, 1997). Debat akademik ini banyak menjadi perhatian kajian etika bisnis, dan mendasari perspektif stakeholders di dalam pembahasan tanggungjawab sosial sebagai bentuk hubungan bisnis dan masyarakat.



Gambar 11.2: Perspektif CSR (Mohan, 2003 dalam Masoud 2017)

Perkembangan perspektif CSR, yang cukup dominan, adalah pemikiran mengenai manajemen pelaksanaan CSR. Korporasi, dalam menjalin hubungan bisnis dengan masyarakat, bertanggungjawab untuk mendapatkan asesmen atas kebijakannya, dari pihak di dalam dan di luar perusahaan. Termasuk juga analisis CSR dan kinerja keuangan perusahaan (Walsh, 2007), pembahasan *triple bottomline* (BTL) (Elkington, 1997). Elkington mengembangkan tiga hal untuk mengelola performa bisnis, yaitu menjaga kelestarian alam dan kesinambungan bisnis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development*. BTL dijelaskan, pertama adalah pertumbuhan ekonomi dalam bentuk profit atau keuntungan perusahaan. Kedua adalah *environmental protection* dalam bentuk menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan rantai pasokan dan rantai produksi bisnis. Ketiga *social equity*, di mana menjalankan bisnis secara baik (*fair*) dan bermanfaat untuk karyawan, buruh dan juga bermanfaat untuk komunitas di wilayah geografis bisnis berada. Dengan demikian korporasi mengkonsepsikan hubungan yang timbal balik, saling menguntungkan antara ketiganya dalam istilah “3P”, yaitu singkatan dari profit, planet dan people. Korporasi dengan demikian tidak hanya mengejar laba usaha atau profit, juga memperhatikan akibat kegiatannya terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat

disekitarnya (people). Perusahaan akan tumbuh jika jika lingkungan dan masyarakat terjaga kepentingannya

Pemikiran mengenai CSR juga merujuk kepada pembahasan kinerja korporasi yang di dedikasikan untuk mengelola potensi bisnis pada mereka yang berada di *bottom of the pyramid* (Prahalad, 2002). Kinerja korporasi antara lain ditujukan untuk membangun pasar bisnis bagi masyarakat miskin sebagai upaya mengurangi kemiskinan di dunia. Oleh karena itu, kegiatan CSR dapat membantu korporasi mengelola pasar kelompok miskin, melibatkan mereka yang kurang mampu secara finansial, namun memiliki kebutuhan. Sehingga memenuhi kebutuhan kelompok miskin di dalam rantai konsumen yang aktif dapat dilakukan oleh korporasi bisnis melalui inovasi produk untuk kelompok miskin yang tetap menguntungkan secara ekonomi. Lebih khusus lagi aktivitas tanggung jawab sosial untuk mengurangi kemiskinan dilakukan melalui kerjasama aktif dengan masyarakat miskin itu sendiri, mengundang keterlibatan organisasi nirlaba atau kelompok masyarakat sipil, pemerintah sebagai fasilitasi dan korporasi besar sebagai pelaku utama. Kolaborasi antara mereka ini akan menciptakan pasar bisnis bagi korporasi dan bahkan menurut Prahalad tidak boleh dinihilkan, mengingat potensi pasar kelompok miskin ternyata dapat dijadikan sumber inovasi dan keuntungan yang mencengangkan (Prahalad, 2002).

Pembahasan CSR juga dapat merujuk hubungan bisnis dan masyarakat dari perspektif kenegaraan atau politik, *corporate citizenship* (Logdon dan Wood, 2002), (Moon 2002). Tanggungjawab sosial korporasi, untuk melakukan partnerships dengan pemerintah dan organisasi sosial, adalah upaya korporasi yang berperan menjaga hak haknya sebagai “warganegara”, mengingat korporasi dikonseptualisasikan secara metaforik seolah olah sebagai warganegara. Meskipun di dalam situasi nyata tidak ada asas kewarganegaraan di sistem ekonomi pasar bebas, Namun demikian, konsepsi *corporate citizenship*, memperluas aktivitas tanggung jawab sosial agar korporasi bekerjasama dengan pemerintah, organisasi organisasi sosial, mengelola bersama hubungan bisnis dan masyarakat sebagaimana hubungan hak dan kewajiban warganegara dan negaranya.

Pembahasan CSR yang cukup populer adalah perspektif *stakeholder theory* yang mengintegrasikan tanggungjawab sosial koorporasi dengan berbagai pemikiran hubungan antara “bisnis dan masyarakat” (Weiss, 2009). Stakeholders, menjadi kerangka pemikiran, utamanya bagaimana korporasi bisnis mengelola berbagai kepentingan stakeholder, memengaruhi kebijakan

pemerintah yang langsung menyentuh kepentingan usaha, dan memuat justifikasi moralitas universal, seperti universal right dan sustainability di dalam kegiatan rantai nilai bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa yang baik dan bermanfaat. (Donaldson, 1995), Caroll (2005). Beberapa alasan perlunya tanggung jawab sosial dan kepentingan stakeholders, adalah: korporasi merespons perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Sehingga korporasi tidak hanya memusatkan untuk mendatangkan keuntungan semata. Keterbatasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga korporasi perlu juga melestarikan menggunakan sumber daya untuk tidak merusak, lebih lebih memusnahkannya. Perlunya korporasi memperhatikan lingkungan sosial karena dengan sendirinya, masyarakat sebagai customer, akan meningkatkan nilai bisnis korporasi, sumber tenaga kerja, menaikkan kualitas hidup pelanggan. Tanggungjawab sosial korporasi dari perspektif stakeholders juga mengelola hubungan bisnis dan pembuat keputusan politik di negara, di mana tanggung jawab sosial dapat menjaga keseimbangan kekuatan antar kekuatan politik, baik bisnis maupun pemerintah dapat menjaga kemanfaatan sumber sumber kekuasaan politik yang dimilikinya untuk masyarakat.

Perkembangan pemikiran CSR yang juga dibahas, merespons perkembangan bisnis yang sudah mendunia, sistem ekonomi pasar yang mendukung deregulasi dan privatisasi, dengan kebijakan liberalisasi dan ideologi neoliberal negara negara di dunia, memperkuat relevansi CSR untuk korporasi berkontribusi menyelesaikan masalah masalah di masyarakat. Misalnya perkembangan dunia digital, untuk pengelolaan pengetahuan di perusahaan (Prasetya, 2019), perusahaan bisnis dituntut mengelola fleksibilitas hubungan tenaga kerja, seperti *worklife ballance*, tempat kerja inklusif untuk mendorong keragaman karyawan di perusahaan multinasional, pemodal bersumber keuangan global dan kesehatan keuangan korporasi menuntut tatakelola perusahaan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Perhatian atas lingkungan untuk kehidupan manusia, hewan dan tanaman, seperti cadangan air bersih, mengundang relevansi CSR oleh korporasi tingkat dunia. Nestle dan Unilever misalnya menghormati prinsip bisnis yang mengedepankan keseimbangan sumber kehidupan di perdesaan dan sumber bahan baku produksi dan didapatkan dari alam perdesaan juga. Dalam kaitan ini, CSR mendorong penguatan pelaku pelaku di ekonomi pasar, tidak hanya melibatkan korporasi dan pemerintah, namun juga NGO lokal dan internasional. Seperti WWF, World Business Council for Sustainable

Development, Perserikatan Bangsa Bangsa, dengan UN Global Compact, dan lembaga kerjasama pembangunan ekonomi dengan OECD *guideline for Multinational Enterprise*. Termasuk inisiatif, seperti standar bisnis yang bertanggungjawab sebagaimana dibahas di GRI atau Global Reporting Initiatives.

11.4 Model CSR di Indonesia

Sebagai penutup pembahasan mengenai CSR, mengingat begitu banyak variasi pelaksanaan CSR di dunia, secara umum dapat identifikasi 4 model CSR yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu :

1. Keterlibatan langsung unit di perusahaan

Korporasi menjalankan program CSR secara langsung dari perusahaan untuk masyarakat. Korporasi menyelenggarakan kegiatan tanggungjawab sosialnya, dengan menyerahkan sumbangan langsung ke masyarakat. Perusahaan biasanya menugaskan fungsi di dalam perusahaan nya untuk mengelola hubungan dengan pihak pihak yang memiliki kepentingan dan mungkin terdampak dari aktivitas perusahaan yang bersangkutan melalui fungsi *public relation*. Biasanya proposal Kerjasama dari masyarakat dikelola oleh unit fungsi ini untuk menjalankan tanggungjawab sosial korporasi.

2. Keterlibatan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Model CSR di Indonesia seperti ini merujuk kegiatan CSR yang yang biasa dijalankan oleh perusahaan-perusahaan pada negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana cadangan yang diupayakan bergulir abadi untuk kepentingan CSR. Dana abadi (endowment fund) yang diberikan perusahaan dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan Yayasan yang bersifat tidak untuk mencari untung atau non profit (Manullang, 2019) Beberapa yayasan yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu: Djarum Foundation, Yayasan Dharma Bakti Astra, misalnya.

3. Keterlibatan bermitra dengan pihak lain

Korporasi di Indonesia juga seringkali bekerjasama dengan lembaga sosial/ organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah atau universitas

dan media massa, untuk mengelola dana CSR nya maupun dalam melaksanakan kegiatan CSR yang relevan dengan misi strategis perusahaan, misi filantropis, atau misi instrumental meningkatkan citra bisnis. Beberapa lembaga sosial yang seringkali bekerjasama dengan korporasi untuk menjalankan CSR misalnya, antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), Dompet Dhuafa, Yayasan Jantung Indonesia.

4. Keterlibatan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Dibandingkan dengan model keterlibatan CSR lainnya, keterlibatan tanggungjawab sosial korporasi ini lebih berorientasi pada pemberian hibah untuk pembangunan atau. Pihak konsorsium biasanya menugaskan salah satu anggota konsorsium, yang dipercayainya untuk mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan dikembangkanlah program tanggungjawab sosial program yang disepakati bersama. Contoh adalah pembangunan “revitalisasi” kawasan kota tua di Jakarta yang dikelola oleh konsorsium beberapa usaha, antara lain kerjasama anatara Pemerintah DKI, BUMN perbankan, BUMN logistik, pengusaha media massa, dan konsorsium pengusaha kawasan Jababeka.

Bab 12

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

12.1 Pendahuluan

Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah berlaku sejak 31 Desember 2015. Arus bebas tenaga kerja menjadi salah satu agenda utama untuk mendukung pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Agenda ini menjadi perdebatan hangat karena agenda tersebut dapat menjadi peluang atau ancaman bagi Indonesia. Pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia memandangnya sebagai ancaman bagi Indonesia. Bertentangan dengan pendapat tersebut, tulisan ini mengambil posisi yang jelas untuk mendukung bahwa arus bebas tenaga kerja bukan merupakan ancaman bagi Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru untuk melihat liberalisasi pasar tenaga kerja ASEAN bukan sebagai ancaman dengan memberikan temuan-temuan baru secara empiris. Secara teori, tulisan ini akan memberikan temuan empiris baru untuk menjelaskan bahwa arus bebas tenaga kerja bukanlah sebuah ancaman bagi Indonesia. Dalam menganalisa kasus ini, tulisan ini akan menggunakan perspektif liberalis-institusionalis. Secara praktek, tulisan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang ditujukan pada Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dipandang penting adalah karena pengaruh positif dan manfaat dari diberlakukannya free trade di wilayah regional Asia Tenggara. Saat ini pengaruh positifnya belum begitu terasa meskipun MEA telah diberlakukan pada akhir tahun 2015, Tujuan yang akan dicapai oleh MEA adalah terciptanya arus investasi, dan pasar tunggal, kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal, terciptanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, Tujuan tersebut, menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Dengan kehadiran MEA ini, sesungguhnya Indonesia memiliki kesempatan, tetapi Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dan risiko yang timbul bila MEA telah diimplementasi. Hambatan-hambatan yang dimaksud di antaranya: pertama, kualitas pendidikan pekerja masih rendah, Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang, Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menyikapi serbuan impor, dan, Keenam, Laju Peningkatan Ekspor dan Impor, dan Ketujuh Kesamaan Produk.

MEA merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Istilah ini seringkali timbul diberbagai macam media baik cetak maupun elektronik. Istilah ini tentu sangat identik dengan istilah yang telah terlebih dahulu lahir dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Secara umum keduanya hampir sama. Yang membedakannya hanyalah mereka di Eropa sedangkan kita di Asia Tenggara (ASEAN). MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem free trade. Indonesia dan seluruh negara-negara ASEAN lainnya (9 negara lainnya) telah menyetujui perjanjian MEA tersebut atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Economy Community atau AEC.

Pada bulan Oktober 2003 pada saat KTT ASEAN di Bali, Indonesia mengusulkan bahwa MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional dikawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Namun demikian, nyatanya kita mengetahui bahwa tahun 2015 ini merupakan awal tahun diberlakukannya MEA. Hal tersebut selaras dengan Deklarasi Cebu yang menjadi salah satu hasil dari KTT ASEAN yang ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan free trade baik barang maupun jasa, investasi, pekerja profesional, dan juga aliran modal (dana).

MEA akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam sektor pembangunan ekonomi. Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membentuk kemudahan dalam hal pembentukan joint venture (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang sangat potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa. MEA memberi kesempatan kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal memperbaiki kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting. Khusus untuk sektor teknologi, diberlakukannya MEA ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada diwilayah Asia Tenggara. Kelima hal di atas adalah merupakan pengaruh positif atau manfaat diberlakukannya MEA yang mulai berlangsung pada tahun 2015. Selain dari kelima pengaruh positif yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Dari poin-poin di atas adalah merupakan ulasan yang bersifat normatif dan teoritik, tapi pada tataran pelaksanaannya belum tentu dapat terlaksana dengan baik, khususnya bagi negara-negara Asean yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat investasi yang rendah serta produk-produk barang dan jasa secara kuantitatif dan kualitatif juga masih rendah pulah. Sehingga dengan demikian pemberlakuan MEA, pada akhir tahun 2015 tidak selamanya akan berpengaruh positif, baik secara ekonomi, politik, sosial budaya maupun hal-hal yang terhadap negara-negara yang menjadi bahagian dari MEA, termasuk Indonesia (BPS, 2015).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini, kesiapan Indonesia dalam menyikapi MEA 2015 baru mencapai 82 persen. Hal itu ditengarai dari empat (4) isu penting yang perlu segera diantisipasi pemerintah dalam menyikapi MEA 2015, yaitu: 1) Indonesia berpotensi sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industriasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan neraca trade barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah, 2) melebarkan trade barang, 3) membebaskan aliran pekerja sehingga Indonesia harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Pekerja Asing (TKA), dan 4) masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN. Dengan demikian di dalam free trade akan ada hal positif dan negatif yang akan dialami setiap negara yang terlibat di dalamnya. Tantangan bagi Indonesia kedepan adalah mewujudkan perubahan bagi masyarakatnya agar siap menyikapi free trade dimaksud. Dari uraian di atas merupakan penjelasan secara nasional dan tidak diukur dalam perspektif pemerintahan daerah (local government) dan jika diukur dalam skala skill pemerintah, maka tentu ini adalah merupakan tantangan yang cukup berat. Sehingga dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa dengan berlakunya MEA adalah merupakan harapan dan tantangan bagi bangsa Indonesia.

Indonesia dan kesembilan negara anggota ASEAN sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA sendiri memiliki empat pilar sebagai penopang integrasi ekonomi kawasan yaitu (i) pasar tunggal dan basis produksi, (ii) kawasan perekonomian yang kompetitif, (iii) pembangunan ekonomi yang merata, dan (iv) integrasi kedalam perekonomian global (Plummer, Petri, & Zhai, 2014). Arus bebas tenaga kerja merupakan salah satu agenda utama dalam proses integrasi ekonomi ASEAN untuk mewujudkan

pilar yang pertama yaitu pasar tunggal dan basis produksi. Arus bebas tenaga kerja merupakan komponen penting di samping arus bebas barang, jasa, dan investasi. Dalam MEA, ada beberapa profesi yang dapat bergerak secara bebas. Sampai pada awal tahun 2016 sudah ada delapan profesi yang memiliki mutual recognition agreement (MRA) pada level ASEAN. Kedelapan profesi tersebut antara lain: jasa teknik/ insinyur (2005), dokter gigi, perawat (2006), arsitek (2007), tenaga survei (2007), akuntan (2009), praktisi kesehatan (2009), dan tenaga profesional di bidang pariwisata (2012). Kesepakatan arus bebas tenaga kerja tidak hanya berhenti pada delapan profesi itu saja. Kesepakatan baru antar-negara anggota ASEAN dapat menambah profesi lain yang dapat bergerak bebas di kawasan ASEAN melalui MRA (BPS, 2015).

MRA sendiri merupakan sebuah langkah strategis yang coba diupayakan oleh ASEAN untuk memfasilitasi tenaga kerja agar keahlian dan ketrampilannya diakui oleh negara anggota ASEAN yang lain. Selama ini tenaga kerja sudah memiliki keahlian maupun keterampilan, namun negara tujuan di mana mereka ingin bekerja tidak memiliki mekanisme atau standar yang sama dengan negara asal dalam penentuan sertifikasi keahlian dan keterampilan tersebut (Sugiyarto & Agunias, 2014). MRA yang disepakati oleh negara anggota ASEAN membuat keahlian dan keterampilan tenaga kerja diakui kualifikasinya di seluruh negara anggota ASEAN.

12.2 Kronologis Pembentukan MEA

Indonesia termasuk salah satu negara dalam MEA atau ASEAN Economic Community (AEC) yang telah bergulir mulai akhir tahun 2015 yang lalu. MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (ASEAN Summit) ke-5 di Singapura pada tahun 1992 tersebut para Kepala Negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan *free trade* di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Kemudian dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan memperbaiki daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik

investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada 1998.

Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam Deklarasi ASEAN Concord II di Bali pada 7 Oktober 2003 di mana Para Petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015 (nationalgeographic.co.id). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berpengaruh pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (Kualitasal Respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (Non-Interference), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di sektor ekonomi, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC).

Tujuan dibentuknya MEA untuk memperbaiki stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah disektor ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri dari hanya lima negara - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand - yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Percepatan tersebut, mulai dari melaksanakan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu negara bahkan sampai melaksanakan kerjasama global dalam segala sektor untuk dapat memberi kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor

sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya dan faktor daya modal. Lalu, jika melihat bagaimana Indonesia mengelola kelima faktor tersebut, beberapa faktor masih belum dapat dimaksimalkan untuk itu Indonesia dan sembilan negara lainnya membentuk ASEAN Community 2015 atau Komunitas ASEAN 2015 dengan tujuan yang baik bagi negara-negara tersebut oleh karena itu dengan terbentuknya negara-negara ASEAN maka akan dapat merubah negara ini menjadi negara-negara yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dan dapat mengikuti era globalisasi yang semakin maju dan canggih.

Indonesia harus bisa berubah menjadi negara yang lebih kompeten oleh karena itu, ASEAN harus beraktivitas sama mengatasi tiga hal utama. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara-negara ASEAN, antar negara ASEAN, antara ASEAN dengan negara-negara mitra, melalui percepatan implementasi Masterplan on ASEAN connectivity. Kedua memperbaiki kerja sama investasi, industri dan manufaktur lebih erat di antara negara-negara ASEAN. Ketiga, memperbaiki trade intra-ASEAN yang saat ini masih cukup rendah yakni 24,2 persen. Dalam periode tahun 2015-2020 diharapkan trade intra-ASEAN setidaknya bisa mencapai 35 persen-40 persen, semoga dengan tambah berkembangnya semua itu bisa terus memperbaiki kemajuan negara, dengan mengolah dengan baik kekayaan yang tersimpan di tanah air Indonesia kita ini, agar menjadi negara yang makmur dan dapat mengurangi kemiskinan juga pengangguran yang sangat banyak, dengan menciptakan lapangan kerja di sektor perindustrian, pembangunan yang dapat dimanfaatkan rakyat sebagai sumber mencari uang, seperti memperbaiki pasar-pasar, memantau trade export-import dengan negara lain dengan baik. MEA sudah berlaku dan tidak bisa dihindari lagi meskipun banyak kalangan yang beranggapan bahwa tenaga kerja Indonesia belum siap menyikapi persaingan di ASEAN. Siap atau tidak siap MEA tetap berlaku. Masyarakat Indonesia harus memasuki era MEA sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan para elit ASEAN pada 2007 yang tertuang dalam Piagam ASEAN.

Dalam menanggapi agenda arus bebas tenaga kerja tersebut, pendapat masyarakat, praktisi, dan kalangan akademisi terbagi menjadi dua. Ada pihak yang menganggap arus bebas tenaga kerja sebagai sebuah ancaman, sementara ada pula pihak yang menganggap sebagai peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Tulisan ini mengambil posisi pada pendapat yang kedua. MEA bukanlah sebuah ancaman bagi ketenagakerjaan Indonesia, kekhawatiran terhadap ASEAN muncul lebih disebabkan karena pengetahuan masyarakat Indonesia

tentang MEA belum mendalam. Masyarakat Indonesia tidak perlu mengalami kekhawatiran yang berlebihan terhadap MEA. Peluang yang ditawarkan dengan adanya agenda arus bebas tenaga kerja lebih besar dibandingkan kerugian yang mungkin dialami oleh Indonesia. Mengacu pada permasalahan di atas, penulisan artikel ini berdasar pada satu pertanyaan penelitian yang utama yaitu sejauh mana agenda arus bebas tenaga kerja dalam MEA ini dapat memengaruhi kondisi ketenagakerjaan domestik Indonesia?

Tujuan utama dari tulisan ini adalah memberikan perspektif baru dalam melihat era arus bebas tenaga kerja ASEAN sebagai peluang dan bukan ancaman bagi pasar tenaga kerja Indonesia dengan bukti-bukti empiris. Tulisan ini penting karena saat ini anggapan bahwa MEA menjadi ancaman bagi ketenagakerjaan Indonesia lebih dominan di kalangan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran ini dapat menimbulkan sikap pesimis terhadap MEA bahkan pada tingkatan yang lebih ekstrim dapat menimbulkan sikap anti tenaga kerja asing. Optimisme dalam menyikapi arus bebas tenaga kerja ASEAN dengan melihat peluang-peluang yang ada harus dibangun untuk menimbulkan kepercayaan diri tenaga kerja Indonesia dalam bersaing di pasar tenaga kerja ASEAN.

Tulisan ini membahas mengenai dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam memandang fenomena arus bebas tenaga kerja di ASEAN yaitu neo-merkantilis dan liberal institusionalis. Dalam menganalisa isu arus bebas tenaga kerja di ASEAN, pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah liberal-institusionalis. Bagian selanjutnya menjelaskan mengenai kondisi umum ketenagakerjaan Indonesia dalam lingkup ASEAN. Setelah itu, tulisan akan memaparkan analisa apakah arus bebas tenaga kerja ASEAN menjadi ancaman atau bukan dan memberikan penjelasan tambahan bahwa integrasi ASEAN harus dilihat sebagai sebuah kolaborasi bukan kompetisi.

Dua Pendekatan yang Berbeda dalam Memandang MEA. Dalam memandang proses integrasi ekonomi ASEAN, setidaknya ada dua perspektif strategi geopolitik yang menjadi arus utama yang kemudian melahirkan perdebatan mengenai kehadiran MEA sebagai ancaman atau bukan bagi ketenagakerjaan Indonesia. Kedua strategi geopolitik tersebut adalah pemikiran neo-merkantilis dan liberal-institusionalis, di mana kedua perspektif ini memandang MEA dengan cara yang sangat berbeda.

(1) Perspektif Neo-Merkantilis; Dalam era liberalisasi, interdependensi negara-negara di dunia semakin meningkat. Liberalisasi tenaga kerja yang menjadi

salah satu agenda utama dalam MEA juga meningkatkan interdependensi negara-negara anggota ASEAN. Perspektif neo-merkantilis memandang bahwa liberalisasi tenaga kerja ini menimbulkan dilema tersendiri bagi negara-negara anggota ASEAN. Pada satu sisi, negara-negara ASEAN sudah menyepakati pembentukan MEA untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan. Namun di sisi lain ada kekhawatiran negaranya akan dibanjiri tenaga kerja asing dari negara ASEAN lainnya yang merebut pasar tenaga kerja lokal. Tidak terkecuali Indonesia juga menyikapi dilema semacam ini. Salah satu alasannya adalah ketidaksiapan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing pada level ASEAN. Perspektif neo-merkantilis ini memandang bahwa interdependensi antarnegara tidak selalu simetris (Balaam & Veseth, 2001). Maksud dari pandangan ini adalah selalu ada kemungkinan suatu negara lebih bergantung kepada negara lain. Dalam isu ketenagakerjaan di ASEAN, di mana sudah dimulai arus bebas tenaga kerja, ada ancaman bahwa akan banyak tenaga kerja ahli dari negara ASEAN lain yang masuk ke Indonesia. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia belum siap bersaing dengan keahlian yang dimiliki. Hal ini dikhawatirkan akan membuat pasar tenaga kerja domestik Indonesia bergantung terhadap suplai tenaga kerja asing dari negara tetangga. Menurut pandangan neo-merkantilis, secara ideal hanya self-sufficiency yang dapat membuat suatu negara aman secara politik dan ekonomi (Balaam & Veseth, 2001).

Pandangan perspektif neo-merkantilis ini kemudian menganggap tenaga kerja asing dari negara anggota ASEAN lain merupakan ancaman bagi pasar tenaga kerja domestik. Pandangan seperti ini biasanya mendukung kebijakan-kebijakan untuk menghambat arus masuk tenaga kerja asing, jangan sampai pasar tenaga kerja domestik dibanjiri tenaga kerja asing sehingga merugikan kepentingan nasional untuk mengurangi angka pengangguran. Persaingan geopolitik pada saat ini tidak ada bedanya dengan geopolitik seribu tahun yang lalu. Negara bangsa selalu bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan power yang pada akhirnya hanya menciptakan satu pemenang (Mahbubani, 2013). Perspektif ini mendorong para pembuat kebijakan untuk berkompetisi dengan negara lain. Apabila perspektif neo-merkantilis ini diaplikasikan untuk memandang liberalisasi pasar tenaga kerja ASEAN, maka para pembuat kebijakan akan memandang liberalisasi pasar tenaga kerja sebagai ancaman bagi pasar tenaga kerja domestik. Liberalisasi tersebut akan membawa negara-negara ASEAN pada zero sum game di mana antarnegara akan saling berkompetisi dan akan ada pihak yang menang dan kalah. Menang dalam artian mampu mengambil keuntungan dari liberalisasi pasar tenaga kerja dan

kalah dalam artian mengalami kerugian dari liberalisasi pasar tenaga kerja. Perspektif neo-merkantilis dapat memengaruhi para pembuat kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif dengan membuat regulasi yang dapat menghambat arus masuk tenaga kerja asing. Tujuannya adalah mencegah negara lain untuk mengambil keuntungan dari pasar tenaga kerja domestik. Perspektif ini memandang pesimis arus bebas tenaga kerja di ASEAN dapat menguntungkan semua negara.

(2) Perspektif Liberal-Institusionalis; Perspektif liberalisme memandang sifat dasar manusia adalah baik yaitu cinta damai, kooperatif, kompetitif dengan cara yang konstruktif, dan melakukan sesuatu berdasarkan suatu alasan bukan hanya emosi (Balaam & Veseth, 2001). Secara garis besar perspektif ini melihat sifat dasar manusia dalam konteks positif bahwa manusia dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bertolak belakang dengan perspektif sebelumnya, menurut perspektif liberalisme kontestasi geopolitik bisa menjadi sebuah win-win game. Dengan kerja sama antarnegara, zero sum game dapat berubah menjadi win-win game (Mahbubani, 2013). Perspektif ini mendorong para pembuat kebijakan negara-negara di ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan negara lain.

Apabila kita mengaplikasikan perspektif ini dalam memandang fenomena liberalisasi pasar tenaga kerja di ASEAN, ada suatu optimisme bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja sama untuk memanfaatkan pasar tenaga kerja yang terbuka untuk kemajuan bersama. Meskipun ada persaingan dalam pasar tenaga kerja, para aktor yang terlibat akan bersaing dengan cara yang konstruktif tidak seperti apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan yang dipengaruhi oleh perspektif realis misalnya membuat regulasi yang membatasi jumlah atau menghambat masuknya tenaga kerja asing. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia dalam Lingkup ASEAN, Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar di ASEAN. Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 128,30 juta jiwa (BPS, 2015). Jumlah tersebut sangat signifikan mengingat jumlah penduduk ASEAN mencapai sekitar 616.614.000 jiwa pada tahun 2012 (ACIF, 2013).

12.3 Harapan Indonesia Terhadap MEA

Karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi

yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Pengaruh terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di sektor permodalan, barang dan jasa, serta pekerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni pengaruh aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, pengaruh arus bebas jasa, pengaruh arus bebas investasi, pengaruh arus pekerja terampil, dan pengaruh arus bebas modal.

Berpedoman pada karakter dan pengaruh MEA tersebut di atas sebenarnya ada kesempatan dari momentum MEA yang bisa diraih Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Pekerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas beraktivitas di Indonesia. Sebaliknya, pekerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas beraktivitas di negara-negara lain di ASEAN.

Berdasarkan segi liberalisasi trade, produk Indonesia praktis tidak terlalu menyikapi masalah sebab hampir 80 persen trade Indonesia sudah bebas hambatan. Bahkan ekonomi yang berbasis kerakyatan (UMKM) berkesempatan menembus pasar negara ASEAN. Pemerintah telah melaksanakan upaya percepatan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Antara tahun 2011- 2013, investasi Indonesia banyak diarahkan pada wilayah- wilayah di luar pulau Jawa dengan memberi rangsangan tax holiday. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan bukan hanya terpusat di Jawa saja tetapi juga di luar Jawa. Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk kluster untuk pembinaan UMKM agar memiliki daya saing. Bukan hanya tantangan yang akan dihadapi tetapi juga kesempatan. Sektor-sektor yang akan menjadi unggulan Indonesia dalam MEA 2015 adalah Sumber Daya Alam (SDA), Informasi Teknologi, dan Ekonomi Kreatif. Ketiga sektor ini merupakan sektor terkuat Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Selain itu, pengaruh masuknya Pekerja Asing (TKA) ke Indonesia harus dipastikan bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar

Untuk negara Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan trade akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan ekspor. Pada sisi investasi,

kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat menimbulkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dipandang berdasarkan sisi ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik selaras dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat menimbulkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah berkompetisi dengan pekerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membentuk Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan timbul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan skill serta daya saing pekerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri sejak tahun 2015.

Pengaruh positif kehadiran MEA, tentu akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah dengan adanya MEA ini karena dengan terlambatnya perekonomian nasional saat ini dan didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per februari 2014 dibandingkan Februari 2013 hanya berkurang 50.000 orang. Padahal bila melihat jumlah pengangguran tiga tahun terakhir, per Februari 2013 pengangguran berkurang 440.000 orang, sementara. Pengaruh Positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena kompetisi yang ketat dan para professional akan semakin meningkatkan tingkat *skill*, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya.

12.4 Hambatan dan Tantangan Menyikapi MEA

Di samping kesempatan tentu ada pula hambatan menyikapi MEA yang harus kita perhatikan. Hambatan tersebut di antaranya: (a) kualitas pendidikan pekerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia; (b) ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa, sebab menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand; (c) sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi; (d) keterbatasan pasokan energi; (e) lemahnya Indonesia menyikapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia; jika hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia; (f) Laju Peningkatan Ekspor dan Impor; Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi lebih lagi kompetisi

dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India; dan (g) Kesamaan Produk, Kesamaan jenis produk ekspor unggulan (sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik) merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkias 20-25 persen dari total trade ASEAN. Indonesia perlu melaksanakan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk ekspornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara-negara ASEAN.

Homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini *competition risk* akan timbul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam berkompetisi dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan memperbaiki defisit neraca trade bagi Negara Indonesia sendiri. Adapun pengaruh negatif dari MEA adalah bahwa dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan menyebabkan pekerja asing dengan mudah masuk dan beraktivitas di Indonesia sehingga menyebabkan kompetisi pekerja yang semakin ketat di sektor ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, di sektor ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan (Media Indonesia, 27 Maret 2014). Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena setiap negara pasti telah bersiap diri di sektor ketenagakerjaannya dalam menyikapi MEA.

Survei tatap muka yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada tahun 2015 dapat menggambarkan persepsi masyarakat Indonesia secara umum terhadap pemberlakuan MEA. Survei tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memandang MEA merugikan bagi Indonesia. Perbandingannya sangat mencolok, hanya satu responden dari delapan responden yang menilai MEA lebih menguntungkan bagi Indonesia (Kompas, 2015). Hal ini menunjukkan hanya sedikit masyarakat yang melihat MEA sebagai keuntungan bagi Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa ada kekhawatiran berlebihan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Litbang Kompas menyebutkan bahwa kekhawatiran tersebut muncul karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, bahkan dari survei tersebut terlihat bahwa dua dari lima responden tidak mengenal apa itu MEA. Kekhawatiran tersebut

merupakan suatu hal yang wajar, ketika seseorang menyikapi sesuatu yang baru dan tidak mengetahui secara jelas apa yang dihadapinya maka rasa khawatir akan muncul. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai MEA memang masih kurang sehingga menganggap MEA akan merugikan Indonesia. Survei partisipasi publik yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) juga memberikan gambaran kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap ASEAN. Hasil survei INFID menunjukkan bahwa partisipasi warga sangat minim, lebih dari 70% warga Indonesia merasa tidak terlibat dalam penentuan kebijakan dan program ASEAN.

12.5 Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi MEA

Pada saat menjelang MEA, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah strategis dalam sektor pekerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dalam menyikapi MEA, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Trade (www.fiskal.depkeu.go.id). Selain hal tersebut, masing-masing Kementerian dan Lembaga telah berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis.

Untuk menyikapi kompetisi dan free trade dalam skala ASEAN, kebijakan-kebijakan pada berbagai sektor yang telah diproduksi oleh pemerintah tidak hanya berskala nasional (sentralistik) tapi juga harus bersifat desentralistik (otonom), sebab jika kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah untuk menyikapi MEA hanya bersifat sentralistik, maka tentunya akan terjadi disparitas dan ketimpangan yang pada akhirnya menjadikan daerah semakin tertinggal dan tidak bisa berkompetisi yang pada akhirnya akan menjadi hambatan secara nasional.

Selama ini ada kecenderungan pemerintah membentuk kebijakan yang bersifat elitis dan sangat birokratis, sehingga seringkali pemerintah tidak memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan yang selaras dan selaras dengan kepentingan daerahnya. Maka dengan itu

Pemerintah harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk membentuk kebijakan berdasarkan kebutuhan daerahnya dan mengubah paradigma kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan daerah demi terciptanya akselerasi pembabgunan nasional dan pembagunan daerah. Dan untuk bisa menyikapi kompetisi MEA, tidak hanya swasta (pelaku usaha) yang dituntut harus siap namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro pengusaha.

Sebagaimana pada Negara lain sudah berpikir secara entrepreneurial (wirausaha), bagaimana agar pemerintah berjalan dan berfungsi laksana sebuah organisasi entrepreneurship yang berorientasi pada hasil. Maka dengan momentum MEA ini sudah tiba saatnya pemerintah Indonesia mengubah pola pikir lama yang cenderung birokratis dengan pola pikir entrepreneurship yang lebih taktis, efektif dan efisien. Sebagai contohnya adalah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 300 triliun (US\$ 30 miliar) yang kurang produktif diarahkan kepada pembiayaan yang lebih produktif misalnya investasi infrastruktur. Dalam sektor pendidikan, Pemerintah harus dapat melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan yang selaras dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi solusi terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Oleh karena itu memperbaiki standar kualitas sekolah menjadi keharusan agar lulusannya siap menyikapi kompetisi (INFID, 2015).

Kegiatan sosialisasi pada masyarakat juga harus ditingkatkan misalnya dengan Iklan Layanan Masyarakat tentang MEA yang berusaha menambah kesiapan masyarakat menyikapinya. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, memperbaiki standar kualitas pendidikan salah satunya dengan menguatkan aktor pendidikan, yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua. Menurutnya, kepemimpinan kepala sekolah menjadi kunci tumbuhnya ekosistem pendidikan yang baik. Guru juga perlu dilatih dengan metode yang tepat, yaitu mengubah pola pikir guru.

Dalam sektor Perindustrian, pemerintah harus memperbaiki industri mulai dari hulu ke hilir dalam melaksanakan beberapa pendekatan dan strategi. Dari pemetaan Kemenperin, produk unggulan dimaksud adalah industri agro seperti kakao, karet, minyak sawit, tekstil dan produk tekstil, alas kaki kulit, mebel, makanan dan minimum, pupuk dan petrokimia, otomotif, mesin dan peralatan, serta produk logam, besi, dan baja. Adapun strategi defensive dilakukan melalui penyusunan Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk manufaktur (www.kemenperin.go.id).

Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan strategi substitusi impor untuk memperbaiki ekspor, dan memberi nilai tambah produk dalam negeri. Pada tahun 2014 dinyatakan bahwa 65 persen ekspor produk Indonesia masih memprioritaskan komoditas mentah. Pemerintah berusaha membalik struktur ekspor ini yaitu dari komoditi utama ke manufaktur, dengan komposisi 35 persen komoditas dan 65 persen manufaktur. Oleh karena itu, industri manufaktur diharapkan tumbuh dan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, untuk memperbaiki ekspor sampai 2019.

Pemerintah juga mendekati industri yang berpotensi menyumbang peningkatan ekspor, misalnya industri otomotif. Diketahui, industri otomotif berencana mengekspor 50 ribu sepeda motor ke Filipina. Kementerian Perdagangan juga mendorong sektor mebel untuk semakin memacu ekspornya. Selain itu, sektor perikanan juga memberi optimisme terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Diharapkan pemerintah juga akan memperkokoh produk UKM dengan membina melalui kemasan, sertifikasi halal, pendaftaran merek, dan memperbaiki daya saing produk dalam negeri. Kemudian mereka juga membantu pelaku UKM dalam pameran berskala global. Melalui fasilitas itu, Kementerian Perdagangan berharap, produk serta merek yang dibangun oleh pelaku UKM di Indonesia dapat dikenal secara global (INFID, 2015).

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau catatan bagi dunia ketenagakerjaan ketika negara Indonesia akan memasuki MEA; (1) dari sisi peraturan regulasi di sektor ketenagakerjaan. Meskipun sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang tersebar di berbagai peraturan regulasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komprehensif di sektor ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagai aturan main dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat memasuki MEA; (2) dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Indonesia. Kompetisi SDM antarnegara ASEAN merupakan hal yang pasti terjadi saat terbukanya gerbang MEA nanti. Bila pekerja Indonesia tidak siap menyikapi kompetisi terbuka ini, MEA akan menjadi momok bagi pekerja Indonesia karena akan kalah berkompetisi dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya; (3) dari penegak hukum khususnya supervisor ketenagakerjaan. Supervisi ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan selaras dengan ketentuan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “dalam mewujudkan pelaksanaan

hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melakukan supervisi dan penegakan peraturan regulasi ketenagakerjaan”. Dalam menyikapi MEA, posisi supervisor ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan industrial agar semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja dalam menyikapi kompetisi global ini. Langkah strategis harus dilakukan pemerintah untuk memenangi MEA di antaranya: Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik. Memperbaiki *skill* pekerja selaras standar global, Memperbaiki kualitas dari barang yang diproduksi Indonesia. Setiap barang yang di ekspor harus bisa lulus dalam supervisi yang ketat.

Daftar Pustaka

- A.Hardjana, A. (2008) 'Komunisasi dalam menejemem reputasi korporasi', pp. 1–24.
- Abbas, S.M. Ali; Bouhga-Hagbe, J. (2011) Fiscal Policy and the Current Account.
- Abdi, H. (2019) '5 Penyebab Kemiskinan dan Definisinya yang Wajib Diketahui'. Jakarta: Liputan 6. Available at: <https://hot.liputan6.com/read/3936545/5-penyebab-kemiskinan-dan-definisinya-yang-wajib-diketahui>.
- Abdul O. S., (2018) "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi" Universitas Airlangga.
- Abdullah, I. (2012) 'Tantangan pembangunan Ekonomi Dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya', *Humaniora*, 14(3), pp. 260–270. doi: 10.22146/jh.v14i3.762.
- Abisono, F. G. (2018) Pengujian Terhadap Assesment Model BUM Desa Inovatif (Studi Kasus BUM Desa Panggung Lestari , Desa Panggunharjo , Kabupaten Bantul) DESA “ APMD ” YOGYAKARTA Oktober 2018. Yogyakarta.
- Addae-korankye, A. (2014) 'Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature', *American International Journal of social Science*, 3(7), pp. 147–153.
- Ahmad M., dan Latri W., (2008) "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1, April 2008.
- Al-Ghaziy, S. ibn M. (2005) *Fath-Qarib*. 1st edn. Beirut, Libanon: Daar Ibn Hazm.

- Albrecht, S. (2013) *Handbook of Employee Engagement*, Handbook of Employee Engagement. doi: 10.4337/9781849806374.
- Alif, M. R. (2014) 'Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), p. 406. doi: 10.21143/jhp.vol44.no3.29.
- Alma, D. et al. (2011) PERUSAHAAN BUMN :
- Anidiobu, Gabriel A.; Okolie, P. I. P. (2016) 'Responsiveness of Foreign Exchange Rate to Foreign Debt: Evidence from Nigeria', *International Journal of Arts Humanities and Social Sciences*, 1(5), pp. 11–20.
- Anisa F., Deden D. I., (2018) "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) Jawa Tengah" *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 No. 3, 46-70.
- Anita R., Soekartono., (2015) "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktural Di Provinsi Jawa Timur" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Tahun XXV, No.1 April 2015.
- Arfianto, A. E. W. and Balahmar, A. R. U. (2014) 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa', *Jkmp*, 2(1), pp. 1–102.
- Arifin I., Gina H., (2009) "Membuka Cakrawala Ekonomi" Salemba Empat, Jakarta.
- Arsiyah, Ribawanto, H. and Sumartono (2009) 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa', *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 12(2), pp. 370–375.
- Arsyad L., (2004) "Ekonomi Pembangunan" STIE – YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, L. (2010) *Ekonomi pembangunan*. Bag. Penerb. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-YKPN.
- ASEAN. (2014). *ASEAN Community in Figures 2013*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Asu, I. M. and Yoga, D. (2017) 'STATUS KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO SETELAH DIKUASAI OLEH PIHAK SWASTA STATUS OF OWNERSHIP OF STATE-OWNED ENTERPRISE (BUMN) PERSERO AFTER RESPECTED BY PRIVATE PARTIES', *Jurnal IUS*, 5(2).

- Auerbach, A. J. . and Gorodnichenko, Y. (2012) OUTPUT SPILLOVERS FROM FISCAL POLICY.
- Azam, Muhammad; Emirullah, Chandra, Prabhakar, A.C.; Khan, Q. (2013) 'The Role of External Debt in Economic Growth of Indonesia –A Blessing or Burden', *World Applied Sciences Journal*, 25(8), pp. 1150–1157.
- Badan Pusat Statistik. (2015) *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bagos A., (2002) "Perubahan Struktur Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia Dengan Kerangka Analisis Chenery dan Syrquin" Universitas Airlangga.
- Bahri Nurdin, (1989). Partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri, dalam "Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990", (Jakarta: UII Press, 1989), hal. 379.
- Balaam, D.N. dan Veseth, M. (2005) *Introduction to International Political Economy Third Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bank Indonesia, (2015) "Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural", Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia., (2019) "Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju" Bank Indonesia, Jakarta.
- Baswir, Revrisond. (1997), *Koperasi Indonesia*, BPFE Universitas Gajahmada, 1997
- Bi, H. (2011) *Sovereign Default Risk Premia, Fiscal Limits and Fiscal Policy*.
- Biro Anapel, A. (2013) *Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Indonesia*, doksekjen. Available at: http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_capaian_pertumbuhan_ekonomi_berkualitas_di_indonesia20140821142017.pdf.
- BPS, I. (2018) *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017*. Available at: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.

- Budiharsono, S. (1996) "Transformasi Struktural Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia" Institut pertanian Bogor, Bogor.
- Budiono, (1992) "Teori Pertumbuhan Ekonomi" Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, PBFY Yogyakarta, Hal 1.
- Candra, T. and K, A. (2015) 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kota Makassar', *Journal Uin Alauddin*, 1(1), pp. 1–21. Available at: journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/1248/1203.
- Caroll, AB (2016) "Caroll's Pyramid of CSR: taking another look," *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(3)
- Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2005). *Business And Society: Ethics And Stakeholder Management*. Toronto, Thomson Nelson
- Chaniago, Arifinal. (1984). *Perkoperasian Indonesia*, angkasa, Bandung,
- Chenery H. B.,(1979) "Structural Change and Development Policy" Baltimore John Hopkins, Univesity Press.
- Chung, K. (2010) 'Foreign Debt, Foreign Direct Investment and Volatility', *International Economic Journal*, 24(2), pp. 229–254.
- Cimadomo, J. (2008) *Fiscal policy in real time*.
- Currid-Halkett, E., Stolarick, K., (2013). *Baptism by fire: did the creative class generate economic growth during the crisis?* *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 6, 55–69.
- D'Costa, D., Bodolica, V. and Spraggon, M. (2018) 'In the uncertain world of Qontrac International: navigating through family, growth and succession management challenges', *Emerald Emerging Markets Case Studies*. doi: 10.1108/EEMCS-06-2018-0153.
- Davig, T. and Leeper, E. M. (2009) *MONETARY-FISCAL POLICY INTERACTIONS AND FISCAL STIMULUS*.
- Deddy M., Sonny I., (2013) "Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Potensial Wilayah Pengembangan" *Jurnal Social Economic of Agriculture*, Volume 2, Nomor 1, April 2013, 7 -28.

- Doraisami, A. (2011) *The global financial crisis: Countercyclical fiscal policy issues and challenges in Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore.*
- Dumatry. (1996). *Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli.* <http://ngobrolpikiran.blogspot.co.id/2016/01/sitem-ekonomi.html>
- Edilius dan Sudarsono. (1994). *Manajemen Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,*
- Edwin, B., (2018) ” *Siklus Keuangan dan Krisis Keuangan di Indonesia*” Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Emi S., (2006) ”*Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia*” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*” Volume 4, Nomor 1/2006, 19 - 29.
- Erianto, D. (2015) *MEA, Antara Peluang dan Ancaman.* (Online) Kompas, 1 Desember 2015, Tersedia dalam: (<http://print.kompas.com/baca/2015/12/01/MEA%2c-Antara-Peluang-dan-Ancaman.>) [diakses 2 Nopember 2020]
- Eva, A. (2007) ‘*Persepsi Penggunaan Aplikasi Internet Untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah*’, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi. doi: 1907-5022.
- Freeman, R. E., & Mc Vea, J. (2001). “A stakeholder approach to strategic management” Working Paper No. 01-02. Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia
- Friedman, M. (1970) *The social responsibility of business is to increase its profits.* The New York Times Magazine September 13
- Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999*
- Garuda, K. P. T. and Pendahuluan, I. (2011) ‘*Privatisasi Bumn Dan Perannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional*’; *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No, pp. 371–394.
- Gilarso. (1992). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro.* Kanisius. Yogyakarta.
- Ginting, E.D., others, (2017). *Efektivitas Perlindungan Paten Sederhana Berbasis Pengetahuan Tradisional Sebagai Produk Ekonomi Kreatif.*

- Group, W. B. (2017) *The Distributional Impact of Taxes and Transfers*. Edited by N. Inchauste, Gabriela; Lustig. New York: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Hajji, A. (2010) 'Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Riau 2002-2008', MT-Ekonomi and Manajement Institut Teknologi Bandung. Available at: <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40851>.
- Harmiati and Zuhakim, A. A. (2018) 'Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN', *Jurnal Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia*, pp. 1–12. Available at: <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomi-unihaz.pdf>.
- Hartono, S. (2005) *ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)*.
- Hendar dan Kusnadi. (1999). *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta,
- Hendrojogi. (2000). *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hildegunda, W. (2010) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Hirschman A., (1958) "The Strategy Of Economic Development" New Haven. Yale University.
- Houghton, J. and Shahidur, R. K. (2009) *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC, USA: World Bank. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11985/9780821376133.pdf>.
- Howkins, J., (2002). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin UK.

- Husaeni, U. A. (2017) 'Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)', *Journal of Empowerment*, 1(1), pp. 1–12. doi: 10.35194/je.v1i1.16.
- Hutagalung, S., Mulyana, N., Hermawan, D., (2019). Makalah Berjudul: Pendayagunaan Website Desa Sebagai Media Inovasi Desa Di Desa Bernung Dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- Ikhwansyah, I., Chandrawulan, A. and Amalia, P. (2018) 'Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)', 25(2), pp. 150–161. doi: 10.18196/jmh.2018.0110.150-161.
- Ilham Aldelano Azre (2017) 'Analisis Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar) b) Menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk kuantitas maupun kualitas yang', (*JAKP*) *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, II(31).
- ILO & ADB. (2014) *ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity*. Thailand: ILO dan ADB.
- Imamudin Y., (2000) "Pola Perubahan Struktur Ekonomi" *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*" Volume 1 No 1, April 2000, 14 – 28.
- Indonesia, P.R., (2009). Instruksi Presiden tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Inpres Nomor 6 Tahun 2009. Jakarta, DKI: Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Diakses dari http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/7193_2610-Inpres6Tahun2009.pdf.
- Indonesia, R., (2015). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indrati Rini (2002) 'PERSAINGAN USAHA DIANTARA PERUSAHAAN NEGARA, SWASTA, DAN KOPERASI', *Perspektif*, VII(2).
- INFID. (2015) Prosiding Seminar Akhir Tahun 2015 Catatan INFID atas Kinerja ASEAN. Dalam: Seminar Akhir Tahun Catatan INFID Atas Kinerja ASEAN, Jakarta, 17 Desember 2015. Tersedia dalam: (<http://infid.org/wp-content/uploads/2016/01/Prosiding-ASEAN-adalah-Kita-Desember-2015.pdf>.) [diakses 2 Nopember 2020.]

- Jaelani, A. (2016) Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective.
- Jayani, D. H. (2020a) 'Proyeksi Bank Dunia, Kemiskinan Indonesia 2020 Bisa Sampai 11%', Katadata.co.id. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/21/proyeksi-bank-dunia-kemiskinan-indonesia-2020-bisa-sampai-11>.
- Jayani, D. H. (2020b) 'Tingkat Kemiskinan Terbesar Indonesia Ada di Wilayah Ini', Katadata.co.id. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/16/tingkat-kemiskinan-terbesar-indonesia-ada-di-wilayah-ini#>.
- Jhingan, M., (2008). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi ke-16. Jakarta. Rajagrafindo.
- Jhingan, M.L. (2003) "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karina C., (2012) "Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Bank Indonesia, Jakarta.
- Kartini, F. (2016) Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Universitas Negeri Makassar.
- Kemenkeu (2018) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu', Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. (2012). Laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi.
- Kotler, Philips dan Lee, Nancy (2005) "Corporate Social Responsibility; Doing the. Most Good you're your Company and Your Cause" . NewJersey;. JohnWiley& Sons
- Kreatif, B.E., (2015). Laporan PDB Ekonomi Kreatif Tahun 2014-2016. BEKRAF. Jakarta. Badan Ekonomi Kreatif.(2017). Rencana Pengembangan Kuliner Nasional 2019, 2015-2019.

- Kuncoro, M. (2015) Indikator Ekonomi: Mudah Memahami dan Menganalisis. Cetakan 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kuncoro, M., (1997) "Ekonomi Pembangunan" UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, M., (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M., (2010) "Ekonomi Pembangunan Masalah, Kebijakan dan Politik" Erlangga, Jakarta.
- Kusumaputra, A. (2017) 'Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Otonomi Desa', *Perspektif*, 22(1), pp. 55–65. doi: 10.30742/perspektif.v22i1.605.
- Lasmarita Nugra Gesty*, E. S. P. A. S. (2016) 'PELAKSANAAN TUGAS BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA'.
- Lawrence, Anne T.(2017) "Business And Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy," New York:McGraw Hill Education
- Lestari Kurniawati (2017) 'OPTIMALISASI PENERIMAAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA', *Manajemen Keuangan Publik*, 1(2).
- Logsdon, Jeane dan Wood, Donna (2005) "Global Business Citizenship and Voluntary Codes of Ethical Conduct" *Journal of Business Ethics* ,volume 59, hal. 55–67
- M. Bugis., (2011) "Analisis Struktur dan Pola Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur" *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Volume 2 No.1 Universitas Pattimura.
- M. Iqbal Asnawi (2016) 'IMPLIKASI PENGELOLAAN BUMN PERSERO DALAM KERANGKA WELFARE STATE BERDASARKAN MEKANISME PERSEROAN TERBATAS.', *Samudra Keadilan*, 11(April), pp. 126–144.
- Mahbubani, K. (2013) *The Great Convergence*. New York: PublicAffairs.
- Mahmuddin Yasin (2002) *Reformasi BUMN: Upaya Menata Ulang Peran Pemerintah dalam Dunia Usaha*.

- Maipita, I. (2014) Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. Jakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Malik, Shahnawaz; Hayat, Muhammad Khizar; Hayat, M. U. (2010) 'External Debt and Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan', *International Research Journal of Finance and Economics*, 44, pp. 1-9.
- Mankiw, Romer dan Weil, (2006) "Makroekonomi Edisi Keenam" Erlangga, Jakarta.
- Manullang, Sarjana Orba, 2019, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bidik Phronesis Publihing
- Masoud, Najeb (2017) "How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR" *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2 (4), hal. 1-22
- McEachern, William A, *Economics: A co temporary Intruction*, Alih Bahasa. Sgit Triandaru., Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Meily I. P., Ibrahim, Hidayah D. A. (2011) "Apakah Perkembangan Finansial Meredam atau Memperbesar Dampak Suatu Kejutan?", *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2011.
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2017) *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.*
- Michael T., (2000) "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga" Erlangga, Jakarta.
- Mishkin, F. S. (2011) *MONETARY POLICY STRATEGY: LESSONS FROM THE CRISIS.*
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J.(1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of management review*, 22(4), 853-886.
- Mochamad Muslih (2019) 'TATA KELOLA BERKELANJUTAN BAGI BUMN BIDANG KEUANGAN NON PUBLIK', *Firm Journal of Management Studies*, 4(2), pp. 200-217.
- Moelyono, M., (2010). *Menggerakkan ekonomi kreatif: antara tuntutan dan kebutuhan.* Rajawali Press.

- Moon, Jeremi, Kang, Nahee dan Pscal-Gond, Jeang (2010) Corporate Social Responsibility and Government, In “ the Oxford Handbook of Business and Government,” Editor David Coed Wyn Grant, Graham Wilson, New York: Oxford University Press
- Mountford, Andrew; Uhlig, H. (2008) WHAT ARE THE EFFECTS OF FISCAL POLICY SHOCKS?
- Mubyarto. (2000). Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta,
- Munker, Hans H, (2001). Rediscovery of Co-operatives in Development Policy (Penemuan Kembali Koperasi Dalam Kebijakan Pembangunan), Alih Bahasa (Maria P.N.), Yakoma PGI, Jakarta
- Mutis, Thoby. (1992). Pembangunan Koperasi, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta,
- Nainggolan, L. E. (2017) ‘An Analysis Of Education, Unemployment, Average Consumption Per Capita On Poverty In North Sumatera, 2015’, JURNAL KEBANGSAAN, 6(12), pp. 51–63. Available at: <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/571118>.
- Nainggolan, L. E., Yuniningsih, Sahir, S. H., Faried, A. I., Hasyadi, K., Widayastuti, R. D., Saragih, S. L., Anggraini, F. D. P., Surbakti, E., Pakpahan, M., Yuliani, M., Pane, H. W., Kartika, L., Hulu, V. T., Sianturi, E., Hastuti, P., Tasnim and Airlangga, E. (2020) Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan. 1st edn, Yayasan Kita Menulis. 1st edn. Edited by J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kitamenulis.id/unduh-file/>.
- Nawawi (2010) ‘ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DAN REALITAS KESIAPAN SUMBER DAYA’, Masyarakat Indonesia, XXXVI(2), pp. 25–47. Available at: <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/download/636/428>.
- Niemietz, K. (2011) A new understanding of poverty: poverty measurement and policy implications, The Institute of Economic Affairs Monographs. London: The Institute of Economic. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1750203.
- Nurmalita, A. and Suryandari (2017) ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014’.

- Nurul F., Mudrajad K., (2016) "Perubahan Struktur Ekonomi, Dekomposisi Sumber Pertumbuhan Output, dan Pertumbuhan Total Factor Productivity" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 8 No.2, 2016.
- Panizza, Ugo; Sturzenegger, Federico; Zettelmeyer, J. (2009) 'The Economics and Law of Sovereign Debt and Default', *Journal of Economic Literature*, 47(3), pp. 1–47.
- Permana, R. (2016) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur', *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 18(2), pp. 111–129. Available at: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/862>.
- Plummer, M.G., Petri, P.A., & Zhai, F. (2014) *Assesing the Impact of ASEAN Economic Integration on Labour Markets*. ILO Asia-Pacific Working Paper Series.
- Potts, J., Cunningham, S., Hartley, J., Ormerod, P., (2008). Social network markets: a new definition of the creative industries. *Journal of cultural economics* 32, 167–185.
- Prahalad, CK and Hart, S (2002) "Fortune at Bottom of Pyramid pp. 720-732 in *Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality* " (5th Ed), Wiley: UK
- Prasetya, Agustian B (2019) "Managemen Pengetahuan Konsep Dasar dan Aplikasi" Tangerang: Mahara Publishing
- Purnomo, R.A., (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Purwanto, E. A. (2007) 'Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), pp. 295–324.
- Putri Keumala Sari, Fakhruddin. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 Dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.1 No.2 November 2016: 377-388*

- R., T. W. (2009) 'Kemiskinan Dan Bagaimana Memeranginya', *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(7), pp. 56–65. doi: 10.31942/akses.v4i7.514.
- Rahardja, P. and Manurung, Ma. (2016) *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Rahayu, M. and Budi, A. (2013) 'Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa', Jakarta, www.kelembagaandas.wordpress.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H. and Suwondo (2013) 'Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa', *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), pp. 1068–1076.
- Ramly, A. R. et al. (2018) *Ekonomi Desa: Analisa Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa*. Aceh: AVG Advertising.
- Reza, T. S. and Hermawansyah, W. (2019) 'Masa Depan Bisnis Kreatif Diera Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Kebijakan Sektor Publik, Bisnis Dan Perpajakan', *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(1), pp. 48–52. doi: 10.31334/bijak.v16i1.323.
- Ridhwan, Masagus M.; de Groot, Henri L.F.; Rietveld, Piet; Nijkamp, P. (2011) *The Regional Impact of Monetary Policy in Indonesia*.
- Rifai, B. (2014) 'Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), pp. 165–181.
- Rinaldi S., (2017) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2017.
- Rizal, Y. (2018) *Guyub Ekonomi Desa: Kajian Kewirausahaan Untuk Desa Mandiri Dan Sejahtera*. doi: 10.31227/osf.io/ejn2k.
- Rudriger D.,(2006) "Ekonomi Makro Edisi Ke Delapan" Media Global Edukasi, Jakarta.
- Rustanto, B. (2015) *Menangani Kemiskinan*. 1st edn. Edited by P. Latifah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Saputra, Y. E. (2016) Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Desa (Kasus Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Institut Pertanian Bogor. Institute Pertanian Bogor.
- Sardiman, A.M. (2006). *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sartika P., Tiktik, (1998). *Pengantar Ilmu Ekonomi Koperasi*, Universitas Trisakti, Jakarta,
- Sayuti, H. M. (2011) 'Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala', *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 03(02), pp. 717–728.
- Schumpeter J.A., (1912) "The Theory of Economic Deelopment" Cambridge Mass, Harvard Univesity Press.
- Schumpeter, J. A., (1991) "The Theory of Economic Development" Cambridge Mass, Harvard University Press.
- Sidik, F. (2015) 'Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa', *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. doi: 10.22146/jkap.7962.
- Sidik, F. (2017) 'Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA): Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi', *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5Dengan(3), pp. 36–46.
- Sisilia K., Sutomo W.P., Agnes L., (2016) "Analisis Struktur Perkonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Ternate" *Jurnal Berkala Ilmiah*, Volume 16 No.2 Tahun 2016.
- Sitepu Camelia Fanny, Hasyim, (2018). "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia" (Medan: Niagawan)
- Sodik, Jamzani, Didi N., dan Dedi I., (2007) "Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi Peran Karakteristik Regional" *Parallel Session IVA, Urban and Regional*, Fakultas Ekonomi UPN Veteran.
- Soit, C. (2000) 'm A am M e e m m', V(C), p. 2000.
- Spilimbergo, Antonio; Symansky, Steve; Blanchard, Olivier; Cottarelli, C. (2009) 'Fiscal Policy For The Crisis', *CESifo Forum*, 10(2), pp. 26–32.

- Statistik, B.P., (2017). Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2016. Jakarta.
- Subandi, (2005) Sistem Ekonomi Indonesia, Alfabeta, Bandung
- Subandi, (2019). Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik), Alfabeta, Bandung
- Subandi, (2019). Koperasi dalam Teori dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyarto, G. & Agunias, D.R. (2014) A 'Freer' Flow of Skilled Labour within ASEAN: Aspirations, Opportunities and Challenges in 2015 and Beyond. Issue in Brief: A Joint Series of the IOM Regional Office for Asia and the Pacific and the Migration Policy Institute, Issue No. 11, Desember 2014.
- Sukirno S., (2008) "Teori Pengantar Makro Ekonomi" PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sukirno, S., (2006) "Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan" Jakarta Putra Grafika, Jakarta.
- Suleman, A. R., Ahdiyati, M., Nainggolan, L. E., Rahmadana, M. F., Syafii, A., Susanti, E., Supitriyani, S., Siregar, R. T. and Wahyuddin, W. (2020) Ekonomi Makro. Yayasan Kita Menulis. Available at: https://books.google.co.id/books?id=Ib_yDwAAQBAJ.
- Sumarsono, D. (2016). Sistem Perekonomian Negara-Negara Di Dunia. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 16(02).
- Suryawati, C. (2005) 'Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding', JMPK, 8(3), pp. 121-129. Available at: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/viewFile/2927/2646>.
- Sutoro, E. et al. (2014) Desa Membangun Indonesia, Academia.Edu. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Available at: http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf.
- Suwardi, M. and Prasetyo, E. (2018) 'Efisiensi Teknis Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Bidang Jasa Produksi Provinsi Jawa Tengah', Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 19(1), pp. 11-20. doi: 10.18196/jesp.19.1.4111.
- Sya'bani, R. (2016) 'Lingkaran Kemiskinan'. Available at: <https://rifkisyabani.wordpress.com/2016/10/12/lingkaran-kemiskinan/>.

- Syrquin H., (1985) "Patterns Of Structural Change" Dallah Hollis Chenery dan TN Srinivasan, Handbook of Development Volume II.
- Tambunan T., (2000) *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*" Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tambunan. T., (2001) "Transformasi Ekonomi di Indonesia" Salemba, Jakarta
- Tasruddin, R. (2018) 'Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah', *Jurnal Komodifikasi*, 2(1), pp. 48–59. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Komodifikasi/article/download/5500/4849>.
- Taylor, J. B. (2000) 'Reassessing Discretionary Fiscal Policy', *Journal of Economic Perspectives*, 14(3), pp. 21–36.
- The Banker. (1997). *Asian Meltdown*
- Todaro M.P., (1991) "Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Empat" Erlangga Jakarta.
- Todaro M.P., (2000) "Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sembilan" Erlangga Jakarta.
- Todaro M.P dan Smith S.C (2001) "Pembnagunan Economi Jilid 1 dan 2" Erlangga, Jakarta.
- Todaro M.P., (1998) "Economic Development in The Third World" Adisson Wesley Longman Limited. Essex.
- Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2013) *Pembangunan Ekonomi Jilid 1. 11th edn.* Edited by D. Barnadi, S. Saat, and W. Hardani. Erlangga.
- Todaro, M.P., Smith, S.C., (2003). *Pembangunan Ekonomi di dunia. Ketiga Edisi Keenam (terjemahan)*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith., (2008) "Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sembilan" Erlangga, Jakarta.
- Trade, U.-U.N.C. on, Development, (2008). *Creative economy report 2008.* Unctad/Division of International Trade and Commodities Génova/Nueva York.
- Tulus T.H. Tambunan. (2015). *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (2004) 'Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah', p. 249. Available at: <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian.
- UNDP. (2014) Key to HDI Countries and Ranks. (Online) UNDP. Tersedia dalam: (<http://hdr.undp.org/sites/default/files/ranking.pdf>) [diakses pada 2 Nopember 2020]
- United Nations Corporate Social Responsibility, Chapter XX. Sumber : <https://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2001/20%20Corporate%20social%20responsibilities.pdf>, diakses 5 November 2020.
- Untoro J., (2010) "Ekonomi Makro" Kawah Media, Jakarta.
- Vasco, C. and Woodford, M. (2009) CREDIT SPREADS AND MONETARY POLICY.
- Vebiola Jesika Terok, Daisy S.M Engka, S. Y. . T. (2019) 'ANALISIS KOMPARATIF KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA', Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(02), pp. 108–118.
- Waluyo, I. and Badan (2004) 'MENYIKAPI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG KURANG SEHAT', JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA, III(1), pp. 51–58.
- Wati (2016) Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muda. Universitas Halu Oleo.
- Weiss J., (1998) "Industry in Developing Countries : Theory, Policy and Evidence" Roudledge London.
- Weiss, Joseph H. (2009) "Business Ethics: a Stakeholders and Issues Management Approach," Mason: South-Western Cengage Learning

- Werning, I. (2011) *MANAGING A LIQUIDITY TRAP: MONETARY AND FISCAL POLICY*.
- Widianto, S. (2014) *Jelang MEA 2015 Baru 2,1 Juta Tenaga Kerja Miliki Sertifikasi Kompetensi Kerja*. (Online) *Pikiran Rakyat*, 1 November 2014. Tersedia dalam: (<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/11/01/303004/baru-21-juta-tenaga-kerja-miliki-AAsertifikasi-kompetensi-kerja>.) [diakses 1 Nopember 2020]
- Widiyanti, Ninik, (1994). *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Widiyanti, Ninik, Sunindhia YW, (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Adiaksara, Jakarta,
- Winardi. (1990). *Ilmu Ekonomi (AspekAspek Sejarahnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- World Bank, B. (2020) *Poverty in The World*. Amerika Serikat. Available at: https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/280002-jumlah-pengangguran-2014-2019.
- Yansyab, A. (2009) ‘DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH *’, IV(2), pp. 79–96.
- Yesi H., S., Jen T., Recky H. E. S., (2013) ‘The Economic Growth and The Regional Characteristics : The Case of Indonesia’, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli 2013, Bank Indonesia, Jakarta.
- Zulkarnaen, R. M. (2016) ‘Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta’, *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), pp. 1–4

Biodata Penulis



Valentine Siagian, S.E., Ak., MAk., CA., Ph.D lahir di Bandung pada tanggal 27 April 1989. Ia menyelesaikan kuliah jurusan Akuntansi dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Advent Indonesia pada 17 Februari 2010. Pada tahun 2013 mengikuti program Dual Degree untuk Pendidikan Profesi Akuntansi dan Magister Akuntansi dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dan lulus pada tanggal 25 Februari 2016. Di tahun yang sama, pada bulan Maret 2016 langsung melanjutkan Program Doktorat dengan beasiswa penuh dari Yuan Ze University, Taiwan dan menyelesaikan pendidikan S3 dengan gelar Doctor of Philosophy pada Desember 2019. Sejak tahun 2018 menjadi Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Advent Indonesia, Bandung.



Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE., M.Si, lahir di Medan pada tanggal 14 September 1977. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi UMSU tahun 2000. Meneruskan studinya dan memperoleh gelas Magister Sains bidang Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala tahun 2004. Kemudian menyelesaikan program doktor Ilmu Perencanaan Wilayah pada tahun 2012 di Universitas Sumatera Utara. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Aktifitas lain penulis saat ini adalah menjadi salah satu Wakil Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2016. Selain itu penulis juga menjadi konsultan pada lembaga konsultan

Banyaneer yang berdomisili di Adelaide – Australia untuk monitoring dan evaluasi, baseline, midline dan endline survei yang dilakoninya sejak tahun 2010.



Edwin Basmar, lahir di Makassar, menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin, serta mengikuti Pendidikan Doktor di Northern Illinois University Amerika Serikat, melalui Program Sandwich, dengan konsentrasi keilmuan pada bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Moneter, menjalankan aktivitas sebagai Pengamat dan Peneliti di Bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Moneter pada Bank Sentral.



Pratiwi Bernadetta Purba, M.M, M.Pd Lahir di Medan pada tanggal 24 Maret 1990. Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Manajemen dari Universitas HBKP Nommensen dan Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan. Sejak tahun 2012 hingga saat ini aktif berkarir sebagai guru.



Lora Ekana Nainggolan, S.E., M.Si, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 05 Juni 1988. Saya menyelesaikan Sarjana Ekonomi (S.E.) pada 3 Juni 2010. Saya merupakan alumni dari Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Bengkulu. Pada Bulan April 2013 saya mendaftar menjadi mahasiswa Pascasarjana, dan tanggal 27 Agustus 2015, saya lulus dari Program Pascasarjana (PPs) Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan. Saat ini saya beraktivitas sebagai Dosen Tetap STIE Sultan Agung di Kota Pematangsiantar.



Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M. Lahir di Demak pada tanggal 16 Desember 1978. Dia menyelesaikan kuliah di Program Diploma III Pajak dan mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan pada tahun 1999 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 9 September 1999. Setelah mengawali karir di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Oktober 1999, dia melanjutkan studi Program Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan mendapat gelar Sarjana Sains Terapan pada 3 Februari 2006. Selepas lulus, kemudian diangkat menjadi Pemeriksa Pajak dan ditempatkan di Surakarta dan Temanggung. Pada tahun 2011, dia mendapatkan beasiswa S2 dari Australia Development Scholarships (ADS) sampai akhirnya mendapatkan gelar Master of Public policy and Management di The University of Melbourne, Australia. Setelah lulus, ditempatkan di Kantor Pusat DJP selama hampir 3 tahun. Setelah lulus seleksi penerimaan dosen di lingkungan Kementerian Keuangan, pada bulan November 2016, dia pindah dari DJP ke Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, akhirnya pada Desember 2017 diangkat menjadi Dosen Tetap di PKN STAN dan sampai sekarang ditempatkan di Jurusan Pajak pada program studi Diploma III Pajak.



Robert Tua Siregar, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 November 1967. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Teknik Manajemen Industri pada 06 Januari 1992, dan Sarjana Sospol pada 04 November 1992. Ia merupakan alumnus Jurusan Teknik Manajemen Industri Fakultas Teknik Universitas Sisingamangaraja XII Medan dan Sosiologi Fakultas Sospol Univ. Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 1998 mengikuti Program Tugas Belajar pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dan lulus pada tahun 2001 dari Universitas Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 2007 menjalani Tugas Belajar Doktor Falsafah Bidang Urban & Regional Planning pada University Of Malaya. Sejak tahun 1994 menjadi dosen pada perguruan tinggi swasta di Pematangsiantar, dan pada tahun 2012 beralih fungsi status dari Pegawai Pemerintahan menjadi Dosen DpK di Universitas Swasta

Pematangsiantar dan ditempatkan di Program Pascasarjana Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dan Fakultas Ekonomi pada program studi studi pembangunan. Saat ini Dosen di STIE Sultan Agung Pematangsiantar. tuasir@gmail.com



Endang Lifchatullaillah, S.E., M.M lahir di Kota Jember pada tanggal 31 Oktober 1968. Isteri dari Sudarmono, S.Pd ini telah dikaruniai dua orang anak (Perempuan dan Laki- laki) serta seorang cucu.

Pengalaman karier : Karyawan PKP-RI Kab. Jember, Pembantu Direktur II Akbid dr Soebandi Jember, Ketua Koperasi Wanita “Mawar” Jember (2009–sekarang), Ketua Koperasi Karyawan “Amanah” (2014 – 2018), Bendahara Koperasi Karyawan “Pasti Mesra” (2015 – sekarang), Direktur

Kuangan PT Berkah Amanah Bersama Jaya Makmur (2018 – sekarang), Tenaga Pengajar (Dosen) di STIKES dr Soebandi Jember.

Pengalaman Menulis : Menulis dalam Antologi (Pegiat Literasi Nusantara, Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia) dan karya tunggal.

Email : endanglif@gmail.com,

instagram : @endanglif

Akun FB Endang Lifchatul atau WA : 0813 3649 7874 / 0852 0449 7874



Elisabeth Lenny Marit, SE., M.Sc., lahir di Jayapura pada tanggal 05 Agustus 1982. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada 28 September 2004. Ia merupakan alumnus Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih Jayapura. Pada tahun 2008 mengikuti Program Magister Sains Ilmu Ekonomi dan lulus pada tahun 2009 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2010 diangkat menjadi Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura

dan ditempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi Ekonomi

Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi, pindah tugas ke Universitas Papua Manokwari pada tahun 2018 hingga sekarang.



Hengki Mangiring Parulian Simarmata, S.Si., M.M., lahir di Pematangsiantar. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2014 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2015 diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik Bisnis Indonesia Murni Sadar Pematangsiantar di Jurusan Administrasi Perkantoran. Mengampu matakuliah Perbankan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko Bank, Komunikasi

Bisnis, Etika Bisnis, Public Relation, dan Administrasi Perkantoran. Dosen bersertifikat pendidik dengan, Author Sinta : 5998993 dan ID Scopus : 57215917254. Peraih hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2019 dan tahun 2020 bidang Manajemen dan Pariwisata. Buku yang telah terbit hasil kolaborasi sejak tahun 2020 yaitu : Tourism Marketing, Pengantar Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Manajemen Bisnis, Capital Management, Kita Menulis : Merdeka Menulis, Kuat Melawan Korona, Pembelajaran di Masa Covid-19 Work from Home, Email : hengkisimarmata.mm@gmail.com. Google scholar : Hengki Mangiring Parulian Simarmata.



Agustian Prasetya. Dosen Magister Management Universitas Bina Nusantara. Magister Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Trainer, konsultan pengembangan kapasitas organisasi di BUMN, BUMD, perusahaan swasta asing dan nasional, untuk data analytics dan kinerja organisasi, komunikasi dan coaching, satisfaction dan engagement, performance indicators dan ballance score cards

Menekuni kajian kepemimpinan, pembelajaran, etika bisnis dan CSR, human capital. Aktif di lembaga sosial pendidikan dan kebudayaan. Menikah dengan

Widyandini Soetjipto dikaruniai dua anak Alia Widyaprasetya dan Abrahamsyah Krisadi Widyaprasetya



Dr. Bonaraja Purba, M.Si Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 15 April 1962. Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dan Doktor Ilmu Ekonomi juga dari Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini aktif menulis buku dan berkarir sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Sumatera Utara. Beberapa buku karya

kolaborasinya yang telah diterbitkan dalam dua tahun terakhir antara lain Kewirausahaan Peluang dan Tantangan; Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan; Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran; Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar; Teori Administrasi Publik; Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan; Manajemen Operasional: Teori dan Strategi; Manajemen Produksi dan Operasi; dan Pengantar Ilmu Pertanian.

EKONOMI & BISNIS INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terefleksi dengan sistem perekonomian yang dianut yang mendukung para pengusaha dan pemerintah sehingga bisnis dapat berkembang dengan baik. Tahun 2020 merupakan tantangan besar bagi masing-masing negara. Pertumbuhan ekonomi yang minus dan stagnan membutuhkan perhatian untuk diperbaiki. Masing-masing negara memilih sistem ekonomi yang dirasa sesuai untuk diterapkan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberi faedah materi keilmuan bagi para pembacanya mengenai Ekonomi dan Bisnis Indonesia.

Buku ini membahas bagian-bagian menarik dan penting seperti:

Bab 1 Sistem Ekonomi Indonesia

Bab 2 Sejarah Ekonomi Indonesia

Bab 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi

Bab 4 Krisis Ekonomi

Bab 5 Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Bab 6 Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Utang Luar Negeri

Bab 7 Perusahaan Non Koperasi BUMS, BUMN dan BUMD

Bab 8 Ekonomi Koperasi

Bab 9 Ekonomi Kreatif

Bab 10 Ekonomi Desa

Bab 11 Corporate Social Responsibility (CSR)

Bab 12 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6761-57-1



9 786236 761571